

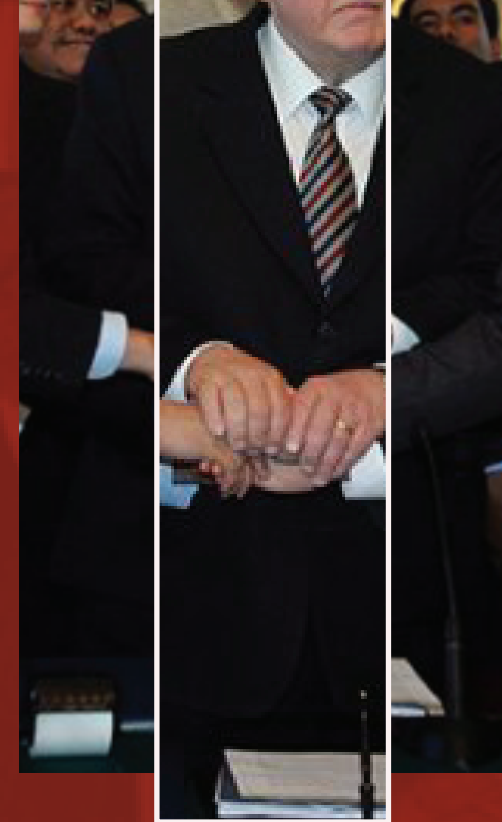
HEGEMONI

JEJAK BAHASA POLITIK PASCA MOU HELSINKI

Pasca Perjanjian Helsinki telah terjadi banyak perubahan di Aceh, termasuk munculnya berbagai bahasa yang menghegemoni. Beberapa kata dan frasa dianggap sebagai hegemoni dan dapat menimbulkan rasa takut dan tekanan-tekanan pada kelompok tertentu dan masyarakat luas. Politisasi bahasa merupakan hal yang umum terjadi selama dan setelah konflik.

Istilah-istilah yang dipolitisasi cenderung menakutkan banyak orang, termasuk istilah "diamankan, disekolahkan, separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Orang Tak Dikenal (OTK)". Istilah-istilah ini sangat menghegemoni bagi masyarakat di Aceh pada saat itu, meskipun beberapa istilah tersebut jarang digunakan hari ini. Kemudian beberapa istilah lain muncul menjelang pemilukada pertama pasca MoU Helsinki, seperti istilah "Orang yang Belum Teridentifikasi" (OBT), "Orang yang Tidak Bertanggung Jawab" (OTB), dan "Pelaku yang Belum Teridentifikasi" (PBT).

Penggunaan istilah-istilah ini menunjukkan bahwa bahasa telah dieksploitasi sedemikian rupa untuk keuntungan politik pribadi dan kelompok, fenomena ini sebagai upaya mencegah masyarakat berpikir kritis.



HEGEMONI
JEJAK BAHASA POLITIK
PASCA MOU HELSINKI

HEGEMONI





JEJAK BAHASA POLITIK PASCA MOU HELSINKI

Firdaus M. Yunus - Raina Wildan - Syamsul Rijal
Lukman Hakim - Syarifuddin - Munawarah
Mutiara - M. Fathin Shafly Marzuki
Muhammad Zunuwanis - Rizki Putri



BANDAR
PUBLISHING

Lamgugop, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Email: bandar.publishing@gmail.com
www.bandarpublishing.com

 [bandar.publishing](https://www.instagram.com/bandar.publishing)  [@bandarbuku](https://twitter.com/bandarbuku)
 Bandar Publishing  08116880801





HEGEMONI

JEJAK BAHASA POLITIK PASCA MOU HELSINKI

Firdaus M. Yunus - Raina Wildan - Syamsul Rijal
Lukman Hakim - Syarifuddin - Munawarah
Mutiara - M. Fathin Shafly Marzuki
Muhammad Zunuwanis - Rizki Putri

Hegemoni: Jejak Bahasa Politik Pasca MoU Helsinki

Firdaus M. Yunus, Raina Wildan, Syamsul Rijal, Lukman
Hakim, Syarifuddin, Munawarah, Mutiara, M. Fathin
Shafly Marzuki, Muhammad Zunuwanis, Rizki Putri

Editor:

Juwaini

Cover & Layout:

@musthafanetwork

Diterbitkan Oleh: **Bandar Publishing**

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi Aceh.

Hp. 08116880801 IG. bandar.publishing

TW. @bandarbuku FB. Bandar Publishing

Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

ISBN: 978-623-449-108-1

Cetakan Pertama, Maret 2023

Ukuran : 14,5 x 20,5 cm | Halaman: x + 159 hlm

HAK CIPTA DILINDUNGAN UNDANG-UNDANG

All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin ini dari Penerbit.

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

PENGANTAR PENULIS

Syukur alhamdulillah buku Hegemoni: Jejak Bahasa Politik Pasca MoU Helsinki dapat hadir dihadapan pembaca. Data yang tersaji dalam buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2011 hingga 2012 serta ditambah beberapa data terbaru yang dianggap penting. Sumber data untuk penelitian ini didapatkan atas penelusuran sejumlah risalah yang dimuat pada media massa (Koran Serambi Indonesia, Koran Tempo, The Aceh Post, dan beberapa link serta website di internet). Data-data yang terpublis pada koran-koran tersebut dan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yang dipilih kemudian dianalisis dan dijadikan data primer bagi penulisan hasil penelitian dalam buku ini.

Untuk melihat Aceh baru, maka harus melihat detik-detik penandatanganan MoU Helsinki, karena MoU Helsinki menjadi babak baru untuk mengakhiri konflik vertikal antara Aceh dengan Jakarta yang berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya. Pasca penandatanganan MoU Helsinki harapan besar terpatritri bukan hanya dikalangan masyarakat awam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden RI sangat berharap bahwa Aceh segera damai dan pemilukada di Aceh dapat berlangsung aman dan lancar. Harapan tersebut muncul menyusul terjadinya sejumlah aksi penembakan dan teror terhadap masyarakat dan tim sukses calon tertentu menjelang pelaksanaan pemilukada di seluruh Aceh. Teror dan intimidasi saat itu tidak saja dialami oleh kontestan dan timses dalam bentuk fisik saja, dalam bentuk bahasa pun kerap diterima dari lawan poltik mereka.

Dalam kehidupan politik kenegaraan, kekuasaan seseorang atau mereka yang berkuasa, menyebar bukan sekadar melalui alat-alat politik termasuk di dalamnya birokrasi. Lebih jauh lagi kekuasaan itu menyebar dan diaktualisasikan melalui bahasa. Bagi politikus, bahasa yang digunakan adalah bahasa politis supaya yang mendengarkan dapat terpengaruh oleh buaian politiknya. Bagi preman bahasa yang digunakan pada umumnya adalah bahasa lugas, tegas bahkan cenderung kasar. Bagi ulama, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang santun, penuh nasehat serta penuh hikmah. Bagi pejabat bahasa yang digunakan adalah bahasa yang selalu dapat melanggengkan jabatannya. Bahasa pada dasarnya sarana dasar untuk berkomunikasi

sesama, namun yang sering terjadi bahasa menjadi alat untuk menghegemoni struktur yang lainnya. Menurut Wittgenstein setiap bahasa merupakan sebuah permainan, yang di dalamnya memiliki permainan sendiri. Aturan dari permainan satu tidak dapat dipakai untuk aturan permainan lain. Dengan demikian, melalui bahasa, kekuasaan dapat semakin akumulatif atau dapat dibawa ke segala arah.

Untuk melanggengkan kekuasaan, banyak cara yang akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang haus terhadap kekuasaan. Dalam konteks politik, cara Machiavellian masih sering digunakan untuk mempertahankan kekuasaan melalui kekerasan seperti teror, intimidasi, penculikan, penyiksaan bahkan pembunuhan. Politik kekerasan seperti ini banyak dilakukan oleh penguasa negara untuk mempertahankan dominasi kuasanya atau oleh organisasi yang 'berkuasa' maupun oleh oknum-oknum tertentu untuk merebut kekuasaan. Merebut atau mempertahankan kekuasaan tidak salah, tetapi melakukan praktek Machiavellian dalam upaya mereproduksi kekuasaan itu yang salah. Bahasa lain yang maknanya hampir sama belakangan telah diperkenalkan oleh Antonio Gramsci yang mungkin 'dianggap' lebih elegan, yaitu melalui suatu prinsip 'hegemoni. Bagi Gramsci, ide-ide dominan menjadi penentu keberhasilan seseorang atau kelas tertentu dalam pertarungan kekuasaan, hal ini disebabkan ide-ide dalam keadaan tertentu dapat mempengaruhi hasrat dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang.

Dominasi ide-ide dalam pertarungan kekuasaan ini kemudian yang disebut sebagai hegemoni ide melalui usaha pengintegrasian bahasa untuk mempengaruhi dan sekaligus mengkooptasi wacana politik pada tingkat publik. Bentuk dominasi demikian sering terjadi karena fenomena politik yang tidak kondusif dan konflik elite penguasa yang tidak berkesudahan, sehingga mendorong munculnya *social and political distrust*.

Dalam konteks Aceh, dominasi sering sekali bersentuhan dengan realitas penggunaan dan pemilihan bahasa yang dikonstruksikan ke dalam realitas sosial-politik yang pada akhirnya menjadi sebuah kekuatan dominan dalam struktur realitas, serta baru bermakna tatkala dijelaskan melalui bahasa. Pemilihan dan penggunaan bahasa-bahasa untuk mengkonstruksikan realitas sosial-politik pada akhirnya menjadi bersifat politis ideologis ketika berhubungan dengan mekanisme mempertahankan kekuasaan. Meski lebih bersifat manusiawi ketimbang cara Machiavellian, pilihan bahasa tersebut membentuk sebuah dominasi, tetapi proses dominasi bahasa ini tetap mengandung sejumlah 'kecurigaan' atas mekanisme politik kekuasaan yang digunakan seseorang atau kelas penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya. Fenomena dominasi dan politisasi melalui bahasa dalam dua tahun terakhir (2011-2012) menjelang pelaksanaan pilukada maupun pasca pilukada telah menjadi tema sentral dalam realitas kehidupan masyarakat Aceh.

Atas terbitnya buku ini penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak yang ikut membantu buku ini.

Lhok Bangka, 5 Februari 2023

Firdaus M. Yunus

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis ~ iii

Daftar Isi ~ ix

BAB SATU PENDAHULUAN ~ 1

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Metode ~ 9

**BAB DUA JEJAK KARYA TULIS ILMIAH DAN
PENDEKATAN TEORETIK ~ 11**

- A. Menelusuri Jejak Karya Tulis Ilmiah ~ 11
- B. Pendekatan Teoretik ~ 19

**BAB TIGA SETTING SOSIAL MASYARAKAT ACEH PASCA
MOU HELSINKI ~ 27**

- A. Kondisi Aceh Pasca Tsunami dan
MoU Helsinki ~ 27
- B. Pembangunan Aceh Pasca Tsunami
Dan MoU Helsinki ~ 30
- C. Lahirnya Partai Aceh ~ 42

D. Perkembangan Pranata Adat Aceh ~ 47

1. Mukim ~ 50
2. Gampong ~ 56
3. Tuha Peut ~ 60

BAB EMPAT BAHASA-BAHASA HEGEMONIK ~ 65

A. Ragam Istilah Bahasa yang Hegemonik ~ 65

1. Pemilukada ~ 66
2. Syariat Islam ~ 97
3. Anak Punk ~ 105
4. Aliran Sesat ~ 109

B. Bahasa Politik yang Hegemonik ~ 118

C. Pengucap Bahasa Politik ~ 122

BAB LIMA PENUTUP ~ 133

Kesimpulan ~ 133

DAFTAR PUSTAKA ~ 137

TENTANG PENULIS ~ 149

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki sampai saat ini semakin menarik untuk diteliti. Fenomena ketertarikan tersebut di satu sisi MoU Helsinki menjadi babak baru untuk mengakhiri konflik vertikal antara Aceh dengan Jakarta yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Di sisi lain kemenangan calon independen pada pemilu 2006 yang lalu juga menjadi sejarah tersendiri bagi Aceh dan Indonesia, karena belum pernah di Provinsi/Kabupaten/Kota manapun di Indonesia pada saat itu ada calon independen. Beberapa kronologis sejarah manis yang sulit terlupakan terasa silau menjelang pemilukada tahun 2012. Hal itulah yang membuat Presiden SBY berharap bahwa pemilukada

di Aceh dapat berlangsung aman dan lancar.¹ Harapan tersebut muncul menyusul terjadinya sejumlah aksi anarkis (penembakan dan teror) terhadap masyarakat dan tim sukses calon kandidat yang mengikuti kontestasi dalam perhelatan pemilu pada saat itu.

Dalam kehidupan politik kenegaraan, kekuasaan seseorang atau mereka yang berkuasa, menyebar bukan sekadar melalui alat-alat politik termasuk di dalamnya birokrasi.² Lebih jauh lagi kekuasaan itu menyebar dan diaktualisasikan melalui bahasa.³ Menurut Pierre Bourdieu, bahasa adalah salah satu atribut manusia yang paling penting. Bourdieu melihat bahwa bahasa tidak hanya merupakan alat komunikasi dan kapital budaya, tetapi juga praktik sosial. Bahasa didapatkan oleh individu pelaku sosial dari masyarakat dan lingkungan tempat hidup dan tinggal. Bahasa menjadi instrumen penting yang harus dimiliki oleh pelaku sosial untuk dapat bersosialisasi dengan pelaku sosial yang lain. Melalui sosialisasi inilah makna kata-kata akan terbentuk dan terserap ke dalam kesadaran individu. Bahasa sebagai praktik

1 Rafli Hasan, "Libido Elite Politik di Pemilu Aceh 2012", dalam, <http://www.tribunnews.com/diakses> tanggal 17 Maret 2012.

2 Politik berkaitan erat dengan warga negara, kewargaan maupun untuk melihat institusi-institusi politik di dalam masyarakat. Bagi Aristoteles, politik merupakan cabang pengetahuan praktis berkaitan dengan etika manusia dalam kegiatan berkelompok. Manusia adalah makhluk polis (negara-kota), maka kecenderungan alamiah dari manusia adalah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok dan bertindak sebagai kelompok. Tujuan politik menurut Aristoteles sama dengan tujuan kehidupan manusia yaitu mencapai *eudaimonia* yaitu kebahagiaan hidup. Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 35.

3 'Bahasa Kekuasaan', dalam, <http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip>, diakses tanggal 17 Maret 2012.

sosial merupakan hasil interaksi aktif antara struktur sosial yang objektif dengan *habitus*⁴ linguistik yang dimiliki pelaku sosial.⁵

Bahasa yang demikian rupa bisa diarahkan ke mana suka. Bagi politikus, bahasa yang digunakan adalah bahasa politis supaya yang mendengarkan dapat terpengaruh oleh buaian politiknya. Bagi preman, bahasa yang digunakan pada umumnya adalah bahasa lugas, tegas bahkan cenderung kasar. Bagi ulama, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang santun, penuh nasehat serta penuh hikmah. Bagi pejabat bahasa yang digunakan adalah bahasa yang selalu dapat melanggengkan jabatannya.

Bahasa dengan demikian sarana dasar untuk berkomunikasi sesama, namun yang sering terjadi bahasa menjadi alat untuk menghegemoni struktur yang berbeda dengannya. Menurut Wittgenstein setiap bahasa merupakan sebuah permainan, yang di dalamnya memiliki permainan sendiri. Aturan dari permainan satu tidak dapat dipakai untuk aturan permainan lain. Dengan demikian, melalui bahasa, kekuasaan dapat semakin akumulasi atau dapat dibawa ke segala arah.

4 *Habitus* adalah istilah yang digunakan oleh Bourdieu sebagai upaya pengkondisian yang dikaitkan dengan syarat keberadaan satu kelas. *Habitus* merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis, kemudian *habitus* struktur intern yang selalu dalam proses restrukturisasi. Kemudian teori *habitus* mencoba mengatasi dualisme kebebasan dan determinisme yang seakan-akan memenjara tindakan-tindakan dalam ranfka pembatas-pembatas. Teori ini memberikan peluang bagi konsep individu otonom, bebas dan rasional. Haryatmoko, 'Menyingkap kepalsuan Budaya Pengusda.

5 Suma Riella Rusdiarti, 'Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan, dalam *Basis*, Nomor 11-12 Tahun ke 52, November-Desember, 2003, 34.

Untuk melanggengkan kekuasaan, banyak cara yang akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang haus terhadap kekuasaan. Realitas telah menunjukkan bahwa kekuasaan dimanapun tidak akan pernah berbagi dengan orang atau kelompok lain secara sukarela. Dimanapun dan kapanpun, sebuah kekuasaan apabila dijalankan selalu melibatkan berbagai usaha untuk melegitimasi, sekaligus mempertahankannya dari berbagai bentuk yang dapat ‘menggangu’ stabilitas kekuasaan tersebut. Realitas atas cara-cara mempertahankan kekuasaan kadang kala banyak ditempuh dengan melibatkan berbagai kebijakan politik kekerasan, salah satunya melalui cara *Machiavellian*⁶ serta dijalankan melalui proses hegemoni sebagaimana yang diteorikan oleh Antonio Gramsci.

Dalam konteks politik, cara Machiavellian, untuk mempertahankan kekuasaan adalah melalui bentuk kekerasan dan represi,⁷ seperti teror, intimidasi, penculikan, penyiksaan

6 Machiavelli adalah seorang sastrawan, pemikir, dan politikus Italia yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan politik di seluruh Eropa pada abad ke 15 dan 16 M. Dia sangat menyadari kelemahan sistem politik Eropa pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan seorang penguasa, untuk itu Machiavelli berpendapat bahwa sesungguhnya Italia dan Negara Eropa lainnya tidak akan pernah bersatu, kecuali dengan menerapkan bentuk pemerintahan monarkhi, pemerintahan yang dijalankan oleh seorang penguasa tunggal yang memiliki kekuatan politik yang besar, diktatorian dan jenius. Dengan demikian Machiavelli lebih mengutamakan sistem pemerintahan monarkhi ketimbang sistem demokrasi dan teokrasi yang banyak dijalankan pada saat itu. Lihat, Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, Terj. Rorihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 99.

7 Bentuk kekerasan, teror dan intimidasi terjadi di banyak tempat di Aceh menjelang pemilukada. Menurut penelusuran melalui Serambi Indonesia, bahwa kekerasan

bahkan pembunuhan.⁸ Politik kekerasan seperti ini banyak dilakukan oleh penguasa negara untuk mempertahankan dominasi kekuasaannya atau oleh organisasi yang ‘berkuasa’ maupun oleh oknum-oknum tertentu untuk merebut kekuasaan. Gambaran Machiavellian di atas untuk saat ini terjadi hampir di seluruh belahan dunia, termasuk kekerasan menjelang pemilukada maupun setelah pemilukada seperti pernah terjadi di Aceh. Merebut atau mempertahankan kekuasaan tidak salah, tetapi melakukan praktek Machiavellian (teror, intimidasi, penculikan, penyiksaan bahkan pembunuhan) dalam upaya mereproduksi kekuasaan itu yang salah. Bahasa lain yang maknanya sama belakangan telah diperkenalkan oleh Antonio Gramsci yang mungkin ‘dianggap’ lebih elegan, yaitu melalui suatu prinsip ‘hegemoni’⁹.

selama tahun 2011 dan 2012 terjadi sebanyak 17 kasus, intimidasi sebanyak 16 kasus dan pembunuhan sebanyak 2 kasus. Sedangkan menurut catatan Imparsial, bentuk teror, intimidasi dan pembunuhan selama tahun 2011 sebanyak 17 kasus, dan semua kasus tersebut berkaitan langsung dengan suasana politik terkini di Aceh.

- 8 Yasraf Amir Piliang, *Pengantar dalam buku Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- 9 Antonio Gramsci, *Notes from Prison Notebooks* (London: Lawrence & Wishart, 1991). Secara etimologis, kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani, *egemonia/egemon*, yang berarti pemimpin/penguasa dalam konotasi lazimnya berhubungan dengan konteks kenegaraan. Hegemoni menunjukkan pada dominasi posisi negara-negara kota, misalnya Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain. Sejak abad ke-19, hegemoni memperoleh makna baru. Pengertiannya menjadi lebih sering merujuk pada situasi tertentu terjadinya dominasi politik dari suatu negeri kuat (super power) terhadap negeri lain (lemah) yang biasa juga disebut dengan istilah imperealisme (William, 1983: 144). Memasuki abad ke-20, kata hegemoni menjadi kian penting berkat penggunaannya yang intensif dan spesifik oleh ‘kubu; Marxisme. Dalam kubu ini sendiri, istilah hegemoni sesungguhnya mulai dikenal kira-kira sejak tahun 1883/1884, ketika Plekhanov menggunakan istilah ini untuk menunjukkan adanya dominasi (hegemoni) kepemimpinan proletariat yang mewakili aliansi

Pada awalnya prinsip hegemoni digulirkan oleh Gramsci dalam rangka mengkritik Karl Marx. Sebab banyak dari penganut Marx menafsirkan Marxisme sebagai dogma dan doktrin untuk revolusi. Sementara memaknai revolusi merupakan pekerjaan menunggu datangnya konflik inheren dari sang musuh, kapitalisme. Ini merupakan tamparan dari Gramsci dalam upaya menyelamatkan Marxisme itu sendiri. Dengan demikian teori Gramsci tentang hegemoni adalah langkah maju yang dirumuskannya untuk menghadapi kelas dominan yang direpresentasikan oleh Marx melalui mekanisme dominasi kelas pekerja atas kepemilikan mereka serta sarana produksi dan kapital.¹⁰ Prinsip ini dikritik oleh Gramsci, bahwa dominasi dalam pertarungan kekuasaan lebih dipahami dalam konteks *pertarungan ide-ide*. Bagi Gramsci, ide-ide dominan menjadi penentu keberhasilan seseorang atau kelas tertentu dalam pertarungan kekuasaan, hal ini disebabkan

berbagai kelompok sosial dalam berhubungan dengan kekuasaan tsar/tsarist *police state* (Bocock, op.cit. 125). Tetapi, Gramsci-lah yang berjasa mempopulerkannya hingga mendorong lahirnya kajian-kajian yang beragam. Dalam terminologi Gramsci, hegemoni tidak hanya berarti satu dominasi politik dalam relasi antar-negeri, tetapi juga merupakan dominasi politik dari suatu kelas kuat terhadap kelas yang lemah dalam relasi antar kelas sosial. Malahan, lebih dari sekedar dominasi politik. Dalam konteks Gramsci, hegemoni juga bisa berarti dominasi pada bidang-bidang lainnya yang lebih umum seperti, pandangan hidup, kebudayaan, ideologi dan sebagainya. Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan; Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996), 28. Kemudian yang paling ekstrem adalah Hegemoni dimaknai sebagai sesuatu yang memungkinkan penindasan dan penguasaan tidak dianggap sebagai suatu kejahatan, tetapi sebagai *sesuatu yang wajar*, dan bahkan perlu dijalankan dengan *sikap bangga*. Sebagai contoh adalah pemaksaan bahasa asing kepada murid di sekolah agar sekolah yang bersangkutan menjadi sekolah bertaraf internasional.

10 Abd. Malik Haramain, dkk, *Pemikiran-pemikiran Revolutioner* (Yogyakarta: Averroes Press, 2001), 83.

ide-ide dalam keadaan tertentu dapat mempengaruhi hasrat dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang.

Dominasi ide-ide dalam pertarungan kekuasaan ini kemudian yang disebut sebagai hegemoni ide melalui usaha pengintegrasiaan bahasa untuk mempengaruhi dan sekaligus mengkooptasi wacana politik pada tingkat publik. Proses dominasi ide ini biasanya terjadi melalui penciptaan hegemoni politik lewat cara-cara ‘stimulasi’ yang berbeda dari terminologi ‘masyarakat politik’ yang mempertahankan kekuasaan lewat cara-cara paksaan dan kekuatan. Dominasi ide-ide menjadi menemukan bentuknya tatkala ia ‘beranyamkan’ reproduksi bahasa yang digunakan oleh seseorang/kelas sosial tertentu untuk memberikan dominasi atas makna yang diinginkan oleh kelas dominan tersebut. Dominasi ide-ide hanya dapat berjalan efektif dan menemukan kekuatannya tatkala ia menggunakan bahasa sebagai alat dominasi, sekaligus mungkin juga represif.¹¹

Bentuk dominasi demikian sering terjadi karena fenomena politik yang tidak kondusif dan konflik elite penguasa yang tidak berkesudahan, sehingga mendorong munculnya *social and political distrust*. Dengan demikian kekerasan yang ingin memaksa kehendak akan muncul dalam bentuk premanisme yang dilakukan oleh elite politik, aparat pemerintahan dan agamawan, serta konflik horizontal seperti terjadinya perkelahian antara

11 Listiyono Santoso, “Hegemoni Bahasa dalam Politik Kekuasaan Orde Baru”, *Makalah*, (Tidak diterbitkan).

masyarakat dengan perusahaan-perusahaan¹² yang ada di desa-desa.¹³

Dalam konteks Aceh, dominasi sering sekali bersentuhan dengan realitas penggunaan dan pemilihan bahasa yang dikonstruksikan ke dalam realitas sosial-politik yang pada akhirnya menjadi sebuah kekuatan dominan dalam struktur realitas, serta baru bermakna tatkala dijelaskan melalui bahasa. Pemilihan dan penggunaan bahasa-bahasa untuk mengkonstruksikan realitas sosial-politik¹⁴ pada akhirnya menjadi bersifat politis ideologis ketika berhubungan dengan mekanisme mempertahankan kekuasaan. Meski lebih bersifat manusiawi ketimbang cara Machiavellian, pilihan bahasa tersebut membentuk sebuah dominasi, tetapi proses dominasi bahasa ini tetap mengandung sejumlah 'kecurigaan' atas mekanisme politik kekuasaan yang digunakan seseorang atau kelas penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya.¹⁵ Fenomena dominasi dan

12 Hegemoni pada tataran masyarakat di Desa yang sering terjadi adalah melalui penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan yang berujung pada konflik berkepanjangan. Di Aceh Singkil misalnya, baru-baru ini ratusan massa dari 22 desa yang bersengketa lahan dengan PT Nafasindo pada tanggal 19 Januari berusaha menduduki lahan kelapa sawit pada koordinat hasil ukur ulang sebagai opsi penyelesaian sengketa yang tak kunjung dipasang pato permanen sebagaimana tuntutan warga. "Massa Aceh Singkil Terobos Kebun Nafasindo", dalam, *Serambi Indonesia*, 20 Januari 2012, 17.

13 John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Penerjemah, Ary Setyaningrum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), xiii

14 Dalam terminologi Bertrand Russel, bahasa memiliki kesesuaian dengan struktur realitas dan fakta, sedang menurut Wittgenstein, bahasa merupakan gambaran realitas. Kaelan, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Paramadigma, 1998), 93-118.

15 Menurut Nietzsche, berilah ruang bagi penguasa, supaya tidak salah paham. Buka

politisasi melalui bahasa menjelang pelaksanaan pemilukada untuk pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPR menjadi sangat mudah didapatkan dalam realitas kehidupan masyarakat Aceh dan masyarakat mana saja di Indonesia.

B. Metode

Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dipilih dalam menulis hasil penelitian ini. Menurut peneliti penggunaan metode dan pendekatan tersebut dianggap sangat tepat dalam mendeskripsikan sekaligus menganalisis bahasa-bahasa politik (hermeneutika). Peneliti berusaha memahami dan mendalami makna dan pendapat yang dituangkan oleh para filsuf dalam menerangkan esensi dari ragam-ragam hermeneutik yang ada.¹⁶

Metode kualitatif dalam penelitian ini sebagai sumber deskripsi yang luas dan memuat penjelasan-penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam memperoleh data penelitian. Dari data yang diperoleh diharapkan dapat memahami peristiwa secara kronologis, serta dapat menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran untuk mendapatkan penjelasan yang lebih

ruang agar yang berkuasa membuat apa yang ia sukai. Hidup harus diberikan peluang, di situ kehendak yang bergairah mengembangkan kemampuannya. Kehendak akan penguasaan ialah kehendak untuk mengupayakan kemampuannya, dengan kehendak akan penguasaannya. Penguasaan bukanlah kekerasan, pemerintahan, penaklukan atau ketakutan. Dalam penguasaan, kehendak akan terlampiaskan sepenuhnya. Manusia yang berupaya ke arah itu sampai pada kepunahannya yang sejati menjadi manusia bertumbuh terus serta melampaui diri tiada akhir. Bernhard Kieser, 'Beragama di saat Krisis', dalam *Basis*, Nomor 11-12, tahun ke 49, November-Desember, 2000, 29.

16 Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1998), h. 31.

banyak dan bermanfaat sekaligus dapat membimbing peneliti untuk memperoleh temuan yang tidak terduga sebelumnya untuk membentuk kerangka teori baru.¹⁷ Selain itu, metode kualitatif juga dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.¹⁸

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pemberitaan harian Serambi Indonesia, karena Serambi Indonesia sebagai koran paling berani memberitakan berbagai peristiwa di seluruh daerah pada masa konflik maupun pasca damai di Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri perpustakaan offline maupun online guna menemukan referensi-referensi yang dibutuhkan terkait kebutuhan data penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis, agar data-data yang dipakai memenuhi unsur ilmiah yang diharapkan.

17 Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 284. Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 138-158.

18 Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar,...*, (2003), h. 5. Safrilisyah Syarif, Firdaus M. Yunus. *Metode Penelitian Sosial*. (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), h. 27.

BAB DUA

JEJAK KARYA TULIS ILMIAH DAN PENDEKATAN TEORETIK

A. Menelusuri Jejak Karya Tulis Ilmiah

Uraian secara sistematis tentang bahasa, maupun politik sudah cukup banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelusuran kepastakaan yang sudah dilakukan, maka ditemukan beberapa referensi yang memberikan informasi tentang bahasa, referensi tersebut berupa buku dan jurnal ilmiah. Di antara buku yang membahas tentang bahasa ditulis oleh Rizal Mustansyir, *Filsafat Analitik Sejarah Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya*,¹ Rizal dalam buku tersebut lebih banyak mengulas

1 Rizal Mustansyir, *Filsafat Analitik Sejarah Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

peran ahli filsafat yang menaruh perhatian terhadap bahasa yang mereka gunakan untuk menyampaikan maksud filsafat itu. Rizal melihat bahwa para filsuf terlalu menyibukkan diri dalam upaya memberikan pemahaman terhadap realitas, pada akhirnya timbul kekacauan akibat tidak didukung oleh sarana yang memadai, sarana itu tidak lain adalah bahasa.

Referensi lain yang dapat mendukung penelitian nantinya adalah karya buku yang ditulis oleh E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*.² Banyak informasi yang dapat diambil dari buku tersebut diseperti metode dan cara yang ideal untuk dipakai. Sebuah metode yang ideal harus menampilkan struktur yang fleksibel, kongkrit dan objektif, namun tetap menampilkan segi subjektifnya. Topik tersebut adalah hermeneutik, sebuah topik tua, muncul sebagai sesuatu yang menarik dan baru di bidang filsafat. Hermeneutik sebagai metode filsafat tetap berguna mendukung pemahaman kita tentang kebenaran dan interpretasi bahasa secara filosofis.

Sebagai referensi yang tidak boleh ditinggalkan adalah buku yang diedit oleh Michael T. Gibbons, *Tafsir Politik Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer*.³ Buku ini berupaya menggambarkan sejumlah pemikiran teoritikus politik dan sosial yang berasumsi bahwa penyelidikan terhadap politik dan sains sosial pada dasarnya bersifat interpretatif. Dengan

2 E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

3 Michael T. Gibbons, *Tafsir Politik Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer*, Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 2002).

menggunakan pendekatan interpretatif terhadap kajian politik dan kehidupan sosial, para teoritikus melakukan penjelajahan intelektual pada tataran penyelidikan filosofis dan teoretis yang membongkar hingga ke dasar substansinya.

Sementara buku-buku yang membahas seputar Aceh, sekaligus dapat membantu penelitian ini, yaitu buku Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*⁴. Sekalipun buku tersebut bukan ditulis oleh orang Aceh sendiri, tetapi uraian tentang kronologis sejarah perjuangan Aceh dapat di lihat secara terang benderang. Dalam buku tersebut Harry Kawilarang berupaya mengangkat sejarah perjuangan rakyat Aceh sejak masa kejayaan Iskandar Muda, perang-perang yang pernah terjadi di Aceh, sampai pada terlaksananya damai antara GAM-RI di Helsinki.

Buku *Acehnologi*,⁵ yang ditulis oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad berupaya memotret Aceh melalui perspektif sosio kultural masyarakat Aceh. Studi-studi tentang Aceh umumnya berkisar pada sejarah, politik dan keagamaan. Sangat sedikit peneliti yang mengangkat Aceh melalui sudut pandang sosio kultural. Karya Kamaruzzaman Bustamam ini termasuk salah satu buku yang menyoroti Aceh dari perspektif sosio-kultural masyarakat Aceh.

Kemudian untuk melihat sejarah serta dinamika perpolitikan di Aceh, sangat menarik untuk ditelaah buku yang ditulis oleh

4 Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010).

5 Kamaruzzaman Ahmad-Bustamam, *Acehnologi* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012).

Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh*,⁶ dalam buku tersebut Nazaruddin ingin menggambarkan hubungan timbal balik antara Aceh dengan Jakarta. Aceh (rakyat Aceh) pada saat Indonesia berada pada situasi yang sangat sulit dalam mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), rakyat Aceh secara ikhlas dan sukarela membantu Indonesia, bahkan sejarah telah mencatat bahwa satu-satunya daerah yang tidak mampu ditaklukkan oleh Belanda pada saat itu adalah Aceh. Namun setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, pemerintah Indonesia ingkar janji, sehingga rakyat Aceh menentang pemerintah Jakarta dalam suatu perjuangan berdarah, yaitu melalui pemberontakan DI-TII.

Buku yang tidak kalah menariknya lagi adalah *Idealisme Politik Islam di Aceh Sisi Pemikiran Akademisi dan Politisi*,⁷ buku ini adalah kumpulan artikel yang membahas secara khusus tentang bagaimana politik yang ideal diterapkan di Aceh Pasca MoU Helsinki sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di bumi serambi Mekkah. Artikel-artikel dalam buku tersebut pada umumnya menyeroti idealisme politik Islam di Aceh dari sisi budaya, hukum, dan sosio-antropologi.

Buku lain yang berkaitan tema penelitian ini adalah karya Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama*,

6 Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Pustaka Utama Temprit, 1990).

7 Muhammad Faisal Amin, dkk, *Idealisme Politik Islam di Aceh Sisi Pemikiran Akademisi dan Politisi* (Banda Aceh: LKAS Banda Aceh, 2011).

*Negara, dan Demokrasi*⁸. Dalam bahasan buku tersebut, Bahtiar Effendi dengan brilian menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi upaya untuk mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara praktik pemikiran politik Islam dan negara. Sebab Islam politik telah menemukan format baru yang mencakup landasan teologis, tujuan, dan pendekatan Islam politik yang sebangun dengan konstruk negara Indonesia.

Untuk melengkapi referensi dalam melihat fenomena di Aceh, buku Anthony Giddens, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*.⁹ dapat digunakan guna menganalisis dinamika kekinian di Aceh, karena hari ini Aceh masih dibayang-bayangi oleh hegemoni kekuasaan, kelompok dan konflik kelas.

Buku Aderito de Jesus Soares dkk, *Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*¹⁰ termasuk karya yang mendukung penelitian, dalam buku tersebut Soares dkk telah mengulas secara baik tentang berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, pelanggaran terjadi mulai dari konflik tanah, perang suku, tuntutan hak para buruh, sampai kepada cara-cara merumuskan kembali demokrasi. Sebab demokrasi dibicarakan, demokrasi diperjuangkan menjadi tumbal dalam serbuah wacana politik

8 Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

9 Anthony Giddens, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, Terjemahan, Vedi R Hadiz (Jakarta: Rajawali Press, 1987).

10 Aderito de Jesus Soares dkk, *Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997).

kekuasaan yang penuh misteri, sehingga demokrasi berada dalam cengkrama 'tangan-tangan' tak berwajah yang bergentayangan menjadi hantu-hantu demokrasi.

Buku *Menggugat Penguasa Ing Ngarso Ngumber Angkoro*,¹¹ yang ditulis oleh Dhurorudin Mashad, telah membuka mata kita betapa kekuasaan menjadi dominan tatkala ada lembaga-lembaga yang seharusnya memiliki kekuatan tetapi dibuat tidak berdaya. Buku mencoba menggambarkan kepada kita bahwa pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah terjadi ketidak seimbangan kekuasaan, yaitu antara eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Dalam hal ini eksekutif menjadi yang paling dominan, posisi eksekutif yang dominan ini biasanya berakibat pada partisipasi, yaitu eksekutif merasa bahwa hak memerintah ada pada dirinya. Sikap ini akhirnya memberikan konsekuensi, bahwa negara cenderung tidak mengakui lembaga-lembaga bentukan masyarakat, dan negara tidak mau tahu pada tuntutan rakyat yang diajukan secara langsung, karena dianggap inkonstitusional.

Selain beberapa buku yang telah disebutkan di atas buku yang ditulis oleh Sahidin, *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki*¹² mampu memberikan inspirasi dan perbandingan dalam melihat praktek perpolitikan di Aceh. Sebab dalam buku tersebut Sahidin melihat terjadinya politisasi agama yang berujung kepada konflik antar pendukung partai. Agama dijadikan alat legetimasi dan justifikasi

11 Dhurorudin Mashad, *Menggugat Penguasa Ing Ngarso Ngumber Angkoro* (Jakarta: Erlangga, 1999).

12 Sahidin, *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki* (yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

politik, para pemuka agama menggunakan agama sebagai alat legitimasi politik, sementara partai nasionalis menggunakan agama sebagai sumber etika politiknya.

Adapun artikel jurnal yang membahas tentang hegemoni antara lain ditulis oleh Endah Siswati dalam Jurnal *Transliter* dengan judul “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci”. Dalam artikel tersebut Endah menampilkan konsep-konsep dasar pemikiran Gramsci tentang hegemoni yang diulas dalam beberapa karya penting, seperti *Prison Notebook*, *The Modern Prince and Other Political Writing*, *Selection From The Prison Notebooks*, *Selection From Cultural Writing*, dan beberapa karya lainnya. Dari karya-karya tersebut, bentuk-bentuk hegemoni Gramsci dapat ditemukan dalam civil society, political society, counter hegemony, war of position, war of movement, intellectual organik dan perannya dalam transformasi social. Konsep pemikiran Gramsci tentang hegemoni juga mendorong perumusan kembali watak kelas, kekuatan-kekuatan sosial dan makna sejati dari kekuasaan dan dominasi.¹³

Artikel lain tentang hegemoni ditulis oleh Primasari Wahyuni dalam Jurnal *Skripta* dengan judul “Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Hujan Karya Tere Liye dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA”. Dalam artikel ini Primasari mendeskripsikan hegemoni yang tertuang dalam novel

13 Endah Siswati, “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci”, dalam Jurnal *Transliter*, Edisi 5 (2019), h. 11-33.

hujan, dan dia menemukan bahwa hegemoni dapat saja berwujud formasi ideologi seperti otoritarianisme, feodalisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme dan vandalisme. Bentuk-bentuk tersebut bisa tertanam dalam realitas kekuasaan masyarakat sipil sekaligus masyarakat politik. Dengan demikian hegemoni dapat berada dan mengambil tempat dimana saja.¹⁴

Artikel lain tentang hegemoni ditulis oleh Ricca Anggraeni dan Endra Wijaya dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana* dengan Judul “Pengantar Mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat”. Ricca dalam artikel tersebut berusaha melihat dan memahami konsep hegemoni yang ditawarkan Gramsci mengenai kelompok sosial dalam memperoleh pengaruh (kekuasaan) melalui cara-cara yang lebih persuasif, dengan menggiring kelompok sosial lain (yang dikuasai) untuk memberikan persetujuannya (konsensus) kepada kelompok sosial yang menguasai.¹⁵

Melalui berbagai kajian atas jejak karya kepustakaan yang telah dilakukan, belum ditemukan satu tulisan pun secara khusus membahas ‘Hegemoni: Jejak Bahasa Politik Pasca MoU Helsinki. Atas dasar kajian di atas, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kebaruan literatur terkait bentuk-bentuk dalam

14 Primasari Wahyuni, “Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Hujan Karya Tere Liye dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA”, dalam *Jurnal Skripta*, Vol. 5, No. 1 (2019), h. 41-58.

15 Ricca Anggraeni dan Endra Wijaya, “Pengantar Mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat”, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 8 No. 4 (1019), h. 494-511.

bahasa yang menghegemoni. Untuk itu penelitian ini dianggap penting sekaligus menarik dilakukan, guna menemukan jawaban atas hegemoni bahasa dalam kancah perpolitikan di Aceh pasca MoU Helisinki.

B. Pendekatan Teoretik

Bahasa bukan penemuan yang diperoleh oleh satu orang dan juga tidak mungkin dilestarikan atau dikembangkan di luar komunitas. Suatu bangsa secara keseluruhan merupakan komunitas bahasa yang kreatif, organis dan natural. Dan sebaliknya bahasa memainkan peran penting dalam pertumbuhan bangsa. Tanpa bahasa, baik masyarakat maupun tingkat kebudayaan lebih tinggi akan menjadi mustahil. Berdasarkan pentingnya bahasa bagi komunitas seluruhnya, maka terdapat kewajiban masing-masing pribadi untuk tidak menggunakan bahasa sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan sifat bahasa. Masing-masing individu berkewajiban untuk mengungkapkan gagasan-gagasan dengan benar dan jujur.

Menggunakan bahasa berarti mengirimkan simbol dari pembicara menuju ke pendengar. Karena bahasa berwujud kata-kata dan kalimat yang digunakan itu berasal dari pribadi seseorang, maka dapat dikatakan bahwa bahasa bersifat individual. Bahasa berfungsi untuk menghubungkan pribadi dengan pribadi. Kemudian bahasa bersifat personal yang berarti

berguna untuk menyatakan pikiran, perasaan dan kemauan individu.¹⁶

Bahasa dapat di lihat dari beberapa jenis khusus, seperti bahasa objek (*object language*) dan bahasa formal (*formal language*). Bahasa objek (*object language*) adalah bahasa yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang kita sadar, sebagai lawan dari *metabahasa* yaitu bahasa yang dipakai untuk berbicara. Ungkapa-ungkapan yang dipakai dalam suatu bahasa objek tidak mempunyai referensi linguistik atau sintaksis. Sementara ungkapan yang dipakai dalam suatu *metabahasa* mempunyai referensi linguistik atau sintaksis.

Untuk mempelajari struktur-struktur suatu bahasa, seseorang harus menggunakan suatu bahasa yang dipelajarinya. Bahasa yang dianalisis secara sistematis disebut bahasa objek. Bahasa yang digunakan dalam analisis bahasa objek ini disebut *metabahasa*. Kemudian bahasa formal (*formal language*) kadang disebut bahasa artifisial, bahasa formalistis, bahasa simbolis, atau bahasa ideal. Maksudnya adalah suatu bahasa yang dengan sengaja disusun menurut aturan-aturan konseptual dan logis dan digunakan untuk memenuhi suatu tujuan khusus secara konsisten dan lengkap.¹⁷

16 Mandoer Pateda, *Linguistik Terapan* (Flores: Nusa Indah, 1991), 18.

17 Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), 196-120.

Beberapa filosof melihat bahwa bahasa memainkan peran besar dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari.¹⁸ Bahasa merupakan keseluruhan sistematis yang terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri. Ferdinand de Saussure (1857-1931) memandang bahasa sebagai lumbung kata-kata dan ungkapan (frasa) kalimat-kalimat hasil aktivitas bebas dan kreatif. Untuk itu, yang penting dalam bahasa adalah aturan-aturan, relasi-relasi dan oposisi-oposisi yang membentuk kata itu.¹⁹ Sementara bagi Carnap, bahasa sehari-hari tidak memadai sebagai sarana pekerjaan konseptual. Ia akan menentukan kaedah-kaedah bahasa. Itu berarti ia menyusun bahasa-bahasa ideal yang kiranya untuk memecahkan wahana konseptual. Sedangkan Chomsky berusaha membedakan antara struktur dalam bahasa, menurutnya manusia memiliki kemampuan bahasa yang amat spesifik.

Spesifikasi bahasa dengan mudah ditemukan di negara manapun, termasuk di Aceh. Di provinsi ini terdapat beberapa bahasa, seperti bahasa Aceh, sebagai bahasa yang digunakan

18 Bagi kaum empiris sering mengakui bahwa bahasa kehidupan sehari-hari sebagai bahasa yang paling bisa diandalkan untuk menjelaskan politik, karena konsep-konsep operasional politik harus tetap dekat dengan penggunaan sehari-hari. Mereka sering mengakui ketidakterbatasan teori oleh bukti. Tetapi dalam praktek ini, ia sedikit berpengaruh pada struktur dan sifat penjelasan empiris. Para teoritis interpretatif menegaskan bahwa hubungan internal antara bahasa dan kehidupan politik dan ketidakterbatasan teori oleh bukti berarti bahwa sifat penjelasan dalam ilmu sosial secara radikal berbeda dengan apa yang ditegaskan oleh kaum empiris. Lihat Charles Taylor, 'Interpretation and the Science of Man', *Review of Metaphysics*, Volume XXV, No. 1, September, 1971, 24. Dalam Michael T. Gibbons (ed), *Tafsir Politik*, terjemahan Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 2002), XX.

19 K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid II (Jakarta: Gramedia, 1985), 384.

oleh mayoritas masyarakat Aceh (Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Sabang), bahasa Kluet, Aneuk Jamei (Aceh Selatan), bahasa Gayo (Aceh Tengah, Gayo Lues), bahasa Alas (Aceh Tenggara) serta bahasa tamiang (Aceh Tamiang). Kekayaan bahasa daerah seperti tersebut di atas sebagai kearifan lokal dan warisan budaya yang patut dihargai oleh siapapun, dan bangsa manapun.

Bahasa menjadi pusat perhatian pada abad 20, sebab abad ke 20 banyak lahir dan berkembang ilmu bahasa secara eksplosif. Istilah eksplosif menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan ilmu dengan memakai pendekatan linguistik, seperti ilmu humaniora. Ilmu bahasa lahir dari sejumlah proses reduksi dengan pendekatan yang saling bertentangan dan dibela oleh aliran yang saling bermusuhan. Kemudian ada hal yang dianggap rancu yakni telah muncul hegemoni secara parsial lewat permainan bahasa, karena sebagian orang menganggap ilmu bahasa unggul di atas ilmu lain.

Bahasa sebagai medium sangat erat kaitannya terhadap makna, perhatian terhadap makna hendak menunjukkan pada sebagian besar makna yang tidak terartikulasikan dari diri seseorang. Bahasa adalah karakter yang mendefinisikan manusia, karena manusia dikarakteristikan oleh kreasi musik, seni, tari dan seluruh bentuk-bentuk simbolik.²⁰ Untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi tersebut sebagian orang menemukannya

20 Michael T. Gibbons, *Tafsir Politik Telaah Hermeneutis.....* 119-122.

secara dangkal, sedangkan sebagian yang lain tendesius. Oleh sebab itu, untuk mengetahui esensi bahasa, maka dibutuhkan penyelidikan secara komprehensif agar makna terdalam dari suatu bahasa dapat ditemukan nantinya.

Akhir-akhir ini pemahaman lewat wacana bahasa (*language discourse*) semakin diakui penting meskipun tendensius. Terutama setelah muncul pasca-modernisme dan pasca-strukturalisme dalam kancan filsafat dan epistemologi modern. Bahasa dan praktek kebahasaan tidak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yakni sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan sosial politik²¹. Belakangan, semakin disadari betapa bahasa dalam dirinya tampil sebagai representasi dari dan ruang bagi berbagai macam kuasa. Oleh karena itu, bahasa di lihat sebagai salah satu ruang untuk berbagai konflik kepentingan, kekuatan, kuasa, proses hegemoni dan juga menjadi hegemoni tandingan.²²

21 Muhammad A.S. Hikam, Bahasa dan Politik: Penghampiran "Discursive Practice", dalam Yudi Latif dan Idy Subandy Ibrahim, *op.cit.*, 77.

22 Dalam konteks ini, pemahaman atas makna bahasa secara historis (kontemporer) bertahap dari pendekatan *epistemologi empirisme-positivisme* yang melihat bahasa sebagai alat analisis terhadap fenomena alam dan diarahkan untuk membongkar rahasia-rahasianya secara empiris, dimana pengalaman manusia diekspresikan dalam bahasa dianggap tidak memiliki kendala sejauh ia dinyatakan secara logis, sintaksis dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Hubungan antara manusia sebagai subyek dan realitas sebagai objek yang dibicarakan ditanggalkan meski kemudian dibantah oleh *Marxis-strukturalistik* (Louis Althusser), teks tidaklah dibentuk oleh subjek, tetapi subjeklah yang membentuk teks, kemudian berlanjut pada *fenomenologi* yang memahami bahasa adalah 'rumah Ada' (*language is the house of Being*) yang dimotori oleh Martin Heidegger yang menganggap bahwa kita adalah bahasa, dimana keseluruhan realitas berlangsung dalam bahasa, yang kemudian ditanggapi secara kritis oleh teori kritis Mazhab Frankfurt serta aliran pasca strukturalisme yang menemukan signifikansi politik dari upaya pembongkaran

Melihat sedemikian pentingnya, penciptaan dan pemilihan struktur bahasa sebagai upaya pelanggaran kekuasaan, maka banyak upaya yang dilakukan oleh penguasa lewat pencitraan diri atau kelompoknya melalui berbagai even seolah-olah bahasa yang mereka iklankan sudah sangat benar, tanpa perlu dibantah oleh siapapun selain oleh mereka yang berkuasa. Padahal mereka dengan lihai menancapkan dominasinya ke dalam 'ruang' gerak masyarakat melalui hegemoni bahasa yang direproduksi secara terus-menerus untuk kepentingan ideologis dan politiknya.

Bahasa apabila direproduksi secara terus menerus akan melahirkan supremasi. Sebagaimana yang selama ini terjadi di Aceh. Menjelang pemilukada misalnya, banyak intimidasi, teror dilakukan dengan menggunakan bahasa, meskipun tidak sedikit kekerasan terjadi selama pemilukada dalam bentuk fisik yang terus dilakukan oleh 'orang tak dikenal' (OTK) di hampir seluruh kabupaten kota yang sedang melakukan perhelatan demokrasi akbar tersebut.²³ Supremasi bahasa oleh kelompok tertentu

terhadap operasi-opreasi kekuasaan yang berlangsung dalam ruang-ruang tempat persemunyiannya persoalan politik substantif. Baca: Yudi Latif dan Idy Subandi Ibrahim (ed), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde baru* (Bandung: Mizan, 1996), 20-21.

- 23 Salah satu bentuk ancaman fisik menimpa tim sukses pemenangan pemilu Irwandi/ Muhyan dilakukan dengan membakar mobil Avanza BL 918 Z yang dikenderai oleh M. Saidi pada malam hari di depan rumahnya oleh OTK yang berjarak sekitar 8 meter, pada tanggal 17 Maret 2012. Sebelum pembakaran terjadi, Saidi pernah diperingatkan berulang kali oleh beberapa warga Pirak Timu, Aceh Utara. Harian 'Serambi Indonesia', *Lagi, Mobil Timses Irwandi Dibakar*, tanggal 18 Maret 2012, 1. Pada tanggal 18 Maret 2012 terjadi lagi pembakarn mobil XeniaBK 1694 JR milik Rusli Yusuf, warga desa Bintang, Kecanatab Madat, Aceh Timur, yang merupakan mobil tim sukses calon Bupati/Wakil Bupati Muslim Hasballah/Marwi Umar, mobil tersebut dibakar oleh OTK di Simpang Ulim. Harian 'Serambi Indonesia', *Lagi, Mobil Timses Muslim Dibakar*, tanggal 19 Maret 2012, 1.

dalam rangka mewujudkan diri tercermin dari bagaimana dia mendominasi. Sebab belakangan ini yang terjadi kelompok sosial yang mendominasi sekuat tenaga ‘menghancurkan’ atau ‘menundukkan’ dengan menggunakan berbagai kekuatan. Kemudian ketika kelompok sosial telah mendapatkan kekuasaan dan memimpin kelompok mereka dengan menerapkan kepemimpinan untuk memenangkan kekuasaan. Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika mempraktekkan kekuasaan, tetapi bila dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, maka dia semakin bernafsu untuk kekuasaannya. Hegemoni dengan demikian akan senantiasa berkait dengan penyusunan kekuasaan.²⁴

Fenomena demikian biasanya tercermin dari kuatnya pengaruh kepemimpinan, dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin dalam karakter konsensual. Konsensus yang terjadi antara dua kelas ini bisa diciptakan melalui cara pemaksaan maupun pengaruh secara terselubung lewat pengetahuan yang disebarakan melalui perangkat-perangkat kekuasaan.

Untuk menganalisis fenomena bahasa serta relasi politik kekuasaan yang berkembang di Aceh pasca MoU Helsinki menjadi sangat menarik bila dikaitkan dengan teori hegemoni, karena bahasa telah menjadi “kekuatan politik” dan dapat di lihat dari berbagai perspektif, seperti dalam politik ekonomi, budaya

24 Abd Malik Haramain, dkk, *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, 86.

politik, partai politik atau proses politik. Proses politik misalnya, dapat diketahui ketika seseorang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri.²⁵ Studi terhadap proses ini berfokus pada aktivitas partai politik dan kelompok kepentingan, sifat pembuatan keputusan politik, peran dan latar belakang para politisi. Kekuatan-kekuatan politik tersebut kemudian mereka konstruksikan dalam bentuk bahasa, sebab bahasa telah menjadi kekuatan tersendiri karena digunakan oleh kelompok berkuasa guna menguasai kelompok-kelompok lain, bahasa-bahasa tersebut dibungkus dalam berbagai cara agar kelompok lain tunduk tanpa berdaya.

25 Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi*,....420-421.

BAB TIGA

SETTING SOSIAL MASYARAKAT ACEH PASCA MOU HELSINKI

A. Kondisi Aceh Pasca Tsunami dan MoU Helsinki

Banyak perubahan terjadi di Aceh pasca MoU Helsinki. Perubahan tersebut pada dasarnya berawal dari dua faktor utama, pertama, gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, kedua, berakhirnya konflik berdarah dengan adanya perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. Gempa bumi yang terjadi pada tahun 2004 oleh ilmuwan dikenal sebagai ‘gempa Sumatera-Andaman’ yang tidak lama kemudian menimbulkan gelombang tsunami yang

memencar di sekitar bibir pantai Samudera Hindia. Korban jiwa akibat gelombang tsunami diperkirakan mencapai 300 ribu jiwa manusia dan sekitar 43.000 jiwa lainnya dinyatakan hilang.¹

Menurut BMKG besarnya kekuatan gempa yang berpusat dari lepas pantai Simeuleu mencapai 9 skala richter dan menimbulkan getaran paling lama berkisar 500-600 detik dengan ketebalan 1 cm. Gempa besar ini menimbulkan gelombang setinggi 30 meter dengan kecepatan 500 mil per jam menghempas pantai hingga sejauh 1-30 km ke daratan. Gempa ini telah memicu tsunami hingga ke pelabuhan Elizabeth di Afrika Selatan yang berjarak 8000 km dari Aceh. Secara keseluruhan 18 negara yang bersinggungan dengan Samudera Hindia mengalami dampaknya, negara yang paling parah adalah Indonesia karena berada dalam lingkaran *Pacific Ring of Fire*, Thailand, India, Sri Langka, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Maldives, Reunion Island, Seychelles, Madagaskar, Mauritius, Somalia, Tanzania, Kenya, Oman, Afrika Selatan, dan Australia.²

Bencana gempa dan tsunami di Aceh telah menyebabkan sekitar 230 ribu jiwa meninggal dunia, 37.000 hilang, dan sekitar 174.000 jiwa tinggal di tenda-tenda pengungsian. 120.000 rumah hancur, 800 km jalan dan 260 jembatan hilang serta rusak parah, 693 sarana kesehatan hancur, 2.224 sekolah hancur dan rusak. Kerugian diperkirakan mencapai 4,5 miliar dolar Amerika.

1 Harry Kaliwarang, *Aceh dari Iskandar Muda ke Helsinki*, Cet. Ke 3 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010). 171

2 Harry Kaliwarang, *Aceh dari Iskandar172*.

Gempa dan tsunami yang menggemparkan dunia telah menyentuh rasa kemanusiaan penduduk dunia. Sejak itu Aceh mulai dikenal oleh dunia internasional, dan berbagai persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun mulai terkuak kepermukaan. Kejadian ini mejadi pintu menuju damai bagi kedua belah pihak (RI-GAM) yang sudah cukup lama berkonflik.

Pintu menuju damai tersebut mulai tanpak terlihat ketika SBY menemui GAM untuk menghentikan konflik demi kepentingan kemanusiaan. Kesepakatan ini disetujui karena masing-masing pihak menjadi korban tsunami. Sekembalinya dari Aceh, SBY memanggil enam duta besar yang memiliki akses dengan GAM untuk memperoleh masukan agar perdamaian ini mendapat dukungan internasional. Langkah SBY dinilai cukup berani pada saat itu karena tidak sejalan dengan garis TNI yang ingin mengucilkan Aceh dari pantauan dunia internasional. Di lain pihak, negara tidak sanggup menanggulangi seluruh kerusakan insfrastruktur yang begitu parah di seluruh Aceh.

Kesepakatan mengakhiri konflik antara pemerintah Indonesia dengan pihak GAM dilakukan satu minggu setelah tsunami oleh ke dua belah pihak di Helsinki pada tanggal 2 Januari 2005 atas inisiatif mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Sementara pada minggu ke dua bulan April 2005, beberapa tokoh GAM di luar negeri kembali ke Aceh, mereka antara lain perdana Menteri GAM Malik Mahmud, Menteri Luar Negeri Zaini Abdullah, dan beberapa petinggi lainnya. Kepulangan para petinggi GAM sebagai

salah satu upaya untuk merealisasikan MoU Helsinki. Sementara Jakarta pada saat yang sama sedang sibuk menyusun draf MoU untuk diamandemenkan.³

Momentum tsunami sangat penting dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena lewat momentum inilah proses perdamaian yang didamba-dambakan oleh masyarakat Aceh terwujud. Tsunami telah menghentikan perang secara efektif, sehingga awal tahun 2005 terjadi perubahan paradigma baru di Aceh dengan kesepakatan bersama mengakhiri konflik berdarah yang telah terjadi sejak tahun 1976 silam, dan telah menelan korban harta dan jiwa begitu banyak, baik dari pihak GAM, TNI maupun masyarakat sipil. Dari serangkaian peristiwa yang memilukan tersebut sekarang masyarakat Aceh sudah merasakan sejumlah perubahan dalam berbagai bidang. Geliat tersebut mulai terlihat dari dibangunnya kembali berbagai infrastruktur yang rusak dan hancur saat konflik maupun tsunami, lahirnya partai-partai politik lokal sebagai wadah penyaluran aspirasi warga masyarakat akar rumput, penguatan kembali budaya masyarakat sebagai karakteristik daerah yang lumpuh oleh konflik yang telah mendera Aceh beberapa waktu lalu. Terhadap fenomena tersebut di atas dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut ini.

B. Pembangunan Aceh Pasca Tsunami dan MoU Helsinki

Sejak awal tahun 2005 perubahan di Aceh mulai terasa dengan adanya perubahan orientasi kedua belah pihak (TNI dan

3 Harry Kaliwarang, *Aceh dari Iskandar*, 175-176.

GAM), yaitu dari 'berperang sampai titik darah penghabisan', kepada konsep 'membangun untuk kesejahteraan masa depan'. Perubahan orientasi dari kedua belah pihak dianggap sangat tepat, karena kedua-duanya dapat memanfaatkan berbagai bantuan dunia internasional, Aceh yang porak-poranda sedikit demi sedikit mulai bangkit guna menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Pembangunan kembali Aceh pasca gempa, tsunami serta perdamaian Helsinki harus menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa. Karena menjaga damai jauh lebih penting dari menjaga bangunan fisik. Apabila damai kembali terusik, maka berbagai kemegahan yang sudah dicapai oleh Aceh akan kembali sirna. Oleh sebab itu setiap pembangunan harus memperhatikan aspek sosiologis, antropologis dan kehidupan beragama masyarakat Aceh.

Sebuah prestasi luar biasa, bahwa membangun kembali Aceh yang luluh lanta akibat gempa dan tsunami tidak membutuhkan waktu yang lama, LSM, NGO, BRR, BRA, Pemda Provinsi/kabupaten/Kota bahu membahu membangun Aceh lewat kerja sama yang baik dalam kurun waktu 2005-2009, dan dilanjutkan oleh Pemerintah Aceh pasca berakhirnya bantuan dengan dibantu oleh beberapa lembaga donor lainnya. Pembangunan yang telah dilakukan meskipun belum sepenuhnya sempurna, namun setidaknya telah menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu indikator adalah tumbuhnya pembangunan fisik secara merata di setiap sudut kota, kondisi perekonomian Aceh yang mengalami

kehancuran saat musibah terjadi, kini semakin membaik. Jumlah penduduk miskin di Aceh pasca tsunami, yakni pada tahun 2004 menurut data dari BPS Aceh mencapai 28,4 %, perlahan tapi pasti setiap tahunnya mengalami penurunan. Data tahun 2010 jumlah penduduk miskin mencapai 21 %, dan satu dekade kemudian data kemiskinan Aceh telah mengalami lompatan besar yaitu pada periode September 2021-Maret 2022, persentase penduduk miskin di Aceh turun dari 15,53 persen menjadi 14,64 persen.⁴ Angka kemiskinan provinsi Aceh meskipun setiap tahun mengalami penurunan, tetapi masih di atas rata-rata kemiskinan nasional.

Peningkatan lain yang menunjukkan trend kenaikan dalam bidang perbankan sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan dan memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di suatu daerah. Dari data Bank Indonesia menyebutkan bahwa jumlah kantor bank (kantor pusat, cabang, dll) di Aceh sampai dengan September 2011 sebanyak 394 unit, berkembang cukup pesat bila dibandingkan tahun 2006 yang hanya mencapai 226 unit. Dan sampai dengan Maret 2022, Bank Aceh saja sebagai bank plat merah pemerintah Aceh telah memiliki **537** jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 96 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 12 Mobil Kas Keliling tersebar

4 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh Maret 2022. <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/702/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-maret> 2022.html#:~:text=Selama%20periode%20September%202021%2DMaret,menjadi%2010%2C31%20persen).

dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan, 26 Payment Point, 27 Unit ATM CRM dan 232 unit ATM.⁵

Bertambahnya jumlah bank ini menunjukkan bahwa perekonomian di Aceh cukup menjanjikan, karena salah satu alasan bank membuka kantor di suatu daerah disebabkan adanya potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Penambahan jumlah bank juga diikuti oleh perkembangan jumlah aset perbankan di Aceh. Jumlah aset perbankan per September 2011 tercatat 30,3 triliun rupiah, tumbuh 14,5% bila dibandingkan 5 tahun lalu yaitu tahun 2006. Sementara pada tahun 2021, Bank Aceh mencatatkan total aset sebesar aset Rp 28,17 triliun atau tumbuh sebesar 11 persen (YoY), dana pihak ketiga tumbuh Rp 24,02 triliun atau sekitar 11,3 persen, pembiayaan tumbuh 7 persen menjadi Rp 16,35 triliun.⁶ Penambahan jumlah aset ini menandakan bisnis perbankan mengalami keuntungan setiap tahunnya, dan tentunya memiliki keterkaitan pada aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat. Peningkatan cukup signifikan dalam kinerja perbankan terjadi pada kegiatan penyaluran kredit oleh perbankan Aceh kepada masyarakat. Sampai dengan Oktober 2011, jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan Aceh mencapai Rp. 21,1 triliun, tumbuh pesat mencapai 27,94% bila dibandingkan tahun 2006 yang hanya

5 Jaringan Kantor Bank Aceh, https://www.bankaceh.co.id/?page_id=231#:~:text=Sampai%20dengan%20Maret%202022%2C%20Bank,CRM%20dan%20232%20unit%20ATM.

6 <https://www.bankaceh.co.id/?cat=10#:~:text=Pada%202021%2C%20Bank%20Aceh%20mencatatkan,menjadi%20Rp%2016%2C35%20triliun>

sebesar Rp. 5,6 triliun. Pada tahun 2022 pasca pandemi covid 19, pertumbuhan penyaluran kredit mulai mengalami peningkatan oleh perbankan di Aceh, peningkatan tersebut mulai terlihat Per triwulan satu 2022, realisasi pembiayaan Bank Aceh misalnya mencapai Rp16,39 triliun, tumbuh 6,50% secara tahunan. Sedangkan, DPK naik 8,73% menjadi Rp23,27 triliun.⁷

Tingginya jumlah kredit yang disalurkan ini menandakan geliat ekonomi Aceh semakin meningkat setiap tahunnya. Indikator lainnya selain perkembangan kinerja perbankan adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh. Berdasarkan data BPS Aceh, PDRB Aceh tanpa migas tahun 2010 (angka sementara) mencapai Rp. 64,61 triliun. PDRB ini terus berkembang dan lebih baik setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir, dimana pada 2006 hanya mencapai Rp. 43,46 triliun, dan 2007 sampai 2009 masing-masing Rp. 49,72 triliun, Rp. 54,19 triliun, dan Rp. 58,62 triliun.

PDRB Aceh atas dasar harga berlaku dengan minyak dan gas alam (migas) per 2010 mencapai Rp. 77,51 triliun, naik dari tiga tahun sebelumnya yang hanya Rp. 71,09 triliun atau tumbuh sebesar 9,03%. Sementara atas dasar harga konstan 2000, PDRB Aceh mencapai Rp. 33,07 triliun pada 2010. Peningkatan signifikan juga terjadi pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang tumbuh Rp. 64,61 triliun atau meningkat sebesar 29,95%

7 Bank Aceh Syariah Cemerlang Dalam Rating Bank 2022, <https://infobanknews.com/bank-aceh-syariah-cemerlang-dalam-rating-bank-2022/#:~:text=Berkat%20kerja%20keras%20dan%20sejumlah,%25%20menjadi%20Rp23%2C27%20triliun.>

pada 2010 dari nilai 2007 sebesar Rp. 49,72 triliun. Berikutnya PDRB Aceh atas dasar harga konstan 2000, pada 2007 sebesar Rp. 26,02 triliun dan tahun 2010 menjadi Rp. 29,04 triliun atau naik 11,61%.

Pada tahun 2018-2020 menurut data BPS Aceh PDRB Aceh terus meningkat,⁸ peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Lapangan Usaha	PDRB (Milyar Rupiah)		
	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46 365 383,16	48 438 862,87	51 545 375,58
Pertambangan dan Penggalian	7 777 316,21	7 904 805,42	7 416 185,70
Industri Pengolahan	8 117 099,60	7 777 161,58	7 593 030,35
Pengadaan Listrik dan Gas	209 518,74	225 881,13	227 463,81
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	67 666,24	84 240,00	82 246,34
Konstruksi	14 622 782,53	15 789 987,12	17 757 382,83
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24 671 449,32	25 468 961,96	24 604 117,11
Transportasi dan Pergudangan	10 326 885,72	10 589 856,41	7 648 885,29

8 PDRB, (Milyar Rupiah), 2018-2020, <https://aceh.bps.go.id/indicator/52/111/1/pdrb.html>

Penyedia Akomodasi & Makan Minum	2 502 673,94	2 775 750,13	2 646 395,47
Informasi dan Komunikasi	4 416 080,06	4 671 641,04	5 189 847,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	3 067 894,60	3 506 336,96	3 510 635,07
Real Estat	6 534 111,82	7 159 276,17	7 165 319,32
Jasa Perusahaan	988 515,80	1 065 141,28	1 058 257,88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15 764 965,25	16 831 192,86	17 076 152,94

Menurut laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir jabatan Gubernur Aceh, di Gedung DPR Aceh, Rabu 23 November 2011, bahwa keberhasilan pembangunan di Aceh juga dapat diukur dengan beberapa indikator, di antaranya dari Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir. IPM pada tahun 2007 sebesar 70,68, tahun 2010 meningkat menjadi 71,70. Badan Pusat Statistik Aceh merilis bahwa IPM di Provinsi Aceh di Aceh naik 0,19 poin dari angka 71,99 pada tahun 2020 menjadi 72,18 pada tahun 2021.⁹

Pemerintah Aceh juga mampu menekan angka butu huruf, hal ini terlihat dengan meningkatnya angka melek huruf di Aceh dari 2007 yang hanya 96,20%, pada 2010 intensitasnya naik

⁹ Indeks Pembangunan Manusia di Aceh tahun 2021 Cuma naik 0,19 poin dari tahun 2020, <https://aceh.tribunnews.com/2022/02/12/indeks-pembangunan-manusia-di-aceh-tahun-2021-cuma-naik-019-poin-dari-tahun-2020>

menjadi 96,88%. Sementara secara persentase angka buta huruf dalam lima tahun terakhir ini terus menurun, gambaran tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Prov Aceh	Persentase Penduduk Buta Huruf								
	15+			15-44			45+		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	1,79	1,75	1,76	0,06	0,07	0,06	5,74	5,53	5,32

Sumber: Pusat Statistik Provinsi Aceh 2019-2021.

Untuk usia harapan hidup pun meningkat pada tahun 2007 usia harapan hidup 68,8 tahun, 2010 sebesar 68,9 tahun, dan tahun 2021 sebesar 69,93 tahun.¹⁰ Sementara pengeluaran ril per kapita Aceh juga naik menjadi Rp. 611.420 perbulan pada 2010, dari Rp. 600.950 perbulan pada 2007. Dalam hal pendidikan, rata-rata lama sekolah tahun 2007, 8,50, pada 2010, 8,81, tahun 2020, 9,33, dan tahun 2021, 9,37.¹¹ Atau rata-rata pendidikan masyarakat Aceh telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Mengenai angka kemiskinan di Aceh, dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan grafik menurun setiap tahunnya. Tahun 2006, penduduk miskin sebanyak 1.112.061 jiwa atau 26,66%, tahun 2010 turun menjadi 1.088.368 jiwa atau 21,98%, dan menurut BPS, pada tahun 2011 diprediksi turun menjadi

10 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/12/umur-harapan-hidup-aceh-capai-6993-tahun-pada-2020>

11 <https://www.bps.go.id/indikator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>

969.353 jiwa atau 19,57%. Pada September 2021 hingga Maret 2022, persentase penduduk miskin di Aceh turun dari 15,53 persen menjadi 14,64 persen.¹² “Hal ini membuktikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh semakin baik meskipun belum semuanya maksimal.”

Sementara angka pengangguran terbuka, setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2006 sebesar 9,84% turun menjadi 8,37% pada tahun 2010, tahun 2011 turun menjadi 8,27%, dan tahun 2021 turun menjadi 6,30%.¹³ Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Aceh tercatat mampu menurunkan secara signifikan angka kematian ibu dan bayi, yang tak terlepas dari berkah pemberlakuan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Tahun 2007 angka kematian ibu turun secara signifikan dari 237/100.000 lahir hidup menjadi 184/100.000 lahir hidup pada tahun 2010.

Periode 2017-2021 Angka Kematian Ibu melahirkan di Aceh menunjukkan tren fluktuatif. Angka Kematian Ibu melahirkan di Aceh tahun 2021 ini masuk dalam kategori Sangat Kurang. Angka Kematian Ibu melahirkan terus mengalami pergerakan tidak seperti yang ditargetkan terutama dalam 4 tahun terakhir angka tersebut cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pergerakan yang fluktuatif

12 <http://humas.acehprov.go.id/angka-kemiskinan-aceh-berangsur-turun/#:~:text=Penilaian%20Ahmad%20Dadek%20itu%20menanggapi,atau%20turun%20sebesar%200%2C89>

13 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/tingkat-pengangguran-terbuka-di-aceh-menurun-pada-agustus-2021>

tersebut mulai pada tahun 2017 berada diangka 143/100.000 LH dan pada tahun 2018 turun menjadi 138/100.000 LH. Pada tahun 2019 Angka kematian ibu melahirkan di Aceh kembali mengalami peningkatan 172/100.000 LH dan kondisi yang sama kembali terjadi ditahun 2020 yaitu 172/100.000 LH, dan terus meningkat di tahun 2021 dengan jumlah 223/100.000 LH.¹⁴

Sementara angka kematian bayi juga sama, dari 35/1000 lahir hidup pada 2007 turun menjadi 25/1000 lahir hidup 2010. “Penurunan angka kematian bayi terjadi karena Pemerintah telah fokus memprogramkan beberapa kegiatan seperti Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jampersal (Jaminan Persalinan Universal), BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh).” Mengenai status gizi masyarakat yang diindikasikan melalui prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita juga mengalami penurunan dari 48,6% tahun 2007 menjadi 21,9% tahun 2010.¹⁵ Angka kematian bayi di Aceh sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuasi, dimana pada tahun 2017 dan 2018 berada diangka 10/1.000 LH dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 9/1.000 LH. Memasuki tahun 2020 kondisi tersebut kembali berubah dimana AKB di Aceh kembali naik diangka 10/1.000LH dan terus meningkat di tahun 2021 diangka 11/1.000LH.¹⁶

14 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021, https://dinkes.acehprov.go.id/uploads/lkj_dinkes_20211.pdf

15 ‘Melirik Geliat Pembangunan Aceh’, *Seuramou Irwandi*, Akses tanggal 13 Juni 2012.

16 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan,.....2021.

Melihat data perkembangan tersebut di atas tentunya cukup menggembirakan kita semua, namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh, seperti jumlah pengangguran terbuka di Aceh yang masih tinggi. Selain itu jumlah ekspor Aceh sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan terbilang masih kecil. Berdasarkan data Bank Indonesia per Oktober 2011 nilai ekspor Aceh tanpa migas baru sebesar US \$ 80 juta, turun bila dibandingkan tahun 2008 yang mencapai US\$ 163 juta. Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Desember 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan November 2020, nilai ekspor Provinsi Aceh sebesar USD32.969.996 atau mengalami peningkatan 40,61%.¹⁷ Rendahnya nilai ekspor Aceh bila dibandingkan dari provinsi-provinsi lain harus menjadi perhatian semua mengingat ekspor migas yang semakin menurun seiring dengan berkurangnya ketersediaan cadangan migas di Aceh.¹⁸

Ketersediaan sarana infrastruktur juga menjadi catatan penting yang harus diperhatikan. Menurut kepala Bapeda Aceh, bahwa pembangunan Infrastruktur (jalan, pelabuhan, irigasi, dan sarana mendasar lainnya) tetap menjadi prioritas utama, karena infrastruktur merupakan kebutuhan paling mendasar

17 <https://acehprov.go.id/berita/kategori/statistik/nilai-ekspor-aceh-meningkat-40-61>persen#:~:text=Kepala%20BPS%20Aceh%20Ihsanurijal%20dalam,mengalami%20peningkatan%2040%2C61%25.

18 Teuku Munandar, "7 Tahun Pasca Tsunami, Bangkitlah Atjeh", dalam *Kompasiana.com*, Akses Tanggal 13 Juni 2012.

bagi masyarakat banyak. Negara-negara yang saat ini menjadi negara maju karena para pendiri negaranya telah membangun suatu fondasi yang sangat kuat secara berkesinambungan dari generasi ke generasi termasuk dalam hal identitas berbangsa dan bernegara. “Identitas dalam berbangsa dan bernegara ini telah menjadi spirit kolektif yang mendorong para penyelenggara negara untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, termasuk dalam hal penyediaan infrastruktur dasar bagi rakyatnya.¹⁹

Sektor lainnya yang tetap harus di jaga dan ditingkatkan adalah mengurangi kebocoran anggaran dinas/badan di semua level pemerintahan di Aceh, dan ini sangat berbahaya bagi kelanjutan pembangunan Aceh ke depan, sebab survey-survey yang dilakukan provinsi Aceh selalu masuk 10 besar provinsi terkorup. Hasil ini tentu saja menjadi tamparan bagi pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat Aceh.²⁰ Kemudian, kondisi keamanan yang telah kondusif pasca MoU antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki harus tetap dipelihara, karena hal ini menjadi prasyarat utama dan dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi daerah. Sudah menjadi hal yang pasti apabila keamanan suatu daerah menjadi faktor pertimbangan bagi investor/pengusaha yang akan berinvestasi/berbisnis di suatu daerah.

Dari banyaknya hal yang perlu diperhatikan tentu saja bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda Aceh untuk

19 Iskandar, “Infrastruktur Berkualitas Tingkatkan Peradaban Bangsa”, dalam, *Tabloit Tabangun Aceh*, Edisi September 2011, 13.

20 “Fitra: Aceh Terkorup Kedua”, dalam, *Serambi Indonesia*, 2 Oktober 2012

menyelesaikannya. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat di Aceh dan juga Pemerintah Pusat untuk bersama-sama membangun Aceh yang pernah terpuruk baik dikarenakan konflik keamanan yang berkepanjangan maupun oleh gempa dan tsunami yang maha dahsyat beberapa waktu silam, tepatnya pada tanggal 26 Desember tahun 2004.

C. Lahirnya Partai Lokal

Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa di Aceh akan lahir partai lokal sebagai partai independen yang tidak pernah ada di provinsi manapun di Indonesia. Keberadaan partai-partai tertuang dalam UUPA Nomor 11 tahun 2006, yang didalamnya lebih 20 pasal memuat tentang pembentukan partai lokal. Turunan dari UUPA disahkan PP Nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal.²¹ Dengan disahkan partai politik lokal (Parlok), maka palok tumbuh di Aceh bagai jamur di musim hujan. Lahirnya parlok merupakan salah satu perwujudan dari MoU Helsinki, sementara persoalan lain seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), pengadilan HAM belum berjalan maksimal sampai hari ini.

Partai-partai lokal yang lahir pasca MoU Helsinki di Aceh berjumlah 20 partai, namun yang mendaftarkan diri ke kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh hanya 14 parpol. Dari 14 partai yang mendaftar, melalui hasil verifikasi kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya 12

21 Harry Kaliwarang, *Aceh dari Iskandar*, 183.

parpol yang dinyatakan lolos. Di antara partai-partai yang lolos tersebut antara lain:

1. Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA)
2. Partai Darussalam
3. Partai Lokal Aceh
4. Partai Aceh Meudaulat
5. Partai Aceh
6. Partai Pemersatu Muslim Aceh
7. Partai Rakyat Aceh
8. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa
9. Partai Aceh Aman Seujahtera
10. Partai Bersatu Atjeh
11. Partai Suara Independen Rakyat Aceh
12. Partai Daulat Aceh²²

Dari 12 partai tersebut, Komite Independen Pemilihan (KIP) pada tanggal 28 Juni 2008, menetapkan 10 parlok yang lolos verifikasi administrasi. Partai-partai tersebut antara lain adalah:

1. Partai Geuneurasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabhtat)
2. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
3. Partai Rakyat Aceh (PRA)
4. Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA)

22 Harry Kaliwarang, *Aceh dari Iskandar*,185.

5. Partai Daulat Aceh (PDA)
6. Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)
7. Partai Bersatu Aceh (PBA)
8. Partai Darussalam (PD)
9. Partai Lokal Aceh (PLA)
10. Partai Aceh (PA)

Keikutsertaan partai lokal di Aceh dalam Pemilu 2009 pertama kali dalam sejarah Indonesia, dan ini merupakan cerminan dari upaya pengimplementasian komitmen perjanjian Helsinki antara pemerintah RI-GAM. Partai lokal dianggap menjadi wadah transformasi politik mantan anggota GAM dari perjuangan bersenjata ke politik. Belakangan, tidak hanya kalangan mantan GAM yang membentuk partai lokal. Tapi juga kalangan aktivis, politisi, serta siapa pun yang berminat dan memenuhi syarat sebagai perwujudan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Para pendiri partai sangat optimis partainya dapat menarik perhatian masyarakat serta mampu meraih kursi di parlemen. Karena selama ini masyarakat sudah banyak dikecewakan oleh janji-janji dari partai nasional. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh (PRA), Thamrin Ananda, partai nasional sejak Indonesia Merdeka sudah ada di Aceh. Tapi cita-cita rakyat Aceh untuk menentukan sebuah perubahan, *vote for change* itu tidak terjadi". Thamrin malah memprediksikan bahwa kekuatan partai

lokal dengan partai nasional di Pemilu 2009 perbandingannya 70 dibanding 30. “Itu artinya, kans parlok 70 dan parnas 30. Suara 70 persen akan dibagi 10 partai lokal. Sedangkan 30 persen lainnya akan dibagi oleh partai nasional”. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Menurut Thamrin, kalkulasi kans parlok di pemilu itu lebih didasari atas kondisi sosio politik dimana masyarakat Aceh masih kental dengan fanatisme kedaerahan. “Rakyat Aceh lebih cenderung memilih dan mencoba sesuatu yang baru. Dengan kata lain kecenderungan *vote for try* (mencoba memilih yang baru) itu masih tetap ada.

Prediksi kemenangan parlok di Aceh memang benar terjadi pada pemilu 2009, meskipun parlok dan bakal calon yang akan duduk di parlemen belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, tetapi masyarakat tetap yakin bahwa aspirasi mereka akan terwakili oleh bakal calon (balon) yang diusung oleh parlok, ketimbang oleh balon yang diusung oleh parnas. Keberhasilan parlok untuk merebut hati pemilih terbukti di Aceh, melalui pemilukada tahun 2009 hampir 70 persen kursi di parlemen dapat mereka kuasai mulai tingkat Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota di seluruh Aceh. Dan untuk pemilukada tahun 2012 Gubernur dan Wakil Gubernur (Zaini Abdullah/Muzakir Manaf) yang terpilih adalah mereka yang berasal dari parlok.

Pasca MoU Helsinki, partai lokal di Aceh sudah menjadi barometer baru bagi masyarakat Aceh. Fenomena ini terbukti dari banyaknya parlok yang lahir pasca MoU dan banyaknya

suara untuk parlok. Untuk tahun 2012 Kakanwilcumham Aceh telah menverifikasikan tiga partai lokal di Aceh, masing-masing, Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai SIRA Perjuangan. Dari tiga partai tersebut menurut Kakanwilcumham Dr. Yatiman Eddy, SH, M Hum, hanya Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA) yang sudah lulus verifikasi administrasi. Sedangkan Partai SIRA Perjuangan dinyatakan tidak lulus verifikasi administrasi karena data kepengurusan tingkat Kabupaten dan Kecamatan tidak lengkap. Oleh karena itu tim Kakanwilcumham juga perlu melakukan verifikasi faktual ke DPD seluruh kabupaten/kota pada tanggal 11-12 Juni 2012 dan ke DPC pada tanggal 3-7 Juli 2012 agar data yang diperoleh nantinya benar-benar valid.²³ Pada tanggal 9 Juli 2012 Kakanwilcumham Aceh menyatakan bahwa parlok PNA dan PDA sudah sah menjadi parlok baru di Aceh, dan SK penetapan kedua parlok sudah ditandatangani pada tanggal tersebut di atas. Karena kedua parlok dinyatakan lulus verifikasi sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 dan PP Nomor 20 tahun 2007 tentang parlok, sebab menurut syarat yang ditetapkan bahwa setiap parlok harus lulus verifikasi minimal memiliki 50 persen pengurus di Kabupaten/kota. Sedangkan tingkat DPC minimal harus memiliki 25 persen pengurus, kedua parlok tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kanwilcumham.²⁴ Kehadiran dua parlok baru di Aceh akan

23 www.berita.satu.com, diakses tanggal 18 Juni 2012.

24 "PNA dan PDA Sah Jadi Parlok", dalam, *Serambi Indonesia*, 21 Juli 2012.

menambah ruang gerak masyarakat dalam menyalurkan aspirasi melalui parlok nantinya.

D. Perkembangan Pranata Adat Aceh

Bagi masyarakat Aceh, penegasan tentang pelaksanaan adat melalui Undang-undang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru, meskipun pemerintah melalui Qanun Nomor 10 tahun 2008 telah mengatur tentang pelaksanaan adat di Aceh. Masyarakat Aceh dalam sejarahnya sudah menjalankan adat istiadat dari abad ke abad, karena adat dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem yang mengikat dan dipelihara dengan baik sebagai suatu norma yang telah ditetapkan bersama.

Adat istiadat yang sering disingkat menjadi adat merupakan wujud nyata dari suatu sistem kebudayaan. Adat merupakan suatu ide atau gagasan yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat serta menjiwai dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Ide-ide atau gagasan merupakan satu kesatuan, yang satu tidak bisa lepas dari yang lainnya, selalu menjadi suatu sistem yang saling berinteraksi.²⁵

Menurut Soejono Soekanto,²⁶ dalam *Kamus Adat*. Adat merupakan suatu kebiasaan, baik kebiasaan yang dianggap baik maupun buruk. Sementara Muhammad Soekanto mengartikan adat sebagai kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan

25 Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1983), 149.

26 Soejono Soekanto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1978), 10.

dihargai, lebih lanjut juga harus ditaati.²⁷ Ruang lingkup adat istiadat dengan demikian sangat luas dan merupakan kumpulan peraturan-peraturan, norma-norma, dan petunjuk-petunjuk yang tertulis dan tidak tertulis, yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka memelihara hubungan antara manusia dengan alam. Adat istiadat juga mengatur tentang tindak-tanduk antara manusia dengan manusia dalam masyarakat, sehingga tercapai masyarakat yang harmonis. Begitu juga adat istiadat mengatur terjadinya hubungan keharmonisan yang vertikal, yaitu berupa hubungan antara mikrokosmos dengan makrokosmos.²⁸

Adat istiadat dalam masyarakat Aceh berupa seperangkat nilai dan kaidah kepercayaan sosial yang tumbuh dalam masyarakat Aceh, sehingga adat bagi masyarakat Aceh sesuatu yang mempunyai nilai lebih, hal ini tercermin dari Hadih Maja:

Adat bak po teumereuhom,

Hukom bak Syiah Kuala,

Qanun bak Putroe Phang,

Reusam bak Laksamana,

Hukom ngon adat lagee zat ngon sipheut

(Adat menjadi tanggung jawab pemerintah

Hukum menjadi tanggung jawab ulama

Qanun berada ditangan Putri Phang (permaisuri Sultan)

27 Muhammad Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1978), 14.

28 O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988) 31.

Reusam berada ditangan Laksamana

Adat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, bagaikan zat dengan sifat)

Adat merupakan aturan yang diputuskan oleh sultan agar roda pemerintahan tetap jalan, adat seperti itu disebut adat mahkota. Sementara kewajiban menjalankan adat biasanya tergantung kepada kepala adat yang ada di masing-masing daerah. Sedangkan hukum yang dimaksud adalah hukum Islam, atau perkara pengadilan yang difatwakan oleh ulama berdasarkan ajaran Islam, adat seperti ini dinamakan adat tunah. Kemudian pengaturan tata cara kehidupan sehari-hari seperti dalam perkawinan, atau tata cara dalam berbusana, serta kegiatan wanita lainnya, disebut dengan adat mahkamah. Terakhir reusam identik dengan kegiatan penyambutan pengantin baru, upacara penyambutan tamu agung, upacara pergi ke laut, pergi ke hutan, atau turun ke sawah. Keempat unsur tersebut tidak boleh terpisah satu sama lain, artinya adat tidak boleh bertentangan dengan hukum agama Islam, demikian juga dengan qanun dan reusam. Keempat sumber tersebut dalam masyarakat Aceh berjalan dengan baik, sekaligus dijadikan landasan hidup bagi masyarakat Aceh.²⁹

Kehidupan adat yang sudah sangat baik di Aceh dalam beberapa dekade terakhir ini sudah mengalami banyak pergeseran, bahkan banyak di antara masyarakat yang sudah meninggalkan adat dan budayanya sendiri seiring masuknya budaya luar. Pemerintah

29 A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 108-109.

Aceh melalui amanah UUPA tahun 2006 berupaya menghidupkan kembali lembaga adat secara optimal seperti menghidupkan peran Mukim, Gampong, dan Tuha Peuet sebagai elemen yang sudah terbukti mampu menghidupkan peran adat dan menjaga kelangsungan adat dalam masyarakat sebagaimana pada masa jayanya kerajaan-kerajaan Aceh, maupun pada awal kemerdekaan Indonesia. Penjelasan tentang peran mukim, gampong dan tuha peut sebagai pranata adat masyarakat akan dijelaskan berikut ini:

1. Mukim

Mukim³⁰ adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong (desa) yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah sagoe cut (kecamatan). Dalam masyarakat Aceh, lembaga mukim sudah terbentuk pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).³¹ Lembaga Mukim pada mulanya merupakan sarana penyelenggara kehidupan beragama yang dilaksanakan oleh Imuem Mukim dalam beberapa gampong. Untuk menandakan kemukiman maka didirikan satu mesjid besar sebagai tempat menjalankan ibadah shalat jum'at berjamaah, ajang untuk bersilaturrehmi dan tempat bermusyawarah warga dari seluruh gampong dalam wilayah kemukiman.

30 Kata Mukim berasal dari bahasa Arab berarti “kedudukan pada suatu tempat” oleh orang Aceh diterjemahkan sebagai suatu wilayah tempat menetapnya beberapa gampong. Istilah ini berkaitan erat dengan keyakinan orang Aceh yaitu agama.

31 T. Syamsuddin, *Pasang Surut Kebudayaan Aceh Dalam Bunga Rampai* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1992), 97-98.

Imuem Mukim semula sebagai pemimpin agama, karena banyaknya persoalan yang terjadi di gampong, maka posisi Imuem Mukim bergeser kepada pelaksana pemerintahan di wilayah kemukiman. Dengan berubahnya posisi Imuem Mukim, maka namanya-pun dengan sendirinya berubah menjadi kepala Mukim. Mukim secara legetimasi diakui oleh masyarakat gampong di Aceh. Dan untuk mengangkat Imuem Mukim biasanya dipilih langsung oleh para keuchik (kepala desa) gampong dalam wilayah kemukiman.³²

Menurut catatan sejarah antara *keuchik* dengan *ulebalang*³³ terdapat kedudukan para Imeum Mukim yang mengepalai wilayah kemukiman, sehingga mempunyai suatu ciri khas tersendiri bagi masyarakat di provinsi Aceh, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Hal itu disebabkan karena dalam susunan pemerintahan kerajaan Aceh masa lalu, tepatnya pada masa kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Nurul Alam Safiatuddin (1675-1678), dikenal ada empat unsur pokok dalam struktur pemerintahan yang berada di bawah sultan yaitu panglima *sagoe*³⁴ yang membawahi beberapa daerah *ulebalang*.

32 Mukhsin, 'Penataan Kembali Lembaga Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000', *Tesis Politik Lokal dan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003), 13.

33 *Ulebalang* adalah kepala atau panglima balatentara yang menunjukkan bahwa dalam peperangan ia harus bertindak sebagai pemimpin pasukan-pasukan bersenjata didalam Daerah gabungan mukimnya, lihat Van Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa kesultanan* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1986), 13.

Ulebalang mengkoordinir beberapa Mukim, sementara Mukim membawahi beberapa gampong yang dipimpin oleh keuchik.

Munculnya lembaga Mukim tidak terlepas dari pengaruh kaum ulama dan tokoh-tokoh agama. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kedudukan pemerintahan Mukim bahkan semakin diperkuat oleh *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*.³⁵ Dan Mukim menjadi bagian yang sangat penting dalam masyarakat. Seorang Imeum Mukim merupakan orang yang diikuti dan dipatuhi oleh masyarakatnya karena Mukim menjadi orang yang mengobarkan semangat perang menantang penjajahan. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, lembaga pemerintahan Mukim ini tetap dipertahankan, hanya pemerintahan *sagoe* yang pengaruhnya semakin berkurang, bahkan hampir tidak disebut-sebut pada masa pendudukan Jepang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, struktur pemerintahan Mukim ini tidak mengalami perubahan sejak zaman pemerintahan Aceh, masa pemerintahan Hindia Belanda, hingga zaman pendudukan Jepang. Setelah Republik Indonesia merdeka, lembaga Mukim tetap dipertahankan dalam struktur pemerintahan desa di Aceh. Bahkan lembaga ini diformalkan sebagai lembaga resmi dalam struktur pemerintahan desa di Aceh, hal ini terbukti dengan dikeluarkan Peraturan Keresiden Aceh Nomor 2 dan 3 tahun 1946, yang kemudian diganti keputusan Gubernur Aceh Nomor 31/GA/ tahun 1946. Setelah diformalkan

35 S. Sastrodiningrat, *Perilaku Administrasi* (Jakarta: Karunika, 1986), 42.

sebagai suatu unit tersendiri dalam hirarkhi pemerintahan desa di Aceh, eksistensi Imeum Mukim semakin kuat dalam pengertian yuridis formal, yang kedudukannya berada di bawah Camat yang berfungsi mengkoordinasikan beberapa gampong (desa).

Keberadaan lembaga Mukim dan lembaga pemerintahan formal lainnya di Aceh mati suri ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada saat itu banyak lembaga mukim yang pada masa-masa sebelumnya merupakan kesatuan dari gampong menjadi tidak jelas statusnya dalam struktur pemerintahan desa yang baru.

Meskipun Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tidak mengatur secara jelas tentang keberadaan lembaga pemerintahan Mukim, dalam kenyataannya pengaruh dan peranan lembaga kemukiman masih sangat terasa bahkan masih dibutuhkan seperti dalam setiap rapat-rapat gampong, Imeum Mukim masih tetap diikuti sertakan dalam setiap pengabilan keputusan.

Lembaga Mukim menjadi kebutuhan masyarakat umum di Aceh. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda) Istimewa Aceh Nomor 2 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat, Imeum Mukim tetap sebagai koordinator Keuchik dan kepala kelurahan dan lembaga-lembaga adat di Aceh, termasuk ikut menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang timbul di wilayah kemukiman yang dipimpinnya.

Menurut Mawardi, lembaga Mukim yang ada di seluruh Aceh bagus kalau difungsikan kembali secara adat, namun yang disayangkan lembaga mukim belum berfungsi dengan baik, sebagai bukti banyak permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kemukiman atau gampong, tetapi Camat masih sering turun ke kemukiman dan gampong untuk menjebatani banyak permasalahan yang ada.³⁶

Lembaga Mukim yang dipimpin oleh Imeum Mukim biasanya sangat berwibawa. Oleh karena itu keberadaan lembaga Mukim dapat meningkatkan kemampuan Keuchik dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan gampong dapat berhasil dengan baik. Lembaga Mukim sampai sekarang masih dibutuhkan oleh masyarakat di Aceh. Sebagai bukti lembaga yang semula pada tahun 1946 sebanyak 303, tahun 1989 berjumlah 540, tahun 1996 berjumlah 591, dan sampai tahun 2003 berjumlah 648 buah di seluruh Aceh.³⁷ Peningkatan lembaga ini bukan saja karena legitimasinya yang datang dari rakyat, tetapi keberadaannya selama berabad-abad perlu dijaga keberadaannya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat di Aceh.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka fungsi lembaga mukim dalam masyarakat di Aceh sesuai pasal 4 qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 adalah:

36 Wawancara dengan Imuem Mukim Lamblang Cot Ke ueng, tanggal 29 Agustus 2012.

37 BPM Provinsi NAD tahun 2003.

1. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya.
2. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik, maupun pembangunan mental spritual.
3. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan syariat Islam, pendidikan, peradatan, sosial, budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.³⁸

Berdasarkan fungsi di atas, maka lembaga Mukim sebagai perangkat dalam tata pemerintahan di Provinsi Aceh berlandaskan payung hukum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 44 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, serta Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim di provinsi Aceh. Dengan adanya Undang-undang tersebut pemberdayaan kembali lembaga Mukim perlu memperhatikan

38 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek kehidupan beragama sehingga dalam pelaksanaan di dalam masyarakat akan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pembangunan masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat pengalaman masa lalu dengan Undang-undang sebelumnya bukan saja memberi manfaat bagi kehidupan sosial dan pemerintahan di Aceh, malah sebaliknya yaitu menghilangkan nilai-nilai adat dan sosial masyarakat serta mematikan kreativitas masyarakat.

2. Gampong

Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Gampong berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh keuchik.³⁹

Gampong dalam susunan pemerintahan Aceh dahulu merupakan tingkat pemerintahan paling bawah dan memiliki hak otonomi yang disebut pemerintahan gampong. Sebagai wilayah otonomi paling bawah, gampong adalah sebuah daerah hukum yang diakui oleh kerajaan. Kedudukan gampong dalam pemerintahan kerajaan Aceh saat itu dapat disamakan dengan desa di Jawa, dusun di Sumatera Selatan, atau huta di Batak, dan kampung di daerah-daerah Melayu.⁴⁰

39 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

40 Nab Bahany As, dkk, *Menuju Kemandirian Gampong* (Banda Aceh: Pugar, 2009), 1.

Terbentuknya gampong di Aceh tidak jauh berbeda dengan terbentuknya desa-desa di daerah lain di Indonesia. Menurut sejarah, terbentuknya gampong di Aceh disebabkan oleh adanya perkumpulan orang dalam mengembangkan perekonomian sehari-hari. Daerah-daerah baru yang dihuni oleh sejumlah orang di sebut seunubok. Seunubok adalah sebuah areal ladang perkebunan yang baru dibuka oleh sejumlah orang yang berasal dari gampong yang sudah padat penduduknya. Seunubok bisa dibuka oleh seseorang atau kelompok orang untuk bercocok tanam. Ketika seunubok dalam perkembangannya sudah mulai ramai didiami oleh orang dan dianggap sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk dijadikan sebuah gampong, maka seunubok ini dapat berubah menjadi sebuah gampong di Aceh.⁴¹

Menurut Kamaruddin Andaloh,⁴² gampong merupakan suatu komunitas sosial masyarakat yang berbentuk teritorial. Pada awalnya gampong sebagai proses perkembangan sekelompok masyarakat dari perkumpulan keluarga yang mendiami suatu wilayah, dan sering bersifat satu keturunan yang dipimpin oleh ketua yang diangkat bersama, kemudian berkembang menjadi gampong. Gampong memiliki keunikan secara langsung bagi masyarakat Aceh. Pada masa kerajaan dulu gampong berperan besar dalam mendorong pembangunan, masing-masing gampong memiliki entitas sosial politik, di sinilah warga

41 Nab Bahany As, dkk, *Menuju Kemandirian....*, 2-5.

42 Kamaruddin Andaloh, *Model Pengaturan Pemerintah Gampong dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), 80.

masyarakat membahas berbagai kebijakan, mengatur sistem pemerintahan dan mengelola konflik secara bersama-sama. Segala keputusan diambil lewat proses musyawarah sebelum dijadikan sebagai sebuah keputusan bersama. Sistem ini lahir secara turun-temurun dan menjadi sebuah gambaran tentang sistem demokrasi yang berjalan secara utuh dan alami di bumi Aceh.⁴³

Ciri khusus dari sebuah gampong ditandai dengan adanya sekelompok rumah penduduk yang tersusun secara berderetan dengan halaman yang luas dan dibatasi dengan pagar. Biasanya penduduk dalam suatu gampong mempunyai hubungan kekerabatan. Dalam gampong juga terdapat *meunasah*⁴⁴ yang berfungsi sebagai tempat beribadah warga yang tinggal di sekitar gampong tersebut, kemudian sebagai tempat untuk bersilaturahmi, bermusyawarah, kenduri, dan tempat untuk melakukan ceramah agama.⁴⁵

Lingkungan gampong merupakan salah satu unsur yang diperhitungkan dalam berbagai kegiatan, di antaranya gotong royong, saling tolong menolong.⁴⁶ Masyarakat gampong juga

43 Ahmady Meuraxa, 'Wajah Aceh Adalah Gampong', dalam, *Suara Aceh Untuk Kemandirian Gampong* (Banda Aceh: Impact, 2009), iv.

44 Meunasah adalah pusat kegiatan masyarakat Gampong yang juga berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat bermusyawarah, tempat pendidikan agama, tempat anak-anak muda berkumpul dan sebagainya.

45 Rusdi Sufi, dkk, *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998), 9-10.

46 Edy Nur Ilyas, *Keberadaan Desa dan Mukim pada Zaman Kerajaan Aceh, Zaman Penjajahan dan Zaman Kemerdekaan di Aceh Besar* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1996), 27.

biasanya sangat terikat dengan sistem sosial. Sistem ini sangat terkait dengan mata pencaharian mereka sehari-hari. Gampong dipimpin oleh seorang keuchik sebagai orang yang dituakan dalam gampong, keuchik disamping memegang urusan adat juga mengurus tata pemerintahan gampong. Keuchik biasanya dibantu oleh Imuem meunasah, yang memegang urusan keagamaan. Dan dibantu oleh *Tuha Peuet* sebagai tempat untuk meminta nasehat, saran, dan memutuskan perkara dalam gampong. Kemudian dibantu oleh beberapa elemen fungsional lainnya seperti *keujruen blang*. Institusi ini setiap panen padi di sawah akan mendapatkan sumber pemasukan dari petani penggarap sawah yang disebut sebagai *bruek umong* (hak sewa/hak adat) dengan jumlah menurut luas sawah yang digarap oleh setiap warga gampong. Dan *panglima laot* sebagai institusi yang mengatur adat untuk para nelayan, dan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat.⁴⁷ Dari bentuk pemerintahan gampong seperti di atas meskipun terkesan tradisional, sebenarnya telah memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan gampong itu sudah sangat mandiri, yaitu dengan menjalankan sistem hukum adat mereka dapat menyelenggarakan bentuk pemerintahan gampong secara mandiri.

Gampong dalam masyarakat Aceh mempunyai fungsi startegis, fungsi tersebut tidak saja terlihat pada masa damai, pada masa

47 Yusuf Kuahaty, *Perubahan Struktur Gampong dan Implikasinya: Studi di Empat Gampong Kecamatan Suka Jaya*, Kota Madya Sabang (Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1983), 14.

konflik-pun peran tersebut tetap terlihat secara nyata, yaitu melalui sejumlah perangkat adat yang ada dalam masyarakat gampong seperti fungsi tuha peut, imum meunasah, keujreun blang, dan perangkat adat lainnya. Untuk penegakan kembali fungsi peran gampong, tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan meskipun pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 telah membuka sejumlah peluang bagi kemandirian pemerintahan gampong kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat 2, bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat dapat ditempuh melalui lembaga adat yang telah dilegalkan dalam Undang-undang. Lembaga adat yang dilegalkan tersebut meliputi “majelis adat Aceh, Imuem Mukim, Imuem Chik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Pawang Gle, Peutua Seunubok, Urou Peukan, dan Syahbandar”.⁴⁸

Perangkat-perangkat adat gampong seperti di atas sekarang semakin kuat dengan adanya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dalam qanun tersebut semua perangkat adat sudah jelas peran dan fungsinya masing-masing.

3. Tuha Peuet

Tuha Peuet adalah suatu lembaga/majelis yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, cerdik pandai yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat,

48 Nab Bahany As, dkk, *Menuju Kemandirian....*, 22.

membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong.⁴⁹

Tuha Peuet (dewan empat) pada masa kesultananan di Aceh merupakan sebuah lembaga adat yang berperan membantu program kerja pemerintahan. *Tuha Peuet* juga mempunyai tugas membantu *ulebalang* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pada masa Orde Baru keberadaan *Tuha Peuet* ditiadakan dalam sistem pemerintahan gampong di Aceh. Maka seiring otonomi khusus keberadaan lembaga ini kembali difungsikan dalam kehidupan masyarakat, karena keberadaan lembaga *Tuha Peuet* sangat membantu masyarakat dalam berbagai hal di Aceh.

Menurut adat, *Tuha Peuet* mempunyai andil besar dalam pemerintahan suatu wilayah, bersama *ulebalang*, lembaga ini merupakan sejenis dewan yang mempertimbangkan dan mengurus kepentingan-kepentingan dalam suatu wilayah. Semua perkara yang menyangkut pemerintahan, peradilan atau kemiliteran harus dibicarakan dengan *tuha peuet* sebelum diambil suatu keputusan.

Ulebalang dalam hal apapun harus bertindak menurut pendapat *tuha peuet*. Salah satu fungsi dewan *tuha peuet* yang terpenting adalah dibidang peradilan. Dalam hal ini *ulebalang* bertindak sebagai hakim dan qadhi, sementara *tuha peuet* sebagai penasehatnya. Sebagai contoh jika seorang *ulebalang*

49 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

meninggal atau karena ada sesuatu hal sehingga dia tidak sanggup untuk menjalankan tugasnya, maka kewajiban *tuha peuet* setelah bermusyawarah adalah menunjuk seseorang untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh *ulebalang* dan apabila setelah bermusyawarah tidak ada yang cocok untuk memangku jabatan, maka untuk sementara jabatan tersebut dipangku oleh *tuha peuet*.

Menurut K.F.H van Langen,⁵⁰ jabatan *Tuha Peuet* di Aceh sama seperti jabatan *ulebalang* pada masa dulu yaitu diwariskan secara turun-temurun, apabila salah seorang dari *Tuha Peuet* meninggal dunia maka *ulebalang* setelah bermusyawarah dengan ketiga pejabat *Tuha Peuet* akan mengangkat anaknya untuk menggantikan ayahnya sebagai *Tuha Peuet*.

Pada saat sekarang *Tuha Peuet* tidak lagi diwariskan secara turun-temurun, tetapi *Tuha Peuet* dipilih oleh masyarakat dalam suatu kampung. Orang yang dipilih adalah orang dianggap sebagai *ureung Tuha* (orang tua), yaitu *tuha* yang memiliki persyaratan-persyaratan umum seperti *tuha tuho* (orang mengerti adat dan agama) *tuha turidroe* (orang mengerti tentang kematangan dirinya; berwibawa dan tahu siapa dirinya); *tuha peuproe* (orang yang mempunyai kecakapan dan kebijaksanaan sebagai juru damai dalam perselisihan yang terjadi diantara warga) dan *tuha gaseh keu agama ngon keu nanggroe* (orang yang mencintai agama dan negara melebihi dari mencintai dirinya sendiri).

50 K.F.H van Langen, *Lembaga-lembaga Tradisional di Aceh*, Terjemahan, Aboe Bakar (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2003), 7-13.

Sementara dalam penyelenggaraan pemerintah adat gampong kekuasaan legeslatif sebagai lembaga demokrasi diakumulasikan dalam lembaga *Tuha Peuet* gampong. Lembaga ini merupakan representasi dari seluruh warga gampong yang berfungsi: (1) Mendorong dan memelihara upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam dan hukum adat dalam masyarakat. (2) Mengayomi, memelihara dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di gampong guna menunjang kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. (3) Bersama pemerintahan gampong menetapkan reusam gampong. (4) Membahas, merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong. (5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Keuchik.

Meskipun demikian *Tuha Peuet* merupakan cerminan dari masyarakat gampong. Dalam pemerintahan tradisional Aceh, lembaga *Tuha Peuet* bukan hanya berada pada tingkat gampong, tetapi juga ada pada lembaga Mukim, maupun pemerintahan Nanggroe.⁵¹

Lembaga-lembaga tersebut di atas pada saat sekarang sangat strategis dijalankan dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat pada level paling bawah serta mendukung pembangunan secara menyeluruh

51 Kamaruddin Andaloh, *Model Pengaturan Pemerintah.....* 92-93.

berkelanjutan dengan harapan Aceh ke depan lebih maju dan bermartabat, dan hal ini sudah pernah diperlihatkan oleh idatu kita pada beberapa abad silam.

BAB EMPAT

BAHASA-BAHASA HEGEMONIK

A. Ragam Istilah Bahasa Yang Hegemonik

Harus diakui media massa berperan penting dalam mensosialisasikan berbagai macam bahasa melalui berita yang dimuat setiap hari. Berita-berita tersebut mencakup berbagai sisi kehidupan masyarakat, dan salah satunya adalah bahasa politik.

Di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki suara para politisi, berita tentang politik, serta berita tentang kekerasan hampir setiap hari menghiasi halaman berbagai koran lokal, nasional bahkan internasional. Berita-berita tersebut bila dianalisis secara mendalam sebagian besar adalah bahasa hegemoni, dan

hegemoni yang terjadi di Aceh pada umumnya berkaitan langsung dengan kekuasaan.

Bahasa-bahasa yang cenderung hegemoni di Aceh tidak saja ditemukan pada masa konflik, pasca MoU Helsinki bahasa yang sifatnya hegemonik masih mudah didapatkan. Bahasa hegemoni yang dimaksud di sini adalah bahasa yang menekan atau menundukkan siapapun yang mendengar kata-kata/bahasa tersebut. Dan apabila kata-kata/bahasa tersebut diucapkan sebagian orang menjadi khawatir atau ketakutan ketika mendengarkannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa bahasa yang cenderung hegemoni, antara lain tercermin dalam konteks dan terjadi pada (1) Pemilukada, (2) Syariat Islam, (3) Anak Punk, dan (4) Aliran Sesat. Untuk lebih jelas berikut ini akan diuraikan masing-masing konteks di atas.

1. Pemilukada

Pasca MoU Helsinki, pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau sekarang disingkat dengan pemilukada bagi masyarakat Aceh telah membawa ketakutan tersendiri, karena menjelang pelaksanaan pemilukada masyarakat selalu menjadi sasaran teror, intimidasi, pembunuhan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kejadian seperti itu tidak saja dialami pada masa konflik, pasca damai pun masyarakat mengalami hal yang sama menjelang pelaksanaan pesta lima tahunan tersebut.

Pemilukada bila melihat pada tujuannya sangat baik, karena setiap orang yang sudah berhak memilih diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan politiknya melalui jalur pemilihan umum. Tetapi kenyataan di lapangan tidak demikian, sebab pada setiap pemilihan umum banyak masyarakat tidak lagi menentukan pilihan sesuai hati nuraninya, mereka umumnya memilih di bawah bayang-bayang teror, intimidasi, bahkan ada yang mengalami kekerasan fisik saat menjelang pemilihan.

Pada tingkat elite, menjelang pemilukada mereka saling menghegemoni (menjegal) antara satu dengan lainnya. Fenomena saling menghegemoni terlihat nyata pada pelaksanaan pemilukada tahun 2012, dimana antar elit saling bersikukuh mempertahankan ide dan ego masing-masing sampai pada terjadinya tarik ulur tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilukada. Hal ini diawali oleh perdebatan sengit tentang boleh tidaknya calon independen maju dalam pemilukada, yaitu antara Irwandi Yusuf sebagai incumbent dengan para elite GAM yang tidak menghendaki adanya calon independen maju dalam pemilukada. Silang pendapat yang tidak menemukan titik temu kemudian berkembang pada isu-isu yang lebih luas lagi pada akhirnya telah memaksakan KIP Aceh menunda beberapa tahapan pelaksanaan pemilukada.

Penundaan pelaksanaan pemilukada telah menyebabkan sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah rawan konflik menjadi waw-was dan ketakutan yang luar biasa, karena dalam

kurun waktu pelaksanaan pemilu pada tersebut berbagai teror, intimidasi, dan pembunuhan hampir tiap hari terjadi. Berita-berita tentang teror, intimidasi, dan pembunuhan seakan-akan tidak habis-habisnya menghiasai pemberitaan media cetak dan media elektronik pada saat itu.

Salah satu media cetak pada masa konflik yang eksis memberitakan berbagai kejadian di Aceh adalah Serambi Indonesia. Kejadian yang paling banyak diberitakan berupa teror, intimidasi dan serangkaian kekerasan lainnya menjelang dan pasca pelaksanaan pemilu.

Dari penelusuran yang dilakukan, menjelang dan pasca pemilu tahun 2012 ditemukan sebanyak 21 kasus untuk tindakan teror, 22 kasus untuk tindakan intimidasi, dan 2 kasus untuk tindakan pembunuhan. Bentuk-bentuk kasus tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

a. Teror.

Menjelang pemilu tahun 2012 aksi teror terjadi di mana-mana, dan hampir merata di seluruh kabupaten kota di Aceh. Teror pada umumnya dilakukan oleh lawan politik atau oleh OTK. Adapun teror yang terjadi beragam jenisnya, ada yang berbentuk fisik seperti pemukulan, pengeroyokan, maupun non fisik berupa ancaman-ancaman. Untuk waktu dan kronologis kejadian dapat digambarkan berikut ini:

Sejumlah massa yang di klaim sebagai OTK mengamuk di kantor Partai Aceh (PA) di Desa Meunasah Blang, Kota Juang, Bireuen pada tanggal 29 Maret 2011, akibat amuk massa tersebut sejumlah barang elektronik, perabotan, dan hampir semua kaca jendela pecah. Dan amukan ini mengakibatkan kerugian besar bagi pengurus PA karena kantor yang dijadikan sebagai sekretariat mereka tidak bisa digunakan lagi dan harus diperbaiki kembali, menurut pengurus PA amukan massa dilakukan oleh OTK.

Pada tempat yang berbeda, kekerasan dalam bentuk fisik dialami oleh WS saat dia hendak memfoto Irwandi yang sedang berpidato kemudian dilarang oleh anggota LPM (Laskar Merah Putih) sehingga terjadi cekcok antara WS dengan anggota LPM. Akibat cekcok itu WS babak belur dihajar dengan luka bacok dipinggul. Dalam keadaan demikian WS menerobos masuk ke ruangan Gedung Olah Seni dan berteriak di depan podium tempat Irwandi berpidato, kejadian ini membuat kaget seisi ruangan dan suasana pun berubah panik di tengah pidato anti kekerasan yang melahirkan kekerasan.

Pada tanggal 18 Februari 2012, menjelang kampanye pemilihan bupati Aceh Jaya, dua kubu pendukung calon bupati terlibat bentrok yang nyaris menyulut rusuh massal. Akibat bentrok tersebut seorang peserta kampanye harus dirawat di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh karena mengalami luka serius. Bentrokan ini terjadi di luar kantor DPRK Aceh Jaya. Pelaku tindak kekerasan

dalam kasus ini adalah pendukung cabub Abdurrahman dan pendukung Zamzami A. Rani.

Kejadian bentrok dua kubu pendukung calon bupati pada tanggal 18 Februari 2012 telah membuat sebagian masyarakat ketakutan dan was-was, terutama bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan arena kampanye.

Kasus lain terjadi pada 29 Februari 2012, Z salah seorang timses sekitar pukul 00.30 dibacok oleh OTK, dalam aksi tersebut OTK juga merusak kaca jendela dan pintu rumah Z dengan kampak. Peristiwa diduga terkait aktivitas politik yang dilakukan oleh Z, yaitu dengan menjadi timses salah satu pasangan Cabub/Cawabub.

Bentuk teror menjelang pemilu hanya pindah-pindah tempat saja, hal ini seperti terjadi lagi pada timses Seuramoe Irwandi/Muhyan di Aceh Utara, mereka dikeroyok oleh pria berbarat merah yang diduga massa dari partai PA pada Jumat 23 Maret 2012 pukul 01.30. Pengeroyokan ini terjadi pada lintasan jalan nasional, kawasan Desa Meunasah Dayah, Kec, Lhoksukon Aceh Utara. Mereka dikeroyok saat hendak memasang atribut kampanye. Satu orang dari empat orang yang dikeroyok harus dilarikan ke RS AD Lkokseumawe.

Pada hari yang sama, yaitu jumat tanggal 23 Maret 2012, teror kembali diterima oleh timses Cagup/cawagup Irwandi/Muhyan di Desa Mata Mamplam, Balee Setuy, Bireuen. Peristiwa

ini diawali oleh pemukulan terhadap Mi (25) dan Mr (30) yang sedang memasang baliho cagup/cawagup pada pukul 19.30, dan berselang beberapa jam, tepatnya pukul 21.30 sekelompok massa yang diduga pendukung PA dengan mengenderai sepeda motor datang lagi ke posko Irwandi/Muhyan untuk merusak baliho dan empat unit mobil yang sedang parkir di depan posko. Perusakan ini mengakibatkan kerugian besar bagi timses Irwandi/Muhyan.

Pada tanggal 24 Maret 2012, Dua kubu pendukung cabup/cawabup untuk pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Barat yaitu Adami/Bustanuddin (PA) dan Ramli MS/Moharriadi, petang sekitar pukul 18.30 terlibat keributan dan sempat adu jotos dipinggir jalan Imam Bonjol, depan Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh, gara-gara atribut yang dipakai oleh masing-masing pendukung. Keributan terjadi usai penandatanganan ikrar pilkada damai dan pawai kandidat mengelilingi ruas jalan protokol di Meulaboh, yang menarik dalam peristiwa ini adalah keributannya terjadi sesama anggota PA, dan teror pun dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat keributan.

Bentrokyang berujung pada aksi teror menimpa timses Muslim Hasballah/Marwi Umar yang maju melalui jalur independen dengan massa timses Hasballah alis Roki/Syahrul Syamaun yang diusung oleh PA pada tanggal 26 Maret 2012, di Aleu Seuntang, Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur sekitar pukul 12.30. T.I, mengalami pemukulan dan mobil Feroza miliknya dirusak oleh massa timses PA dalam bentrokan tersebut.

Pada tanggal 26 Maret 2012, di Pidie, simpatisan Darni Daud/Ahmad Fauzi yang maju sebagai calon gubernur dipukul dengan tiang bendera saat mereka berpas-pasan dengan mobil simpatisan PA, di sekitar Lampoh Saka, sehingga kepala I luka dan harus dilarikan ke RSUD Sigli untuk mendapatkan perawatan medis.

Pada tempat terpisah MJ (46) salah seorang timses Cagub/Cawagub Irwandi-Muhyar, pada tanggal 31 Maret 2012, sekitar pukul 19.20 dikeroyok oleh sejumlah orang yang diduga massa partai Aceh (PA) di kawasan Desa Beureughah, Kec. Kuta Makmu, Aceh Utara. MJ mengalami trauma berat pasca pengeroyokan tersebut.

Bentrok antara pendukung Timses Cabup/Cawabup kembali terjadi. Timses Cabup/Cawabup H. Ramli MS/Moharriadi pada hari Minggu 1 April 2012 terlibat bentrok dengan timses Cabup/cawabup dari partai Aceh, Adami Umar/Bustanuddin di Desa Seunubok, Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat. Akibat insiden itu satu unit mobil Daihatsu Feroza milik kader PA dirusak massa Ramli MS dan sejumlah warga luka memar setelah adu jotos sesama pendukung calon bupati tersebut. Pelaku dalam peristiwa ini adalah Timses Cabup/Cawabup H. Ramli MS/Moharriadi dengan timses Cabup/cawabup dari partai Aceh, Adami Umar/Bustanuddin.

Aksi teror dan tindak kekerasan dialami pada banyak tempat oleh timses Irwandi/Muhyar, di Desa Meunasah

Dayah, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara 23 Maret 2012 tiga orang timses mengalami luka-luka akibat dipukul oleh S alias Kombet. Atas laporan korban, aparat polres Aceh Utara akhirnya menangkap S pada Kamis 5 April 2012, karena S diduga terlibat dalam pemukulan tersebut.

Di Nagan Raya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) menegaskan, bahwa pemukulan terhadap Tgk. S (47), warga Desa Krueng Itam, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya yang terjadi Jumat 6 April 2012 malam, bukanlah ulah kader PA. "Pelaku pemukulan dalam insiden ini adalah masyarakat biasa. Menurut Teuku RM, pemukulan Tgk. S disebabkan yang bersangkutan selama ini kerap mengintimidasi masyarakat dan menjelek-jelekan PA. Sehingga cara-cara demikian telah memperkeruh suasana politik di Nagan Raya.

Kasus lain adalah pengeroyokan terhadap PI (40), (Pj) Keuchik Desa Bumi Sari, Kec. Beutong, Nagan Raya, pada Sabtu 18 April 2012, pukul 15.00 oleh dua warga dan seorang petugas Linmas yang akan bertugas sebagai pengaman tempat pemungutan suara atau pam pilkada, akibatnya, korban bonyok, menderita luka robek dibibir dan luka memar di beberapa bagian tubuhnya, persoalan ini dipicu hanya gara-gara mereka tidak mendapatkan baju Linmas. Pengeroyokan ini telah mendapat perhatian luas dari masyarakat Nagan Raya.

Dalam kasus lain, masyarakat Kabupaten Nagan Raya dan Abdy pada tanggal 20 Juli 2012 menghadang, bahkan sempat

bentrok dengan sekelompok orang berbarret merah yang disebut sebagai satgas partai PA yang hendak mengamankan pilkada dari *money politics*. Tetapi masyarakat setempat merasa tidak nyaman karena mereka diteror agar memilih pasangan tertentu.

Pada hari yang sama sebanyak 66 warga yang diyakini dari kubu pendukung cabub/cawabup Nagan Raya, Asib Amin/Djasmin Has ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan terkait aksi demo berujung rusuh di kantor KIP Nagan Raya. Insiden tersebut telah menyebabkan tiga warga dan tiga polisi terluka, enam unit mobil dan puluhan sepeda motor rusak. Pelaku tindak kekerasan dan teror dalam kasus ini adalah Pendukung Asib Amin/Djasmin Has.

Bentuk teror lain dialami oleh petugas KIP Gayo Lues pada tanggal 10 April 2012, dimana ribuan massa pendukung calon kandidat Bupati/Wakil Bupati Galus Irmawan/Yudi Candra melakukan demonstrasi ke kantor KIP menjelang magrib, mereka melempari kantor dengan batu, sehingga pagar dan puluhan jendela kaca rusak serta membakar satu buah mobil operasional KIP setempat. Amukan massa diakibatkan oleh banyaknya pelanggaran, sehingga yang diuntungkan dalam pemilu ini adalah pasangan nomor urut 3 (Ibnu Hasim/Adam).

Protes serupa juga dilakukan oleh massa pendukung Irmawan/Yudi Candra dan massa pendukung Karim Cukup/Nurhayati Sahali dengan cara berunjuk rasa memprotes tingginya suara Ibnu Hasim/Adam, menjelang sore massa membakar Kantor KIP dan lima kantor Camat serta satu unit mobil dinas Camat

Blangkejeren, kantor camat Dabun Gelang, Kantor Camat Blang Gayon, Kantor Camat Pantan Cuaca, dan Kantor Camat Rikit Gaib.

Di Banda Aceh, sekelompok orang memukul mantan gubernur Aceh, Irwandi Yusuf saat keluar dari dalam gedung DPRA se usai pelantikan gubernur/wakil gubernur Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf, senin 25 Juni 2012. Insiden pemukulan Irwandi berlangsung begitu cepat ketika ia keluar ke halaman gedung DPRA, Irwandi mengalami memar dibagian hidung, dahi, kepala bagian atas benjol, dan kacamatnya pecah. Kejadian mendapat perhatian besar dari semua kalangan di Aceh.¹

Kasus di atas memperlihatkan bahwa tindak kekerasan selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2012 di semua kabupaten/kota yang hendak melaksanakan pemilukada serta setelah pelaksanaan pemilukada masih saja terjadi antara satu timses dengan timses lainnya. Kekerasan terjadi dalam banyak bentuk, mulai dari pemukulan, perusakan, serta pembakaran terhadap kantor dan mobil oleh timses. Tindak kekerasan yang melibatkan timses Partai Aceh (PA) baik untuk pemenangan Gubernur/wakil gubernur dan Bupati/wakil bupati terhadap calon partai lain sebanyak 8 kasus. Sementara tindak kekerasan timses calon Gubernur/wakil gubernur atau Bupati/wakil bupati dari calon independen terhadap partai Aceh sebanyak 2 kasus. Bentrok antara sesama pendukung PA sebanyak 4 kasus. Anggota linmas memukul Pj Keuchik pada hari pemilihan sebanyak 1

1 Harian Serambi Indonesia, Januari-Juli 2012.

kasus. Dan kerusuhan yang berujung pada pembakaran terhadap kantor dan mobil sebanyak 5 kasus.

Bentuk-bentuk di atas menunjukkan bahwa menjelang pemilukada atau pasca pemilukada tahun 2012 tidak teror dalam bentuk fisik atau ancaman dalam bentuk kata-kata (bahasa) terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh pada saat itu.

b. Intimidasi.

Intimidasi menjelang pemilukada tahun 2012 terjadi secara masif hampir di seluruh kabupaten/kota. Data yang dihimpun dari pemberitaan Harian Serambi Indonesia bahwa tindak intimidasi sebanyak 22 kasus. Yang menarik dalam tindak intimidasi ini pelaku paling banyak berasal dari orang tak dikenal (OTK), dan orang yang belum teridentifikasi (OBT), serta pendukung masing-masing calon terhadap calon lain untuk pemilihan Gubernur/wakil gubernur dan calon Bupati/wakil bupati. Bentuk-bentuk intimidasi antara lain dapat di lihat di bawah ini.

Pada tanggal 16 Juli 2011, telah terjadi penembakan terhadap mobil anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh (PA) di Alue Nibong Kecamatan Peureulak Kota, Aceh Timur. Penembakan tersebut telah mengagetkan banyak orang, dan penembakan di Peureulak merupakan satu dari sekian banyak kasus intimidasi yang terjadi menjelang pemilukada di Aceh pasca konflik.

Berselang beberapa bulan setelah aksi penembakan di Aceh Timur, pada tanggal 02 Februari 2012, aksi lempar bom kembali terjadi terhadap rumah seorang kontraktor di Lorong Teungoh Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Kejadian ini terjadi pada malam Rabu sekitar pukul 04.00, aksi pelemparan bom tentu sangat mengejutkan D dan se isi rumah yang sedang tertidur lelap pada malam itu. Dalam kejadian ini rumah D hanya mengalami rusak ringan di beberapa bagian saja, D menyakini bahwa intimidasi yang dia alami dilakukan oleh OTK yang tidak senang atas pilihan politik dirinya.

Kasus lain Ketua KIP kota Langsa, AAH pada tanggal 05 Maret 2012 mengaku mendapat tekanan dan ancaman dari orang tak dikenal (OTK) yang meminta penertiban baliho dan kegiatan berunsur kampanye yang dilakukan oleh calon walikota/wakil walikota Langsa. Intimidasi terhadap AAH selaku ketua KIP tentu saja sangat disayangkan oleh banyak orang, dan bagi AAH sendiri ancaman ini tidak saja membuat dirinya khawatir, tetapi keluarganya juga turut khawatir atas ancaman-ancaman menjelang pelaksanaan pemilukada.

Intimidasi tidak saja terjadi dalam bentuk verbal, dalam bentuk non verbal juga kerap terjadi, seperti pembakaran baliho bergambar pasangan Cagub Irwandi/Muhyan di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam pada tanggal 04 Maret 2012. Menurut I, baliho yang dibakar itu berada di depan Seuramou Irwandi di Kecamatan Sultan Daulat, Jalan Subulussalam-Tapaktuan

tepatnya di Desa Gunung Bakti sekitar pukul 02.00, dan baru diketahui keesokan harinya. Menurut timses bahwa pembakaran baliho dilakukan oleh orang yang belum teridentifikasi (OBT).

Pada hari dan tanggal yang sama, yaitu (04 Maret 2012) ES, ketua timses Darni/Ahmad Fauzi mendapat surat kaleng berisi ancaman pembunuhan. Surat tersebut diletakkan di atas kaca mobil operasional yang mereka gunakan sehari-hari sekitar pukul 02.00 WIB. yang diparkir di depan rumahnya. Menurut ES pelaku intimidasi terhadap dirinya dilakukan oleh OBT agar dirinya tidak berpihak kepada Darni/Ahmad Fauzi selaku calon gubernur/wakil gubernur yang maju dari jalur independen.

Pada tempat lain pada tanggal 15 Maret 2012 intimidasi kembali menimpa M, salah seorang anggota timses Muslim Hasballah/Marwi Umar yang maju sebagai calon bupati Aceh Timur, bentuk intimidasi yang diterima berupa dibakarnya mobil kijang panther oleh OTK sekitar pukul 0,300 WIB. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Dua hari setelah kasus pembakaran mobil timses di Aceh Timur, kasus serupa kembali terjadi di Aceh Utara terhadap mobil Avanza milik MS pada tanggal 17 Maret 2012. Menurut MS mobilnya dibakar sekitar pukul 0.3.00 WIB oleh OTK yang diparkir di jalan depan rumahnya, di Desa Rungkam, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara. MS tercatat sebagai salah seorang timses

untuk pasangan Cagub Irwandi/Muhyan. Akibat pembakaran mobil tersebut, MS mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Selang satu hari kasus pembakaran mobil kembali dialami oleh anggota timses Partai Aceh (PA) untuk Cagub/Cawagub Zaini Abdullah pada tanggal 19 Maret 2012 di kawasan Cot Sabong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe. Dan pada tanggal yang sama di Desa pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, Ruko yang dijadikan sekretarian PA dibakar oleh OTK. Tindak pembakaran terhadap mobil dan sekretariat diperkirakan ratusan juta rupiah.

Intimidasi dengan membakar mobil timses kembali terjadi di Aceh Timur pada tanggal 19 Maret 2012, kali ini mobil Xenia yang dibakar adalah milik RY anggota timses cabup/cawabup pasangan Muslim Hasballah/Marwi Umar. Menurut RY mobil miliknya dibakar pada minggu sekitar pukul 04.00 Wib, dan pelaku pembakaran diyakini adalah OTK.

Pembakaran mobil timses seolah-olah sudah menjadi pemandangan biasa menjelang pemilukada. Pada tanggal 20 Maret 2012, Mobil Xenia milik timses Sulaiman Ibrahim/T. Saifuddin yang diusung gabungan parpol juga dibakar di Desa Baroh Kuta Batee, Meurah Mulia, Aceh Utara. Pelaku intimidasi dalam peristiwa ini diyakini adalah OTK.

Pada hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2012, pembakaran terhadap mobil cabup/cawabup terjadi di Aceh

Timur, mobil yang dibakar berjenis Taft Hiline milik timses pasangan Hasballah/Syahrul Syamaun dari partai Aceh (PA) oleh orang yang belum teridentifikasi (OBT) sekitar pukul 03.00. Mobil tersebut dibakar saat terparkir di jalan lorong depan rumah Z, dusun setia, Desa Keude Birem. Kecamatan Birem Bayuen Aceh Timur.

Dalam hari dan tanggal yang sama (21 Maret 2012), kasus serupa yaitu pembakaran mobil timses cabup/cawabup terjadi lagi di Aceh Utara, dimana mobil timses Sulaiman Ibrahim/T. Saifuddin dibakar Orang Tak Dikenal (OTK) sekitar pukul 04.00. Mobil yang dibakar berjenis Xenia BK 1820 FA, di parkir di depan rumah MY, Desa Baroh Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara. Aksi intimidasi telah membuat pemilik mobil dan warga sekitar kejadian mengalami ketakutan dalam beraktivitas sehari-hari.

Pembakaran tidak hanya menimpa mobil timses, rumah dan posko pemenangan calon juga menjadi sasaran untuk dibakar saat itu, pada tanggal 22 Maret 2012, salah satu rumah keluarga mantan petinggi GAM, ZS di bakar oleh Pelaku Yang Belum Teridentifikasi (PBT) di Gampong Keude Keumala, Kabupaten Pidie menjelang subuh, meskipun tidak menghancurkan bangunan utama karena cepatnya bantuan yang diberikan oleh tentangga, namun tenda berukuran 3x3 meter musnah terbakar dalam peristiwa tersebut.

Sementara posko yang mengalami pembakaran terjadi pada tim pemenangan Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf dan Cabup/wabub Abdy Jufri Hasanuddin/Yusrizal Razali. Posko yang terletak di pinggir jalan nasional, Desa Geulumpang Payong depan SMP 2 Blangpidie dibakar pada tanggal 23 Maret 2012. Menurut MN ketua PA Abdy, peristiwa pembakaran terhadap posko dan sarana lainnya bukan kali pertama terjadi, belum lama ini baliho cabup/cawabup di Desa Ujong Tanoh, Kecamatan Setia juga menjadi sasaran untuk dibakar oleh OTK.

Kasus intimidasi juga dialami oleh salah seorang simpatisan PA, IH (67), di sebuah warung kopi yang berada di persimpangan Kompleks BTN Panggoi Bawah, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada tanggal 30 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 Wib., IH ditodong dengan senjata api (Pistol) oleh calon Walikota Lhokseumawe, HM. YP pada Jumat 30 Maret 2012. Peristiwa ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi IH yang sudah tua.

Tanggal 10 April 2012 menjelang pelaksanaan pemilu, warga masyarakat yang tinggal di pedalaman sangat ketakutan karena satgas Partai Aceh (PA) mendatangi warga dan memaksa mereka memilih pasangan nomor 5. Dengan ancaman, jika nomor 5 kalah, Aceh akan dilanda perang lagi. Intimidasi ini mencapai puncaknya pada malam sebelum hari "H" pencoblosan. Saat itu, tutur I, warga didatangi lagi dengan ancaman kekerasan terhadap keluarganya jika tidak memilih pasangan nomor 5. "Ancaman yang lebih dahsyat dialami para saksi pasangan nomor 2. Para

saksi diintimidasi agar tidak datang ke TPS, surat mandat saksi banyak sekali yang dirampas, bahkan ada saksi yang diculik pada saat itu."

Pasca pemilu, tepatnya pada tanggal 11 April 2012, demo terkait ketidakpuasan rekapitulasi hasil suara dilakukan oleh massa pendukung 10 calon pasangan cabup/cawabup di depan kantor Panwaslu Takengon. Mereka meminta pilkada diulang, dan KIP harus membatalkan perolehan suara yang diraih oleh pasangan (Nasaruddin/Khairuddin Asmara) karena ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan tersebut, tetapi tidak pernah ditindak oleh panwas. Pendukung 10 calon pasangan yang kalah mengancam KIP agar segera melakukan pemilihan ulang.

Perbuatan yang menuai protes dan ancaman menimpa ketua KIP Aceh Jaya, ketika dia meneriakkan "hidup partai Aceh" dihadapan peserta rapat pleno, penetapan bupati terpilih di gedung kesenian Calang, senin 16 April 2012. Tindakan ketua KIP tersebut telah mencederai jalannya sidang pleno, sekretaris DPD II partai Golkar, dan ketua DPD Partai Demokrat menuduh bahwa KIP Aceh Jaya tidak netral dalam penyelenggaraan pemilukada 2012, sehingga tindakan ketua KIP perlu dievaluasi dan diberi sanksi demi menjaga nama baik lembaga tersebut.

Pasca pemilu Muzakir Manaf selaku wakil Gubernur terpilih pada tanggal 21 April 2012 di hadang oleh mantan kombatan GAM yang tidak lagi segaris dengannya saat berkonvoi menuju desa

Seunubok, Kecamatan Woyla, Aceh Barat guna menghadiri acara peusijuek. Penghadangan oleh mantan kombatan menyebabkan Muzakir Manaf gagal menghadiri acara peusijuek dan dia lebih memilih kembali ke Meulaboh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasca pemilu intimidasi masih saja terjadi pada Tgk. P salah seorang anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Barat pada tanggal 22 Juni 2012, anggota KPA ini diserang dengan granat nenas oleh orang yang belum teridentifikasi (OBT) ketika korban berada di depan rumahnya, di Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, menjelang tengah malam. Untung saja granat yang jatuh persis di belakangnya tak meledak, sehingga Tgk. P berserta isteri dan dua anaknya selamat. Kejadian ini telah meninggalkan trauma mendalam bagi istri dan anak Tgk. P.

Intimidasi dalam bentuk penembakan terhadap lawan politik menimpa salah seorang anggota DPRK pada tanggal 11 Juli 2012, pelaku tindak intimidasi menggunakan senjata api AK 47 untuk melakukan penembakan terhadap mobil yang dikenderai oleh anggota DPRK tersebut.

Intimidasi terhadap KIP tidak hanya terjadi di Aceh Tengah, pada tanggal 03 September 2012, Kantin kompleks kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara di Desa Perapat Timur, Kecamatan Lawe Bulan, pada hari minggu dibakar oleh orang tak dikenal (OTK). Pembakaran kantin tersebut sebagai upaya untuk membakar kantor KIP Agara. Insiden ini menyebabkan tiga orang

yang berada di dalam kantin menjadi korban kebakaran dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Pada tanggal 06 September 2012, S selaku Camat mengalami intimidasi, dimana satu unit mobil dinas yang biasa dia gunakan untuk operasional pada Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues jenis Daihatsun Taruna dibakar oleh Orang Tak Bertanggungjawab (OTB). Camat S yang tidak berada di rumah saat insiden memarkir mobil di depan rumah pribadinya di Desa Maju, Kecamatan Blangpegayon. Insiden ini terjadi saat warga sedang tertidur lelap. Menurut sejumlah warga, pembakaran yang terjadi terkait pilkada Kabupaten Gayo Lues pada April lalu, dimana Camat mendukung pasangan incumbent yang menang sekarang, aksi pembakaran mobil dinas telah menghilangkan aset dan merugikan negara.

Kasus-kasus di atas menunjukkan, bahwa bentuk-bentuk intimidasi menjelang maupun pasca pelaksanaan pemilukada terjadi dalam berbagai bentuk di banyak tempat di Aceh. Apabila diklasifikasikan dari berbagai tindak kekerasan di atas, maka masing-masing terdiri dari penembakan sebanyak 1 kasus, pelemparan bom dan granat sebanyak 2 kasus, teror sebanyak 2 kasus, pembakaran baliho dan ancaman melalui surat kaleng sebanyak 1 kasus, ancaman terhadap anggota KIP 1 kasus, pembakaran mobil timses sebanyak 8 kasus, pembakaran rumah dan kantin 2 kasus, penghadangan 1 kasus, penodongan pistol oleh calon walikota terhadap lawan politik sebanyak 1 kasus,

ephoria terhadap kemenangan partai PA oleh ketua KIP sehingga mendapat protes oleh partai-partai lain sebanyak 1 kasus, dan protes pelaksanaan pilkada ulang sebanyak 1 kasus.

Dari tujuh bentuk tersebut, kasus pembakaran mobil timses mendominasi bentuk-bentuk intimidasi. Kemudian dari serangkaian intimidasi yang terjadi sebanyak 12 kasus dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK), 4 kasus dilakukan oleh orang yang belum teridentifikasi. Sementara 5 bentuk intimidasi lain dilakukan oleh individu terhadap lawan politiknya masing-masing. Selain tindak kekerasan dan intimidasi, pembunuhan juga mewarnai bumi serambi Mekkah menjelang pelaksanaan pemilukada beberapa waktu yang lalu.

c. Pembunuhan.

Kasus pembunuhan menjadi paket lengkap menjelang pemilukada tahun 2012, adapun kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 17 Februari 2012 aksi penembakan kembali terjadi di Lhokseumawe, satu dari dua orang tak dikenal (OTK) yang memegang pistol jenis airsoft gun menembak RA (Joko) di warung kopi simpang Buloh, Jumat 17 Februari 2012 sekitar pukul 03.15. Agen L 300 ini harus dioperasi karena perutnya bersarang peluru. Korban merupakan warga Desa Paya Peuntuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Pelaku pembunuhan dalam peristiwa tersebut adalah OTK.

2. Tanggal 08 Maret 2012, penembakan terjadi lagi di Lhokseumawe, kali ini yang menjadi korban adalah ketua DPRK Lhokseumawe, SY (Pon Pang), dia ditembak oleh dua orang yang menggunakan senjata api laras pendek saat menutup pintu pagar rumahnya di Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe, Kamis 8 Maret 2012, sekitar pukul 02.20, dari empat peluru yang ditembakkan pelaku satu peluru menembus punggung korban hingga ke bagian kanan perutnya. Korban akhirnya dirawat di rumah sakit TNI AD. Dari hasil pemeriksaan ternyata hati korban tersayat hingga 6 cm oleh peluru. Pelaku pembunuhan dalam peristiwa ini diyakini dilakukan oleh OTK.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa selama pelaksanaan pemilu pada aksi pembunuhan sebanyak dua kasus, kedua kasus tersebut terjadi di Lhokseumawe. Menurut catatan koran harian Serambi Indonesia bahwa semua bentuk kekerasan, intimidasi serta pembunuhan terkait dengan politik menjelang pemilu.

Data kekerasan selain diberitakan oleh harian Serambi Indonesia, beberapa lembaga pemantau konflik di Aceh seperti Imparsial dan Judicial Monitoring Institute (AJMI) juga menghimpun data di lapangan, menurut mereka sejumlah besar kejadian bukanlah kriminal biasa karena kasus demi kasus hampir semuanya beririsan dengan situasi politik lokal yang sedang berkembang di Aceh.

Imparsial dan Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) Aceh mencatat sepanjang tahun 2011 hingga 2012 telah terjadi kekerasan sebanyak 17 kali. Kasus-kasus tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

No.	Tanggal	Korban	Pelaku	Tempat & Keterangan
1.	14-03-2011	Penembakan yang menewaskan H	OTK	Di Desa Dayah, Syamtalira Aron, Aceh Utara, Senin 14 Maret 2011. Warga Negara Norwegia ini ditembak secara beruntun oleh orang tidak dikenal.
2.	22-07-2011	SH alias Cagee, mantan ketua KPA Wilayah Batee Ilikek	OTK	Korban ditembak di bagian kepala dari jarak dekat saat dia sedang duduk di depan warung kopi Gurkha, Matang Geulumpang Dua, Peusangan, Bireuen, Jum'at 22 Juli 2011.
3.	27-07-2011	Ketua, Sekretaris dan bendahara Koperasi Catur Karya	OTK	Komplotan pria bersenjata laras panjang memberondong mobil yang ditumpangi di Dusun Drien Soh, Desa Meunje Cut Bahagia, Kuta Makmur, Aceh Utara, Rabu 27 Juli 2011.

4	18-08-2011	Sepasang suami istri, SA (48) yang juga Kepala SMK Negeri 1 Lembah Sabil, Aceh Barat Daya (Abdya), dan istrinya A (39)	berinisial AS (21) dan AA (29), warga Desa Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan.	Kedua korban mengalami luka tembak serius pada Senin (15/8) malam, sehingga menjalani perawatan intensif di RSUD Abdya. Lebih seminggu dirawat, kondisi keduanya sudah membaik.
5	20-08-2011	Dua pedagang emas, Y dan R, warga Leuhan, Johan Pahlawan, Aceh Barat	OTK	Ditembak kawanannya perampok seusai berjualan di Pasar Pante Cereumen, Aceh Barat, Sabtu 20 Agustus 2011.
6	23-08-2011	Mobil operasional PT Saripari Geosains, perusahaan yang sedang survei minyak dan gas di Aceh Utara	OTK	Ditembak lebih satu kali dengan pistol saat melaju di jalan linepipa, Lhokseumawe, Selasa 23 Agustus 2011. Sopir mobil itu, Hanafiah, mengalami luka akibat terkena pecahan kaca. PT Saripari Geosains merupakan kontraktor utama dari perusahaan minyak milik asing, Zaratex NV.

7	03-10-2011	Sesosok mayat yang diduga kuat korban penembakan yakni M. D bin A (25) ditemukan warga mengapung di arus sungai kawasan Pereulak Timur, Minggu (2/10) malam.	OTK	Kapolres Aceh Timur, AKBP Ridwan Usman, melalui Kasat Reskrim AKP Priyo Utomo, SH, SIK yang dikonfirmasi <i>Serambinews.com</i> , membenarkan korban diduga meninggal akibat ditembak karena ditemukannya luka bekas tembakan senjata api di bagian dada, perut, lengan, paha, dan pinggang.
8	14-10-2011	S, wakil ketua Koperasi Unit Desa Tani Jaya	OTK	Tewas ditembak komplotan bersenjata api saat berada di rumahnya, RW II Desa Babussalam, Baktya, Aceh Utara, Jum'at, 14 Oktober 2011. Uang sejumlah Rp 35 juta milik anggota koperasi dirampas.

9	05-11-2011	Pasangan suami istri, R (35) dan AJ (40), penduduk Desa Bagok Panah IV, Kecamatan Darul Aman, Idi Cut, Aceh Timur	OTK	<p>Sang istri tewas diberondong AK-47 saat berupaya menghadang komplotan bersenjata masuk ke rumahnya.</p> <p>Insiden memilukan itu terjadi menjelang tengah malam, Kamis (3/11). Rubiah tewas setelah empat peluru menembus pintu rumah dan menghunjam tubuhnya yang saat itu berusaha menahan dorongan komplotan penjahat yang berupaya masuk. Sang suami yang ikut 'memblokade' hanya terkena serpihan peluru di bagian tulang rusuk kiri. Laki-laki itu syok berat.</p>
---	------------	---	-----	---

10	02-12-2011	SD bin S (32), warga Gampong Seulangai, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar	Oknum TNI	Kamis (17/11/2011) sekitar pukul 23.00 WIB tewas ditembak Kapten (CZI) Jafaruddin Juned (54), oknum TNI AD yang sebelumnya menjabat Komandan Koramil (Danramil) Lamno, Aceh Jaya. Korban tewas di halaman rumahnya setelah ditembak di bagian kepala oleh pelaku, menggunakan pistol jenis FN dari jarak dekat.
11	04-12-2011	Pemberondongan yang menewaskan tiga pekerja perkebunan karet milik PT Satya Agung, di Krueng Jawa, Desa Uram Jalan, Geureudong Pase, Aceh Utara	OTK	Tiga korban tewas di tempat, yaitu Sukatno, Heryanto dan Sugiarto alias Sugeng, warga asal Bukit Lawang, Sumatra Utara Lima korban lainnya mengalami luka tembak, empat di antaranya kritis. Seorang dari empat korban kritis, Misman akhirnya meninggal dalam perawatan di salah satu rumah sakit di Medan, Jumat 30 Desember 2011.

12	10-12-2011	Penembakan mobil yang ditumpangi Z alias Lam Angen, mandor pekerja perkebunan milik PT Satya Agung	OTK	Zulfikar berhasil menyelamatkan diri dan tembakan 'hanya' mengenai ban bagian kanan belakang mobil. Pengakuan Zulfikar, insiden ini terjadi saat dia melintasi jalan linepipa, Blang Mangat, Lhokseumawe
13	11-12-2011	SS (40), pembawa mitan bersubsidi yang ditembak aparat keamanan di Kilometer 35, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah masih dirawat di RSUD Datu Beru Takengon. Sehingga, polisi terpaksa menunggu sampai korban sembuh untuk diperiksa.	Kepolisian	Aksi penembakan terjadi menurut AKBP Ari Apriyono karena adanya kecurigaan aparat ketika pikap menerobos barikade patugas. "Setelah melewati barikade ketiga, langsung dilumpuhkan oleh petugas. Meskipun telah dilumpuhkan (ditembak) tetapi pikap itu tak berhenti malah langsung lari sehingga semakin kuat dugaan kalau pengendaranya komplotan bersenjata," kata Hari Apriyono.

14	23-12-2011	Aksi penembakan base camp para pekerja PT Jim Mulya yang sedang melakukan survei kandungan minyak dan gas di di Desa Ulee Dagang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara.	OTK	Rentetan tembakan menghantam area penyimpanan bahan bakar minyak di sekitar lokasi barak pekerja PT Jim Mulya, sub-rekanan dari PT Saripari Geosains, di Desa Lagang, Sawang, Aceh Utara, Jumat 23 Desember 2011.
14	31-12-2011	Pemberondongan di Desa Blang Cot Tunong, Jeumpa, Bireuen	OTK	Korban yang tewas yaitu Parno, Daud, dan Tom. Sedangkan korban luka-luka bernama Khairul (27) terkena tembakan bagian leher, Imam Maliki (29), Andrianto (19), Ansori Irwan (40), Abdul Hakid (30), Hasan (40), Yaiman (29). Kejadian terjadi sekitar pukul 20.3, ketika para korban sedang istirahat di satu rumah kontrakan Blang Cot Tunong, Kecamatan Blang Bladeh, Kabupaten Bireuen.

16	31-12-2011	Penembakan terhadap W (40)	OTK	Korban yang disapa Dimas, tercatat sebagai warga Lamtemen, Banda Aceh yang sehari-hari menjadi karyaan toko boneka kawasan Ulee Kareng. Korban ditembak di bagian kepala. Saat ini belum diketahui motif penembakan itu.
17	01-01-2012	Korban tewas bernama S saat ini masih tergeletak di lokasi kejadian. Aparat TNI dan Polri telah berada di lokasi kejadian. Sementara satu korban lainnya bernama EK (39) dalam keadaan kritis, saat ini dalam perjalanan menuju Rumah Sakit TNI AD, Lhokseumawe	OTK	Penembakan di Blok B Seureukey Kecamatan Langkahan, Aceh Utara sekitar pukul 21.30 Wib, Minggu (1/1/2012).

Meningkatnya eskalasi kekerasan bersenjata yang terjadi pada tahun 2011 tidak bisa terlepas dari carut marutnya pola dan sistem pelaksanaan pemilukada di Aceh. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tidak dikenal di Aceh untuk melakukan teror/intimidasi pada masyarakat melalui penembakan dan pelemparan granat dengan tujuan utama

mengganggu dan merusak proses perdamaian di Aceh. Lebih dari itu, ketidakmampuan polisi dalam melakukan pengungkapan berbagai persoalan semakin menunjukkan bahwa kasus-kasus yang terjadi adalah benar memang memiliki motif politik.²

Berbagai kekerasan seperti tergambar di atas telah dikonstruksikan dalam sebuah permainan bahasa³. Selama pelaksanaan pemilu pada 2012 hegemoni bahasa tidak lagi mendapat protes dari siapapun, semua orang diam dengan apa yang terjadi. Ada tiga kemungkinan mengapa masyarakat diam terhadap berbagai hegemoni bahasa menjelang pemilu pada 2012 kali ini. *Pertama*, masyarakat Aceh apriori terhadap berbagai bentuk bahasa yang ada dan dunia politik sudah demikian adanya. *Kedua*, masyarakat bingung dan tidak mengerti sehingga tidak bereaksi. *Ketiga*, masyarakat dapat memahami maksud alur komunikasi tersebut dan tidak terlalu mementingkan bahasa yang dipakainya.⁴

2 Ujang Firmansyah, *Kekerasan di Aceh Mengancam Perdamaian*, dalam *www.imparsial.org*, Akses tanggal 21 Juli 2012.

3 Permainan bahasa (*language games*) istilah yang digunakan oleh Wittgenstein II dalam bukunya *Philosophical Investigations* (1953). Tata permainan bahasa adalah proses menyeluruh penggunaan kata, termasuk juga pemakaian bahasa yang sederhana sebagai suatu bentuk permainan. Menurut Wittgenstein 'tata permainan bahasa' tidak akan terwujud dengan baik apabila tidak dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lihat Rizal Mstabsyir, *Filsafat Analitik, Sejarah Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 101-102.

4 Dadang S. Anshori, *Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat dalam Media Massa Pasca Orde Baru: Analisis Wacana Kritis Tentang Idiom Politik di Indonesia*. Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional, yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, UPI Bandung, Sabtu 30 Agustus 2008.

Dalam matrik di atas menunjukkan, bahwa ada empat bahasa yang dikonstruksikan oleh media terhadap pelaku hegemoni menjelang pemilukada maupun pasca pemilukada di Aceh tahun 2012, contoh ke empat bahasa tersebut misalnya: *Pertama*, penyebutan terhadap pelaku pembakar baliho bergambar Cagub/Cawagub Irwandi/Muhyi di Subulussalam dengan sebutan Orang Belum Teridentifikasi (OBT).⁵ *Kedua*, penyebutan Orang Tak Dikenal (OTK) terhadap pembakar mobil timses Cabu/Cawabup di desa Baroh Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara.⁶ *Ketiga*, penyebutan Pelaku Yang Belum Teridentifikasi (PBT) terhadap pembakar rumah di gampong keude Keumala, Pidie.⁷ *Keempat*, penyebutan Orang Tak Bertanggungjawab (OTB) terhadap pembakar mobil dinas Camat Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues.⁸

Ke empat model bahasa di atas dalam dua tahun terakhir ini terus dikonstruksikan melalui media massa kepada masyarakat, dan bahasa-bahasa tersebut sama sekali tidak mendapatkan protes dari siapapun. Masyarakat malah menerima begitu saja tanpa mempedulikan siapa yang mengkonstruksikannya dan dalam konteks apa dikonstruksikan. Padahal keempat ragam bahasa di atas memperlihatkan bagaimana orang yang belum teridentifikasi, orang tak dikenal. Pelaku yang belum

5 *Serambi Indonesia*, 5 Maret 2012.

6 *Serambi Indonesia*, 21 Maret 2012.

7 *Serambi Indonesia*, 22 Maret 2012.

8 *Serambi Indonesia*, 6 September 2012.

teridentifikasi, dan orang tak bertanggungjawab tersebut melakukan teror, intimidasi serta pembunuhan terhadap siapa saja termasuk lawan politiknya.

Harus diakui, bahasa dalam setiap rezim kekuasaan memiliki warna yang berbeda. Dalam kasus Aceh menjelang pemilukada banyak orang, kelompok atau partai mencitrakan diri kepada publik dengan bahasa melalui peranan media massa. Citra yang dibangun tujuannya hanya satu yaitu untuk kemenangan. Citra kadang kala dibangun lewat bantuan sosial, perang opini antar elite, cara-cara tersebut banyak membawa pengaruh yang pada akhirnya membentuk pola pikir masyarakat luas. Upaya pencitraan merupakan salah satu bentuk *the politics of symbolism*.⁹ Politik simbolisme adalah suatu tindakan untuk merepresentasikan sebuah gejala sosial, dalam hal ini superiornya pengaruh hegemoni yang mampu melahirkan simpatisme dan meletupkan gerakan kelompok *civil society* terhadap pelaksanaan pilkada Aceh.

2. Syariat Islam

Syariat Islam bukan kata yang asing ditelinga masyarakat Aceh, mereka hampir setiap hari mendengar, membaca, dan berdiskusi tentang kemajuan pelaksanaan syariat Islam. Pada forum-forum formal pun syariat Islam sering diseminarkan atau dikhutbahkan

9 "Hegemoni Politik Aceh", dalam <http://laskarpasee.wordpress.com/2011/12/31/hegemoni-politik-aceh/diakses> tanggal 17 maret 2012.

pada mimbar-mimbar agama Islam oleh para pemuka agama, dengan demikian secara sosiologis masyarakat sudah sangat familiar dengan kata-kata syariat.

Pelaksanaan syariat yang sudah menyebar dalam kehidupan masyarakat, secara legal formal merupakan “hadiah” pemerintah pusat dalam rangka meredam konflik antara Aceh dengan Jakarta yang sudah berlangsung lebih dari tiga dekade. Sebagai langkah strategis, pemerintah Indonesia pada tahun 1999 memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh untuk menarapkan syariat Islam melalui Undang-undang No. 44 tahun 1999 dan Undang-undang No. 18 tahun 2001.¹⁰ Undang-undang No. 18 tahun 2001 selanjutnya digantikan dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di dalamnya juga mengatur perihal pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh.

Syariat Islam pada masa-masa awal diberlakukan, disambut oleh masyarakat dengan melakukan sujud syukur di mesjid-mesjid maupun di mushalla, bahkan tidak sedikit yang euphoria dalam menyambutnya. Namun seiring perjalanan waktu sejak syariat Islam dilegalkan tahun 1999 hingga tahun 2012, ternyata berbagai tindakan di lapangan atas nama syariat Islam muncul di mana-mana dan berjalan sendiri-sendiri dan seolah-olah tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana prosedur hukum syariat Islam yang bakal diberlakukan di Aceh. Maka tidak

10 Al Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 41-48.

heran apabila muncul banyak kasus di tengah masyarakat tidak terselesaikan secara syariat, di samping ada persoalan krisis konstitusi, karena berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan di daerah tersebut ada yang berseberangan dengan undang-undang lain dan bahkan cenderung merugikan pihak masyarakat kecil dan perempuan. Kaum perempuan seakan menjadi objek dari pelaksanaan syariat yang hanya mengurus soal jilbab, celana ketat dan sikap perempuan. Sehingga banyak aksi sweeping terhadap perempuan karena persoalan-persoalan di atas pada banyak tempat di Aceh.¹¹

Beberapa kasus yang mengemuka seperti aksi para santri dari beberapa kecamatan di Aceh Utara, dan Lhokseumawe yang melakukan sweeping di sejumlah lokasi wisata. Para santri melakukan sweeping di kawasan menuju objek wisata Blang Kulam, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Sweeping dilakukan untuk mencegah masuknya pelanggar Syariat Islam ke daerah itu. Lalu, ratusan santri tiba di kawasan Desa Pantan Rayeuk Sa, Kecamatan Kuta Makmur menggunakan mobil dan sepeda motor. Setelah berdoa di masjid setempat, mereka melakukan sweeping di jalan menuju Blang Kulam. Bagi yang mengenakan pakaian muslim, dibolehkan menuju Blang Kulam, sedangkan bagi pasangan non-muhrim dan berpakaian ketat diminta meninggalkan lokasi. Sweeping ala santri itu mengundang protes dari para pemuda Kemukiman Beureughang, Kecamatan Kuta

11 Tabrani Yunis, *Menggugat Negeri Syariat*, dalam www.ccde.or.id/index.php?, akses tanggal 25 Juli 2012.

Makmur. Mereka datang ramai-ramai ke tempat sweeping, lalu mengusir para santri.¹²

Selain santri dan masyarakat, aksi polisi syariat (WH) pun saat itu tidak kalah hebatnya. Di kota Banda Aceh dan beberapa kota lainnya sweeping gabungan setiap hari dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan setiap perempuan yang tidak mengenakan pakaian muslimah dan tidak menggunakan jilbab. Aksi-aksi semacam ini kemudian membuat para perempuan menjadi sangat ketakutan, karena ada yang menangis saat ditangkap. Langkah ini dilakukan untuk mengatur agar para perempuan menutup aurat, sebagai wujud dari penerapan syariat Islam di Aceh.

Selain beberapa aksi di atas, hiruk pikuk pelaksanaan syariat Islam juga dengan meng-Arab-kan semua toko (termasuk toko Cina) dan kantor-kantor pemerintah, seakan-akan inilah wajah negeri syariat yang ideal. Namun tulisan-tulisan Arab itu sekarang di beberapa tempat secara perlahan sudah mulai hilang lagi.

Penerapan syariat Islam yang sempat menggemparkan dunia ketika Kabupaten Bireun menjadi pioner dalam pelaksanaan hukum cambuk terhadap 26 dari 27 pelaku pelanggaran maisir (judi), mereka yang melanggar di cambuk (*uqubat*) seusai shalat Jumat di halaman Masjid Agung Bireuen yang disaksikan oleh semua jamaah yang hadir pada saat itu. Setelah di mulai di Bireun hukum ini secara estafet diterapkan di beberapa daerah

12 "Sweeping Pengunjung, Santri Dihadang Pemuda", dalam, *Serambi Indonesia*, 5 September 2011.

lain seperti di Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya dan beberapa daerah lainnya. Pelaksanaan hukum cambuk di Aceh kemudian terus diwarnai dengan pro dan kontra. Karena berbagai alasan seperti diskriminatif dan bertentangan dengan HAM.

Keinginan kuat untuk melaksanakan syariat Islam juga sempat heboh terhadap qanun jinayat, padahal qanun jinayat sendiri sebagai pintu masuk pelaksanaan syariat Islam. Qanun jinayat mengatur tentang jarimah dan uqubat khamar (minum alkohol), maisir (judi), khalwat (berduaan di luar muhram), ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath (homo), dan musahaqah.¹³ Ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh telah mensahkan peraturan daerah tentang Qanun Jinayat (hukum pidana Islam) dan Qanun Acara Jinayat (Hukum Acara Pidana Islam), maka berbagai ormas melakukan demo menolak pengesahan qanun tersebut. Karena kuatnya desakan akhirnya qanun jinayat kandas di tengah jalan, apalagi Gubernur Aceh atas dasar berbagai pertimbangan dan penolakan dari banyak pihak tidak menyetujui dan mengesahkan qanun jinayat pada saat itu.

Hal lain yang sangat menghebohkan adalah ketika kebijakan sensasional diterapkan oleh Bupati Aceh Barat Ramli MS, pada bulan November 2009 yang bermaksud membagikan rok gratis kepada kaum perempuan di wilayah kekuasaannya. Niat itu

13 "Qanun Jinayat Pecahkan Keheningan Aceh", dalam, *www.inilah.com*. 10 Agustus 2012.

kemudian diikuti dengan aksi sweeping terhadap perempuan yang menggunakan celana ketat yang kemudian menggantikan dengan rok. Kebijakan bupati ini bahkan sempat menghebohkan seantero nusantara.¹⁴

Belakangan ini berita yang sangat mengganggu terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terjadinya kasus bunuh diri yang menimpa PE di gampong Aramiah, Birem Bayeun, Aceh Timur. Berita kematian PE sampai hari ini masih misterius, ada yang menduga PE bunuh diri karena pemberitaan salah satu koran yang menuduhnya melakukan mesum di lapangan merdeka Langsa dengan memuat judul berita 'Dua Pelacur Diberkah WH',¹⁵ dan ada yang mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa PE melakukan bunuh diri sebagaimana dikatakan oleh orang tua PE sendiri. Terhadap kematian PE ini telah mengundang pro dan kontra pada tingkat lokal dan nasional terhadap pelaksanaan syariat Islam, khususnya di kota Langsa.¹⁶

Menurut Maimun Saleh, ketua AJI Banda Aceh, bahwa Kualitas pemberitaan Syariat Islam di Aceh selama ini dinilai belum menggembirakan. Pemberitaan media massa terhadap isu syariat Islam cenderung pada hal-hal yang negatif, sehingga memunculkan stigma menyeramkan. Hasil pemantauan AJI

14 Tabrani Yunis, *Menggugat Negeri.....*, 25 Juli 2012.

15 "Malu Dituduh Pelacur Oleh Polisi Syariah Aceh, Putri Memilih Bunuh Diri", dalam, *jaringannews.com*. 13 September 2012.

16 "KPAI Dukung Autopsi PE", dalam, *Serambi Indonesia*, 29 September 2012. Berita tentang kematian PE juga dimuat oleh serambi Indonesia tanggal 01 dan 02 Oktober 2012.

Banda Aceh yang dituangkan dalam Program Mendorong Media Sehat dalam Pemberitaan Syariat Islam di Aceh menemukan ada kecendrungan media terjebak pada isu. Isu Syariat Islam telah bergeser menjadi isu kriminal. Sementara peneliti media, Fahmi Yunus menyarankan perlunya forum editor untuk mereduksi pemberitaan Syariat Islam. Forum Editor nantinya akan menyamakan persepsi bagaimana memberitakan Syariat Islam tanpa mengesankan kekerasan dan sangar di mata publik.

Untuk menyikapi fenomena seperti di atas, sejumlah wartawan lintas media membentuk kaukus pembela syariat Islam dan kaukus syariat terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan di Aceh.¹⁷ Salah satu agenda dari kaukus ini adalah mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh dari anasir-anasir busuk yang berlandung dibalik tema-tema intelektual dan hak azasi manusia. Menurut Arif Ramdan sebagai penggagas kaukus pembela syariat, bahwa selama ini anasir busuk berbaju munafik sangat banyak dan sangat berbahaya, seolah-olah dalam setiap forum mendukung syariat, tetapi diam-diam menjalankan misi terselubung dari donor-donor asing untuk menghancurkan Islam di Aceh.¹⁸

Menurut temuan tentang pemberitaan Syariat Islam sampai Februari 2012 menemukan sebanyak 70 berita yang berkaitan

17 "PWI Dukung Kaukus Syariat", dalam, *Serambi Indonesia*, 25 September 2012. Selain mendapat dukungan dari PWI kaukus syariat juga mendapat dukungan dari para santri di Aceh, dalam, *Serambi Indonesia*, 26 September 2012.

18 "Wartawan Gagas Kaukus Pembela Syariat", dalam, *Serambi Indonesia*, 23 September 2012.

langsung dengan syariat Islam, 29 adalah berita tentang penggerebekan dan penangkapan, dan 12 di antaranya disiarkan melalui media elektronik.¹⁹ Sementara menurut catatan KontraS Aceh jumlah kasus kekerasan dalam penerapan syariat Islam tahun 2010 sebanyak 55 kasus dan tahun 2011 sebanyak 46 kasus. Pelanggaran yang paling sering terjadi yaitu 26 kasus merupakan memandikan paksa warga yang diduga melakukan pelanggaran syariat Islam. Sementara pelanggaran pemukulan mencapai sebanyak 15 kasus.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pelaksanaan syariat Islam sudah menjadi ketakutan tersendiri bagi segelintir masyarakat, terutama perempuan yang masih belum mau menyesuaikan pakaiannya dengan ketentuan syariat. Dengan demikian mereka merasa terhegemoni, karena ukuran sukses syariat Islam sering di ukur dari berpakaianya perempuan, sementara banyak laki-laki yang becelana pendek pada tempat-tempat umum, tidak shalat jumat, main domino (main batu) di tempat terbuka tidak dianggap melanggar syariat. Kemudian fenomena lain yang jelas-jelas melanggar syariat adalah maraknya tindak kekerasan terjadi di seluruh kabupaten/kota di Aceh, serta terjadinya praktek korupsi dan kemiskinan dimana-mana itu semua luput dari pantauan syariat. Sehingga telah muncul tuduhan bahwa syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak cukup mengikis perilaku tindak kekerasan, dan pelaku korupsi. Kemudian bentuk-bentuk

19 Salman Mardira, "Pemberitaan Syariat Islam di Aceh Cenderung Melabrak etika", dalam, *Okezone*, 25 Juli 2012.

hegemoni lain dalam pelaksanaan syariat Islam adalah terjadi sweeping pada tempat-tempat rekreasi di banyak tempat dengan alasan mengawal pelaksanaan syariat. Beberapa kasus tadi tanpa disadari telah menggiring kepada opini bahwa syariat Islam yang sedang gencar ditegakkan ternyata tidak secara signifikan membawa Aceh ke arah lebih baik, opini ini tentu saja sangat disayangkan.

3. Anak Punk

Banyak yang melihat bahwa komunitas punk sebagai komunitas yang menyeramkan, sehingga keberadaan mereka ditakuti oleh sebagian orang karena perilakunya berbeda dari orang-orang pada umumnya. Secara sosiologis perilaku yang ditunjukkan oleh anak punk adalah perilaku yang butuh perhatian dan keberpihakan, sensasi yang mereka lakukan merupakan suatu bentuk protes terhadap banyaknya ketimpangan sosial yang dilihat dan dialami sehari-hari. Sehingga mereka tidak perlu diasingkan sedemikian rupa, karena mereka butuh teman, sahabat, sama juga dengan keberadaan masyarakat lainnya.

Akhir-akhir ini keberadaan anak punk di kota Banda Aceh mulai terusik ketika pemerintah Aceh melalui satpol PP dan Wilayahul Hisbah (WH) serta kepolisian RI terus memburu keberadaan mereka, kehadiran mereka dianggap dapat meresahkan masyarakat. Menurut Marzuki, Kasis Penyidik dan Penindakan Satpol PP dan WH Aceh, bahwa mereka akan terus melakukan razia terhadap kelompok punk yang ada di kota Banda

Aceh dengan tujuan untuk mengoptimalkan suasana kantibmas serta meminimalisir keresahan masyarakat. Sebab kehadiran kelompok punk ini dinilai telah memicu aksi penjambretan, perkelahian dan berbagai bentuk kriminal lainnya.

Selama dilakukan razia telah ditemukan 12 kelompok anak punk dan geng motor, mereka menamakan kelompoknya dengan beberapa nama, antara lain: (1) Rantai Hitam, (2) Meusium Stret Funk, (3) Rock in Love (Ril), (4) Damai Boleh Ribut Boleh (Dabaribo) (5) Netral, (6) Anak Brutal, (7) Ello, (8) Tanggol Reble, (9) Jusid Guero, (10) Black Gren, (11) Breume-Horizol, dan (12) Lem of Gun. Menurut pengakuan mereka bahwa satu kelompok geng jumlahnya minimal 14 orang dan maksimal 50 orang. Menurut Marzuki sekarang jumlah mereka sudah ratusan orang, bagi mereka yang terjaring akan dilakukan pembinaan, membuat surat pernyataan, dan kemudian dilepaskan setelah dijemput orang tua mereka. “Jika yang bersangkutan kembali ke komunitasnya dan tertangkap lagi, maka akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dibina, seperti yang pernah dilakukan di SPN Saree beberapa waktu lalu.²⁰

Aksi penangkapan terhadap anak punk yang dilakukan oleh Satpol PP-WH dan Kepolisian akhirnya menjadi isu kontroversi dan ditanggapi secara berbeda oleh beberapa pihak. Ada pihak-pihak yang setuju dan ada juga yang memprotes terhadap penangkapan tersebut. Di beberapa media dikabarkan bahwa

20 “Anak Punk dan Geng Digaruk”, dalam, *Serambi Indonesia*, 11 Februari 2011.

Komnas HAM menilai polisi serta Satpol PP-WH di Aceh telah melanggar hak asasi manusia dengan melakukan penangkapan terhadap anak punk. Ridha Saleh, Wakil Ketua Komnas HAM mengatakan bahwa puluhan anak punk tersebut mempunyai hak untuk menentukan gaya mereka. Polisi tidak boleh menangkap anak-anak punk tersebut hanya karena cara mereka berpakaian atau mendengarkan musik berbeda dengan mayoritas warga masyarakat Aceh pada umumnya. Kalau pun dipermasalahkan perilaku menyimpang karena mereka berpakaian tidak seperti tradisi orang Aceh, tetapi apakah mereka pantas untuk diburu dan ditangkap seperti penjahat kelas kakap. Kalau pun harus mendapatkan pembinaan, bukan diperlakukan seperti penjahat kelas kakap yaitu dengan cara penggundulan rambut, di penjara walaupun sebentar serta direndam dalam kolam secara ramai-ramai dan kalau ada di antara mereka yang melarikan diri, maka akan dikejar seperti mengejar penjahat perang. Seharusnya pemerintah memperlakukan sama kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, padahal perilaku mereka jelas-jelas telah menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia.

Selain komnas HAM protes dan solidaritas berdatangan dari anak punk dari dalam negeri, maupun luar negeri terhadap penangkapan tersebut. Sekelompok anak punk Rusia mendatangi kantor KBRI dengan melakukan aksi solidaritas terhadap penangkapan 65 anak punk di Banda Aceh dengan cara mencoret-coret pagar dengan tulisan “punk is not crime”.²¹

21 Afifuddin Acal, 'Punk Juga Manusia', dalam *The Globe Journal*, 19 Desember 2011.

Meskipun penangkapan anak punk terus menuai pro dan kontra, pemerintah Aceh baru-baru ini kembali melakukan penangkapan terhadap sepuluh anak punk di bantaran krueng Aceh dan dua anak punk yang lagi teler di taman bambu runcing kota Langsa,²² penangkapan ini dilakukan karena aksi-aksi yang mereka lakukan dikhawatirkan akan diikuti oleh remaja lainnya.²³

Punk di Aceh dianggap virus yang merusak generasi muda, sehingga pemerintah dengan kekuatan yang dimiliki terus melakukan berbagai bentuk hegemoni kepada mereka. Salah satu bentuk hegemoni adalah melalui pernyataan Kapolda Aceh, bahwa mereka semua akan digaruk untuk dibina di Pusdik SPN Seulawah. Kalau dibiarkan, kelompok yang menjadi sumber penyakit masyarakat ini bisa tumbuh lebih besar,” kata Kapolda. Untuk itu Kapolda memerintahkan polisi dan Satpol PP menangkap kelompok yang rata-rata masih remaja itu untuk dibina di Pusat Pendidikan (Pusdik) Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar. Hal ini perlu dilakukan sebelum anak punk tumbuh lebih banyak di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Apalagi, perilaku mereka semakin mengkhawatirkan. Aksi dan penampilan mereka bukan hanya membuah gerah orang melihat, tapi sudah mengkhawatirkan, seperti baru-baru ini, satu di antara mereka nekat menikam seorang anggota Satpol PP.²⁴

22 “Tim Anti Maksiat Ciduk 2 Punker”, dalam, *Serambi Indonesia*, 8 Oktober 2012.

23 “Anak Punk di Tangkap di Bantaran Krueng Aceh”, dalam, *Pro Haba*, 10 Agustus 2012.

24 “Anak Punk.....11 Februari 2011.

Hegemoni terhadap keberadaan anak punk tidak saja dilakukan oleh satpol PP, WH, maupun polisi. Gubernur dan Walikota Banda Aceh melalui kebijakan yang dikeluarkan terus menghegemoni mereka, sehingga secara beramai-ramai mereka ditangkap di taman budaya tanpa kesalahan yang jelas. Pemerintah Aceh dan Walikota Banda Aceh telah melanggar hukum dan hak asasi manusia dengan melakukan penangkapan secara sepihak tanpa disertai bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan komunitas Punk dan tanpa vonis dari pengadilan. Inilah fenomena yang terjadi pada anak punk Aceh.

4. Aliran Sesat

Aceh sebagai daerah yang berbasis Syariat Islam telah 'disusupi' ajaran-ajaran yang menyimpang, bahkan potensi berkembangnya aliran sesat di Aceh saat ini semakin pesat akibat pemahaman terhadap ajaran Islam yang dinilai masih dangkal dan tidak memiliki pengetahuan yang kuat. Aliran sesat yang berkembang di Aceh masuk dari berbagai lini kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan upaya yang kuat dari para ulama, keluarga, pemerintah dan masyarakat, agar tidak sampai menjerumuskan generasi Aceh ke dalam persoalan akidah yang salah. Menurut Muhammad Nazar, ulama harus menjadi pilar dan juga pagar terhadap penegakan Syariat Islam. Saat ini ulama berada dalam posisi semakin kritis, akibat semakin berkurangnya jumlahnya, untuk itu peran keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan

sebagai upaya membentengi diri dari pengaruh ajaran sesat dan pendangkalan akidah.²⁵

Sungguh ironis rasanya, bila aliran sesat bisa tumbuh dan berkembang secara cepat di Aceh sebagai negeri yang sedang giat menerapkan syariat Islam. Kehadiran ajaran ini sangat mengagetkan banyak orang di Aceh dan di sianter nusantara. Banyak yang bertanya, mengapa aliran sesat bisa tumbuh sangat cepat di Aceh yang notabeneanya sedang giat menerapkan syariat Islam? Persoalan ini merupakan suatu tamparan hebat bagi ulama, teungku gampong, pemerintah serta masyarakat Aceh. Bahkan yang paling menyakitkan berita penyebaran aliran sesat hampir setiap hari menjadi headline koran lokal di Aceh dan beberapa koran nasional. Dengan demikian keberadaan aliran sesat di Aceh menjadi bahan perdebatan di sejumlah daerah di Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah menetapkan 13 kriteria aliran sesat yang tertuang dalam fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2007 yang ditandatangani Ketua MPU Aceh, Prof Dr Tgk H Muslim Ibrahim MA bersama para wakilnya, masing-masing Drs Tgk H Ismail Yacob, Tgk HM Daud Zamzamy, dan Drs Tgk H Gazali Mohd Syam. Ke-13 poin yang dikatakan sesat tersebut antara lain yaitu;²⁶

25 "Aliran Sesat di Aceh Berkembang Pesat" dalam Seputar Aceh, 6 Februari 2012.

26 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2007.

1. Mengingkari salah satu rukun iman yang enam, yaitu beriman kepada Allah Swt, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, kepada hari akhirat, dan kepada qadha serta qadar-Nya,
2. Mengingkari salah satu rukun Islam yang lima, yaitu: mengucapkan dua kalimah syahadat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji di Baitullah,
3. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan iktikad Ahlussunnah wal Jamaah,
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran,
5. Mengingkari kemurnian, dan/atau kebenaran Alquran,
6. Melakukan penafsiran Alquran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir,
7. Mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad saw sebagai sumber ajaran Islam,
8. Melakukan pensyarahannya terhadap hadis tidak berdasarkan kaidah ilmu mushthalah hadist
9. Menghina dan atau melecehkan para nabi dan rasul-Nya,
10. Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir,
11. Menghina dan melecehkan para sahabat nabi Muhammad saw,

12. Mengubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti berhaji tidak mesti ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu, dan sebagainya,
13. Mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i (kuat) yang sah, seperti mengafirkan muslim hanya karena bukan merupakan anggota kelompoknya.

Menurut Muslim Ibrahim, kriteria aliran sesat tersebut kini sangat relevan direaktualisasi kembali, mengingat di sejumlah daerah di Aceh belakangan ini muncul keluhan, protes, dan aksi-aksi penolakan terhadap kelompok tertentu yang diyakini aktif mengembangkan aliran sesat.²⁷

Penolakan secara besar-besaran terhadap aliran sesat dilakukan pada tanggal 07 April 2011 oleh dua ribuan masyarakat Aceh dengan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Aceh dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Mereka mendesak pemerintah segera menertibkan dan menindak tegas penyebaran aliran sesat yang semakin marak beredar di Aceh. Massa dari kalangan guru, pelajar dan mahasiswa mulai bergerak ke kantor Gubernur Aceh sejak pukul 08.30 WIB dengan berjalan kaki dari di Masjid Lampriet Kota Banda Aceh. Berbagai spanduk dan poster tentang kecaman terhadap aliran sesat yang beredar di Aceh turut di bawa oleh massa yang digalang oleh puluhan

27 "MPU Aceh Tetapkan 13 Kriteria Aliran Sesat", dalam, *Serambi Indonesia*, 13 Maret 2011.

organisasi masyarakat termasuk persatuan guru di Aceh. Peserta unjuk rasa yang umumnya memakai baju Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan baju sekolah juga mengecam aksi pemurtadan dan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh aliran-aliran yang selama ini dinyatakan sesat oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.²⁸

Penolakan terhadap keberadaan mereka diyakini dapat mengancam eksistensi keberagaman masyarakat Aceh, sehingga mereka secara beramai-ramai ditolak. Sebab pada beberapa tempat seperti di Peusangan Kabupaten Bireun penganut aliran yang diyakini sesat terlebih dahulu ditemukan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak penganutnya di Banda Aceh. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, jumlah penganut aliran sesat (Millata Abraham) di Banda Aceh mencapai 700 orang. Sementara di Peusangan diperkirakan mencapai 200 orang.²⁹ Aliran sesat yang berkembang di Peusangan maupun di Banda Aceh adalah aliran Millata Abraham.

Pengikut Millata Abraham dalam menjalankan misi sucinya mempunyai jaringan yang cukup rapi dan sangat susah untuk dideteksi. Hal ini diakui oleh mantan pengikutnya dan juga diindikasikan oleh beberapa peristiwa terkait. Menurut pengakuan salah seorang mantan pengikut aliran ini menyebutkan bahwa hampir di semua level masyarakat dengan berbagai profesi dan

28 "Ribuan Warga Desak Musnahkan Aliran Sesat", dalam, *Harian Aceh*, 07 April 2011.

29 "Aliran Sesat di Negeri Syari'at" dalam, *Modus Aceh*, Edisi 11-17 April 2011, 7.

posisi terdapat anggota Komunitas Millata Abraham (KOMAR).³⁰ Fenomena ini sungguh sangat mengkhawatirkan semua pihak, karena jangan-jangan teman, sahabat maupun kerabat kita sudah tersusupi oleh aliran sesat ini yang menghebohkan negeri syariat.

Setelah aliran sesat sudah tidak terdengar lagi di Aceh, upaya lain untuk menyesatkan orang yang sudah beragama baru-baru ini kembali terjadi di komplek perumahan Budha Tzuchi, Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, dimana seorang ibu rumah tangga dibabtis oleh Roy Tyson Kelbulan dari Sulawesi Selatan dan rekan wanitanya, Ribur Manulang asal Tapanuli Selatan. Aksi penodaan agama yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut sempat diramaikan oleh massa sebelum diamankan oleh polisi.³¹ Menurut Sondang Boru Marbun, pembimbing masyarakat Kristen Kanwil Kemenag Aceh, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Roy Tyson dan Ribur Manulang menyampaikan ajaran kitab Injil kepada orang yang berlainan agama salah besar. Cara-cara seperti itu melanggar hukum serta dapat mengakibatkan permusuhan antara umat Islam dengan umat Kristen. Sementara menurut Junaizi, kasubbag humas dan kerukunan umat beragama kanwil kemenag Aceh. Bahwa apa yang dilakukan oleh kedua pembaptis di komplek Budha Tzuchi telah mengusik dan merusak kerukunan umat beragama

30 Samsul Bahri, dkk, 'Fenomena Aliran Sesat di Aceh dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat' (Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2011), 4.

31 "Massa Gagalkan Pembaptisan", dalam, *Serambi Indonesia*, 31 Mei 2012.

di Aceh yang sangat menghargai pemeluk agama lain meskipun masyarakat Aceh sedang menjalankan syariat Islam.³²

Persoalan ajaran sesat dan menyesatkan tidak habis-habisnya ditemukan di Aceh. Baru-baru ini aliran Laduni yang diyakini sesat kembali ditemukan di Kaway XVI, Aceh Barat. Ajaran ini hanya mewajibkan pengikutnya shalat magrib, insya, dan shubuh. Sementara shalat dhuhur, dan ashar tidak wajib dilaksanakan, kecuali sanggup. Kemudian aliran ini tidak mewajibkan pengikutnya shalat jumat, kalau dilaksanakan maka kewajiban shalat fardhu menjadi enam waktu. Shalat hanya dilakukan ketika Allah Swt akan menerima ibadah shalat mereka.³³

Keberadaan aliran Laduni mendapat penolakan dari masyarakat yang ada di Aceh Barat dan Nagan Raya. Bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara merusak sejumlah fasilitas pengikut aliran laduni, berupa sepeda motor, mobil dan toko yang menjadi markas aliran ini pada saat dialog dilakukan antara para ulama dari dua kabupaten (Aceh Barat, Nagan Raya), dan diikuti pemerintah kedua kabupaten serta pengikut aliran laduni di aula Setcam Kaway XVI. Akibat amuk massa, dialog yang semula berlangsung di aula Setcam terpaksa dipindahkan ke aula mapolres Aceh Barat karena massa di luar aula semakin anarkis.³⁴

32 "Polisi Tahan Pembaptis", dalam, *Serambi Indonesia*, 3 Juni 2012.

33 "Muspika Kaway XVI Temukan Pengikut Ajaran Sesat", dalam, *Serambi Indonesia*, 2 September 2012.

34 "Dialog Pengikut Laduni Rusuh", dalam, *Serambi Indonesia*, 4 September 2012.

Selain aliran sesat millata Abraham yang tersebar di seluruh Aceh dan aliran Laduni di Aceh Barat, Aliran yang diyakini sesat kembali merebak di Aceh Utara, yang dikembangkan oleh pimpinan dayah di Kecamatan Meurah Mulia. Untuk mengantisipasi aliran ini pihak muspika setempat sudah menurunkan tim untuk mengultimatum pimpinan dayah tersebut agar secepatnya menghentikan ajaran yang terindikasi menyimpang itu. Menurut Camat Meurah Mulia, berdasarkan penelusuran pihak muspika serta laporan dari masyarakat, bahwa Tgk WD selaku pimpinan dayah telah menyebarkan ajaran dari gurunya dari Barat-Selatan yang membolehkan pasangan suami isteri melakukan hubungan senggama (hubungan badan) pada siang hari di bulan Ramdhan. Untuk menghindari kemungkinan terburuk terhadap ajaran aneh ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara, berserta tokoh masyarakat melalui musyawarah yang dilakukan memerintahkan agar Tgk WD segera menutup dayah miliknya guna menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.³⁵

Belum redanya kasus Millata Abraham, Laduni dan aliran aneh di Meurah Mulia, sebuah LSM di Aceh Barat juga ditengarai melakukan pendangkalan akidah terhadap murid SD, MI serta masyarakat melalui pembelajaran bahasa Inggris, komputer, kursus menjahit, pengembangan anak, konseling dan pertanian. Menurut pengakuan orang tua murid bahwa LMS CMH (Center Mulia Hati) melarang para murid membaca Alquran dan hadis.

35 "Warga Meurah Mulia Temukan Ajaran Aneh", dalam, *Serambi Indonesia*, 4 September 2012.

Terhadap temuan tersebut berbagai elemen di Aceh Barat bereaksi untuk menghentikan operasional LSM tersebut, yaitu mulai dari Wakil Gubernur Aceh, MPU Kabupaten Aceh Barat, WH Aceh Barat, ketua komisi G DPRA, Sekjen HUDA Aceh, dan Ketua Ikatan Dai Indonesia, Banda Aceh.³⁶

Atas berbagai desakan, LSM CMH akhirnya menghentikan operasional sementara pada tanggal 11 Oktober 2012 sambil menunggu klarifikasi dari Pemkab Aceh Barat tentang berbagai tuduhan miring terhadap mereka. Menurut kepala humas CMH, Arafit bahwa CMH tidak pernah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama kepada pihak manapun, sehingga mereka meminta klarifikasi dari Pemkab terhadap tuduhan tersebut sebab CMH sudah menjalankan programnya di Aceh Barat lebih dari tujuh tahun. Kemudian LSM CMH mempunyai berbagai izin dari pemerintah, diantaranya adalah kesepakatan kerjasama antara CMH dan Pemkab Aceh Barat. Sementara tim Muspida Plus Aceh Barat terus mengkaji sejumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemkab sebelumnya sebagai dukungan terhadap kegiatan CMH di wilayah itu.³⁷

Beberapa kasus di atas telah memperlihatkan secara nyata bahwa aliran sesat tumbuh dan berkembang cukup pesat di Aceh

36 "Ajaran Aneh Susupi Murid SD", dalam, *Serambi Indonesia*, 30 September 2012. Berita terkait juga dimuat dengan judul "Ulama: Evaluasi LSM, dalam *Serambi Indonesia*, 01 Oktober 2012. Dan "CMH Lakukan Misi Terlarang", dalam *Serambi Indonesia*", 02 Oktober 2012.

37 "CMH Hentikan Operasional", dalam, *Serambi Indonesia*, 12 Oktober 2012.

belakangan ini. Aliran-aliran tersebut sudah menjadi kekuatan baru yang menghegemoni semua elemen yang ada di Aceh, tidak saja pelajar dan mahasiswa, ulama dan aparat pemerintah pun dikacaukan oleh fenomena yang begitu menghebohkan tersebut. Apalagi mengingat Aceh sedang gencar-gencarnya menegakkan syariat Islam dalam berbagi lini kehidupan masyarakat.

B. Bentuk-Bentuk Bahasa Politik Yang Hegemonik

Suatu realitas yang tidak bisa dihindari dalam setiap analisis sosial politik kontemporer adalah tentang pentingnya penggunaan bahasa. Menurut A.S. Hikam,³⁸ akhir-akhir ini pemahaman lewat wacana bahasa (*language discourse*) semakin diakui pentingnya, terutama setelah muncul pasca-modernisme dan pasca-strukturalisme dalam kancah filsafat dan epistemologi modern. Bahasa dan praktek kebahasaan tidak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yakni sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan sosial politik. Belakangan, semakin disadari betapa bahasa dalam dirinya tampil sebagai representasi dari dan ruang bagi penggelaran (*deployment*) berbagai macam kuasa. Oleh karena itu, bahasa lantas di lihat pula sebagai salah satu ruang (*space*) tempat konflik-konflik berbagai kepentingan, kekuatan,

38 Muhammad A.S. Hikam, "Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice", dalam Yudi Latif dan Idy Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996), 77.

kuasa, proses hegemoni dan juga hegemoni tandingan (*counter hegemony*) terjadi.³⁹

Melihat sedemikian pentingnya, penciptaan dan pemilihan struktur bahasa sebagai upaya pelanggaran kekuasaan, maka tidak berlebihan bila pada masa konflik di Aceh banyak yang lihai menancapkan dominasinya ke dalam ‘ruang’ gerak masyarakat melalui hegemoni bahasa yang direproduksi secara terus-menerus untuk kepentingan ideologis dan politis. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam hegemoni bahasa yang diparektekan pada saat itu adanya semacam klaim akan adanya hakikat atau ‘kebenaran yang pasti benar’ yang melandasi pikiran, dan bahasa. Setiap pemikiran dan tindakan seolah-olah harus selalu didudukkan dalam bingkai ‘tafsiran’ bahasa dominan negara.

Parahnya, kecenderungan penciptaan struktur bahasa politik diantaranya ditandai dengan beroperasinya prinsip *oposisi*

39 Dalam konteks ini, pemahaman atas makna bahasa secara historis (kontemporer) bertahap dari pendekatakan *epistemologi empirisme-positivisme* yang melihat bahasa sebagai alat analisis terhadap fenomena alam dan diarahkan untuk membongkar rahasia-rahasianya secara empiris, dimana pengalaman manusia diekspresikan dalam bahasa dianggap tidak memiliki kendala sejauh ia dinyatakan secara logis, sintaksis dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Hubungan antara manusia sebagai subyek dan realitas sebagai obyek yang dibicarakan ditanggalkan meski kemudian dibantah oleh *Marxis-strukturalistik* (Louis Althusser), teks tidaklah dibentuk oleh subyek, tetapi subyeklah yang dibentuk teks, kemudian berlanjut pada *fenomenologi* yang memahami bahasa adalah ‘rumah Ada’ (*language is the house of Being*) yang dimotori oleh Martin Heidegger yang menganggap bahwa kita adalah bahasa, dimana keseluruhan realitas berlangsung dalam bahasa, yang kemudian ditanggapi secara kritis oleh teori kritis Mazhab Frankfurt serta aliran pasca strukturalisme yang menemukan signifikansi politik dari upaya pembongkaran terhadap operasi-opreasi kekuasaan yang berlangsung dalam ruang-ruang tempat persemunyiannya persoalan politik substantif. Baca: Yudi Latif dan Idi Sibandy Ibrahim, *op.cit.*

*binner*⁴⁰ yaitu sebuah struktur bahasa, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang dibangun oleh pasangan-pasangan konsep yang saling berseberangan, yang hubungannya dianggap sebagai satu harga mati yang tidak dapat disentuh (*untouchable*). Pola oposisi *binner* ini selalu menggunakan kategorial baku, dimana tafsiran menjadi sebuah *mainstream* kebenaran atas realitas sosial lewat bahasa yang diciptakan. Beberapa kosa kata diproduksi dan kemudian direproduksi secara terus menerus untuk melegitimasi kekuasaannya. Dengan demikian kemerdekaan berbahasa adalah kemerdekaan untuk mengikuti aturan-aturan bahasa yang telah disepakati para pemakai bahasa menjadi tidak berarti. Berpolitik bahasa adalah bertata politik. Kemerdekaan politik adalah kemerdekaan menghormati dan mengikuti aturan-aturan politik yang telah disepakati oleh para pelaku politik. Dengan demikian, politisasi bahasa adalah rekayasa menggunakan bahasa, memberlakukan aturan bahasa, dan memaksa pemaknaan bahasa. Bahasa dengan demikian akan dimaknai sesuai dengan konteks politik penguasa.

Politisasi bahasa memang sudah menjadi karakter dari penggunaan bahasa sebagai komoditas politik demi kepentingan kelompok-kelompok dominan. Di Aceh politisasi bahasa merupakan sesuatu yang lumrah ditemukan terutama sekali pada masa konflik dulu. Politisasi ini dilakukan guna mengubah pandangan masyarakat sebagai subjek bahasa. Pada saat itu berbagai istilah muncul, seperti 'Separatis', Gerakan Pengacau

40 istilah ini diusung oleh Ferdinand de Saussure

Keamana (GPK) untuk menunjukkan kepada kelompok 'GAM' sebagai kelompok pemberontak yang harus dimusnahkan demi keutuhan NKRI, Orang Tak Dikenal (OTK) untuk menunjukkan kepada pelaku tindak kekerasan pada masa daerah operasi militer (DOM) di Aceh.

Istilah lain yang tidak kalah menakutkan (hegemoni) adalah kata 'diamankan', istilah 'diamankan' pada masa konflik sama dengan ditangkap untuk dikoreksi informasi, atau untuk dibunuh. Untuk itu makna diamankan berbeda dengan masa damai sekarang. Kalau sekarang makna diamankan bisa jadi ditangkap, disembunyikan, dipenjara, tetapi tidak untuk dibunuh. Kemudian istilah lain yang sering dikonstruksikan pada masa konflik Aceh yaitu istilah 'disekolahkan', istilah ini bukan dalam artian mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi istilah 'disekolahkan' pada saat itu adalah maknanya 'dibunuh'.

Pasca konflik dan MoU Helsinki beberapa kata seperti di atas sudah jarang terdengar, namun belakangan ini ada beberapa istilah baru lain untuk menunjukkan kepada pelaku tindak teror, intimidasi dan kekerasan. Istilah tersebut seperti 'Orang yang Belum Teridentifikasi' (OBT), dan istilah 'Pelaku yang Belum Teridentifikasi' (PBT). Munculnya istilah-istilah sebagaimana dua contoh tersebut adalah betapa bahasa telah dieksploitasi sedemikian rupa untuk kepentingan politik agar semua orang tidak perlu lagi berpikir kritis.

C. Pengucap Bahasa Hegemonik

Bahasa yang sifatnya hegemonik biasanya lahir dari orang, kelompok atau lembaga yang memiliki kekuasaan terhadap orang, kelompok atau lembaga lain. Hegemoni ini lahir karena ada orang, kelompok, atau lembaga yang merasa dirinya memiliki kekuatan untuk menekan kelompok lain lewat berbagai cara, agar orang atau kelompok lain tunduk terhadapnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menelusuri pengucap bahasa serta sikap hegemonik pejabat publik terhadap orang, kelompok atau lembaga yang terhegemoni di Aceh pasca MoU Helsinki. Pengucap dan bentuk-bentuk bahasa yang akan dianalisis tentu saja adalah bahasa yang dimuat melalui pemberitaan media massa, dalam hal ini Serambi Indonesia dan beberapa media lainnya sejak tahun 2011 sampai tahun 2012.

Selama masa pemerintahan Aceh periode 2009-2012 (Irwandi Yusuf/Muhammad Nazar), muncul beberapa bahasa yang cenderung hegemonik dimuat oleh Serambi Indonesia dan beberapa koran lain. Bahasa-bahasa tersebut misalnya 'Saat meninjau beberapa proyek yang di danai oleh APBA ke wilayah Barat-Selatan, gubernur sempat melakukan penyisiran ke beberapa proyek. Salah satu proyek yang disisir adalah pembangunan jembatan yang menggunakan dana otsus tahun 2011 senilai Rp. 1.649.728.000,- realisasi proyek baru sebatas pembangunan tiang dasar jembatan. Gubernur meminta pekerja proyek untuk mengukur jembatan yang panjangnya

18 meter itu, namun para pekerja kesulitan mengukur karena tidak ada alat pengukur, akhirnya diukur pakai tali, gubernur dalam kesempatan itu marah dan mengancam pekerja proyek “bagaimana mengerjakan proyek sebesar ini, alat pengukur saja tidak ada”. Dalam kesempatan yang lain, saat meninjau proyek panti asuhan Suka Makmue, gubernur lagi-lagi marah kepada beberapa pekerja proyek, karena pada saat pertemuan pelaksana dan penanggungjawab proyek hanya diwakili oleh petugas lapangan. Akhirnya gubernur mengancam para penanggungjawab proyek yang tidak hadir pada saat diminta untuk menghadapnya ke Banda Aceh.⁴¹

Bentuk hegemoni lain yang tujuhan oleh salah seorang pejabat publik dengan melakukan acaman pembunuhan terhadap pemimpin redaksi *The Atjehpost.com*. Ancaman pembunuhan ini diduga akibat pemberitaan di *Atjehpost.com* tentang pembentukan partai lokal, pimpinan redaksi diancam melalui telpon dengan kata-kata cercaan dan hinaan penuh amarah dalam bahasa Aceh “*Ok ma kah, pap ma kah. Pu ka tuleh keu kee. Ha na kupeugah lagee yang katuleh*”.⁴² Pangkal persoalan kemarahan pejabat publik tersebut terkait berita tentang dirinya yang ditulis *Atjeh Post* pada Kamis 16 Februari 2012.⁴³

41 “Irwandi Ancam Putus Kontrak 67 Proyek APBA”, dalam, *Serambi Indonesia*, 28 November 2011.

42 “Mengapa Irwandi Mengancam Membunuh”, dalam, *Rusdi Go Blog*, 20 Pebruari 2012.

43 “Irwandi Yusuf Bantah Ancam Wartawan”, dalam, *Tempo.com*, 18 Pebruari 2012.

Sikap hegemonik juga dilakukan oleh oknum polisi di Simeulue terhadap puluhan kepala sekolah SD, SMP dan SMU yang menyebabkan puluhan kepala sekolah mengembalikan stempel sekolah ke DPRK setempat. Sebagaimana berita yang dimuat pada Serambi Indonesia 'di tengah kemeriahan peserta didik merayakan kelulusan ujian nasional (UN), ternyata kepala sekolah di Simeulue menghadapi persoalan serius dengan oknum polisi sehingga mereka beramai-ramai mengembalikan stempel dinas kepada DPRK Simeulue. Menurut informasi yang diperoleh Serambi, ada sekitar 30-an kepala SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Simeulue menyerahkan stempel kepada anggota DPRK setempat karena merasa tidak nyaman sering dicari dan diinterogasi polisi tentang keuangan sekolah. Namun menurut Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, jumlah kepala sekolah yang mengembalikan stempel mencapai 70 orang. "Para kepala sekolah mendatangi DPRK Simeulue diterima Ketua Komisi D Rasmanudin, Jumat (25/5). Mereka menyerahkan stempel sekolah masing-masing kepada anggota dewan," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Simeulue, Pariyoto di Sinabang, Sabtu (26/5). Menurut Pariyoto, para kasek merasa tidak nyaman karena terus dicari dan diinterogasi oleh oknum polisi. Cara-cara seperti ini juga bisa melunturkan kewibawaan dan martabat kepala sekolah di depan anak didik mereka.

Sejumlah kepala sekolah mengaku telah memberikan keterangan di Mapolres Simeulue. Banyak pula yang dimintai

keterangan dan pemeriksaan di warung kopi, namun berakhir dengan kesepakatan “damai”. “Akibat terus menerus didatangi dan ditanyai oleh polisi soal keuangan sekolah, terutama dana BOS, akhirnya kepala sekolah sepakat mendatangi dewan mengembalikan stempel sekolah,” kata Pariyoto yang juga Kepala SMAN 2 Simeulue Timur.⁴⁴

Sikap hegemoni juga diperlihatkan oleh Tgk. I salah seorang anggota DPRK Pidie dari partai Aceh (PA) bersama tiga jamaah lainnya (ZT, M dan S) dengan cara menyuruh turun dan memukul khatib yang sedang berkhotbah di atas mimbar di Masjid Raya Keumala Gampong Jijem, Kecamatan Keumala, Pidie. Aksi pemukulan terjadi karena Tgk. I dan beberapa jamaah lainnya merasa tersinggung dengan isi khutbah yang disampaikan oleh Tgk S bin AA sebagai khatib pada tanggal 9 September 2011, yang disebut-sebut menyebar kebencian dan berisi kampanye politik. Atas pemukulan tersebut Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pidie akhirnya menetapkan anggota DPRK Pidie, Tgk I beserta tiga jamaah lainnya yang terlibat pengoroyokan terhadap Tgk S bin AA tersebut.⁴⁵

Selain hegemoni dilakukan oleh beberapa pejabat publik, hegemoni dalam dunia politik yang melibatkan pengurus partai juga semakin mewarnai pemberitaan media massa sampai sekarang. Perseteruan ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam

44 “Puluhan Kasek Pulangkan Stempel Ke DPRK Seumeulue”, dalam, *Serambi Indonesia*, 27 Mei 2012.

45 “Tgk Ilyas Tersangka Pemukul Khatib”, dalam, *Serambi Indonesia*, 01 Oktober 2011.

sebab, ada yang pindah partai, konflik pribadi, berbeda ide dengan pimpinan partai, dan lain sebagainya. Fenomena inilah yang menyebabkan sesama pengurus partai saling menghegemoni sesamanya untuk menjatuhkan lawan politik yang dimaksud.

Belum lama ini konflik kepentingan antar sesama anggota legeslatif begitu kentara terjadi di Aceh, banyak di antara mereka yang diganti di tengah jalan (PAW) disebabkan perbedaan ide dan kepentingan mereka masing-masing. Sebagai contoh misalnya anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), D (44), menggugat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Banda Aceh, DPW-PA Aceh Besar, dan DPW-PA Sabang sebesar Rp 1 miliar. Gugatan itu menyusul usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu (PAW) yang diajukan PA terhadapnya, 20 Februari 2012. D di PAW karena mendukung pembentukan partai baru yang digagas mantan gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Sehingga, politisi PA itu dinilai memiliki sikap dan keberpihakan politik yang berlawanan dengan PA. Atas dugaan itu, DPW-PA dari tiga wilayah di atas mengusulkan pemberhentiannya.⁴⁶

Bentuk hegemoni dalam partai Aceh tidak saja di alami oleh D dan teman-temannya di DPRA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, IY bersama seorang anggota dewan lainnya, HF, juga mengalami hal yang sama, mereka sejak tanggal 16 April 2012 resmi diberhentikan secara tidak hormat

46 "Darmuda Gugat Partai Aceh Rp. 1 Milyar", dalam, *Aceh.tribun news*, 28 Maret 2012.

sebagai pimpinan dan anggota lembaga legislatif di wilayah itu, sekaligus sebagai kader dan anggota Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Barat. Pemberhentian kedua legislator dari PA itu dilakukan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakkir Manaf dan Sekjennya Muhammad Yahya melalui surat Nomor 010/DPA/PA/SK-PDTH/IV/2012. Disebutkan, pemberhentian secara tidak hormat itu ditujukan kepada IY dengan nomor KTA 130149 yang sedang menjabat Ketua DPRK Aceh Barat. Kader lainnya yang dipecat adalah HF dengan nomor KTA 130045 yang sedang menjadi anggota DPRK Aceh Barat dari Fraksi Partai Aceh.

Dalam surat yang diteken Muzakir Manaf bersama Muhammad Yahya itu disebutkan beberapa dasar dan pertimbangan IY dan HF dijatuhi sanksi sedemikian rupa. Di antaranya, disebutkan berdasarkan surat dari DPW PA Aceh Barat Nomor 44/DPW-PA/AB/IX/ 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang rekomendasi recall. Kemudian, surat pengajuan hasil keputusan musyawarah DPW PA Aceh Barat Nomor 39/DPW-PA/AB/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang rekomendasi. Selain itu, ada lagi surat dari Majelis Tuha Lapan DPA Partai Aceh Nomor 029/MT/DPA-PA/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 perihal laporan hasil penyidikan dan rapat kerja tentang kedudukan IY dan HF sebagai anggota DPRK Aceh Barat dari Fraksi PA dan memutuskan untuk memberhentikan keduanya secara tidak hormat sebagai kader PA. IY juga dicopot dari jabatan Ketua DPRK Aceh Barat dan HF dari keanggotaan DPRK setempat. Keduanya diminta mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Menurut sekretaris PA Aceh Barat, Nyak Hasan bahwa pemecatan diusulkan karena keduanya dinilai melanggar AD/ART Partai Aceh. Mereka tidak mendukung dan membela partai lokal tersebut dan malah membela kader dan kandidat dari partai lainnya saat Pilkada 9 April lalu. Dengan demikian “Mereka diusulkan PAW karena melanggar aturan partai. Aturan ini tetap berlaku kepada siapa pun khususnya kader di Partai Aceh,” tegas Nyak Hasan. Menurutnya, surat pemberhentian secara tidak hormat IY dan HF itu adalah sah dan benar secara administrasi dan yuridis. Surat itu bahkan sudah ditembuskan kepada Muspida Aceh, Muspida Aceh Barat, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Aceh Barat.⁴⁷

Fenomena yang sama juga dialami oleh ketua DPD II Golkar Banda Aceh MH yang dipecat oleh partainya karena tidak mendukung pencalonan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden masa mendatang. Muntasir mempertanyakan apa alasan Partai Golkar memecat dirinya. Menurut MH dirinya memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atas siapa capres yang akan didukungnya. Ketika Ical belum ditetapkan sebagai capres dari Golkar, maka menurutnya sah-sah saja mendukung capres lainnya. Dia merasa demokrasi dalam Partai Golkar sudah di 'kudeta' oleh ketua umumnya sendiri."⁴⁸

47 “PA Ketua dan Anggota DPRK Aceh Barat”, dalam, *Serambi Indonesia*, 24 April 2012.

48 “Muntasir Hamid Protes Atas Pemecatan Dirinya Dari Golkar”, dalam, *Detik News*, 30 Juni 2012.

Dalam partai Amanat Nasional (PAN) sikap hegemoni juga ditunjukkan oleh pimpinan partai terhadap anggota DPR B yang menggugat Dewan Pimpinan Pusat (DPP PAN) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Aceh ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Politisi partai PAN itu meminta majelis hakim agar memerintahkan DPP- PAN mencabut SK pembagian masa tugasnya kepada politisi PAN satu daerah pemilihan dengan I. Gugatan itu muncul karena B tidak bersedia menjalankan SK pembagian paruh waktu masa tugas anggota DPR B yang sudah dijalannya tiga tahun, tertanggal 17 Juli 2009 yang diterimanya 26 Maret 2012. Sesuai pasal 218, syarat PAW hanya jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dewan, serta terbukti melakukan pidana pemilu seperti politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁹

Di Aceh Barat, anggota DPRK, SB dari partai buruh pada hari senin (25/06/2012) memperlihatkan sikap hegemoninya dengan cara mengamuk di bagian umum sekretariat dewan setempat, sehingga seisi kantor menjadi ketakutan karena aksi tersebut. Menurut informasi yang diterima wartawan, SB marah karena surat partai yang ditujukan kepada dirinya sudah ada yang membuka, SB berusaha mencari staf yang bertugas mengagendakan surat, karena tidak menemukan petugas yang di cari, akhirnya ia emosi sehingga memecahkan gelas di ruang umum dan memukul kaca pintu di ruang komputer hingga mengena

49 "Bukhari Gugat DPP dan DPW PAN Aceh", dalam, *Serambi Indonesia*, 30 Agustus 2012.

seorang staf serta memunculkan suara gaduh dan suasana ketakutan di gedung dewan.⁵⁰

Sikap hegemoni juga diperlihatkan oleh kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Sabang, terhadap anggota dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sidang paripurna, dimana SA yang ditugaskan membacakan laporan pansus pada sidang paripurna I LPJ Walikota Sabang untuk tahun 2011. Seusai membacakan laporan hasil pansus DPRK Sabang yang berisi sejumlah kritikan terhadap beberapa dinas yang ada di kota Sabang, SA mendapat perlakuan kasar dari kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Sabang, YH yang tidak terima atas laporan pansus tersebut. YH memaki-maki dengan kata-kata yang kasar serta meremas muka SA dihadapan peserta pansus lainnya.⁵¹

Kasus hegemoni lain juga menimpa kepala desa Penggalan, AHB, ketika dirinya sedang melaju dengan mobil mitshubishi kuda dengan beberapa warga lainnya untuk takziah ke rumah salah seorang warga yang meninggal dunia. Ketika berada di jalan Teuku Umar, kecamatan Penggalan, persis di simpang jalan swadaya atau dikenal dengan gang barisan toba (Barto) yang terpaut hanya puluhan meter dengan SPBU Kasman Lizar. Tiba-tiba muncul sepeda motor yang hendak berbelok ke arah

50 "Anggota DPRK Aceh Barat Mengamuk dan Terluka", dalam, *Serambi Indonesia*, 26 Mei 2012.

51 "Anggota Dewan Polisikan Kadisbudpar Sabang", dalam, *Serambi Indonesia*, 27 Juli 2012.

SPBU, sepeda motor yang dikenderai oleh oknum Brimob yang berpakaian preman tersebut melaju tidak stabil sehingga nyaris bertabrakan dengan mobil AHB.

Haris berhenti dan menanyai pengendara sepeda motor, kenapa mengemudi seperti itu, pertanyaan AHB ternyata menyinggung oknum brimob dengan menjawab ‘apa maumu’. Bersamaan dengan itu AHB langsung dipukul dan ditabrak dengan sepeda motor dari arah belakang oleh oknum brimob yang lain. Melihat kejadian itu beberapa warga berusaha melerai, namun kedua oknum tersebut sulit dikendalikan, bahkan salah seorang warga bernama T turut dipukuli. Kemudian berselang beberapa saat suasana semakin memanas karena salah seorang petugas SPBU yang tidak terlibat apa-apa dipukuli oleh oknum brimob lain dengan popor senjata. Hegemoni yang dilakukan oknum brimob tersebut telah menyulut emosi puluhan massa dengan mendatangi Mapolsek Penanggalan untuk mencari oknum brimob yang melakukan pemukulan terhadap warga.⁵²

Hegemoni selama ini terjadi dalam banyak bentuk dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa atau relasi kuasa guna merebut serta melanggengkan kekuasaan. Beberapa sampel di atas memperlihatkan, bahwa hegemoni telah terjadi sedemikian rupa, melalui bahasa, sikap dan tindakan.

52 “Diduga Pukul Kades, Massa Serang Brimob”, dalam, *Serambi Indonesia*, 5 September 2012.

Secara teoritis, hegemoni melalui politik bahasa pada dasarnya berkaitan erat dengan tiga hal pokok. *Pertama*, kode bahasa (*corpus*). *Kedua*, status bahasa (*status*). *Ketiga*, penggunaan bahasa (*equasition*). Ketiga aktivitas politik bahasa ini memang harus lepas dari intervensi kekuasaan. Baik secara ide maupun secara praktis, politik bahasa harus melihat fenomena penggunaan bahasa dalam kaitannya sebagai konsensus sosial, sehingga bahasa tidak lepas dari ikatan-ikatan sosial. Ketiga aspek di atas kalau dikaji secara mendalam berada dalam posisi yang rentan. Kode bahasa dihadapkan pada persoalan-persoalan bahasa praktis yang tak terjawab karena pesatnya informasi dan kompleksnya dinamika sosial. Misalnya terbatasnya kosa kata kamus dan menjamurnya istilah-istilah asing yang secara kode bahasa (*corpus*) harus segera disikapi. Status bahasa menghadapi kenyataan kuantitas dan kualitas pengguna bahasa. Mengingat fungsi, peran dan kedudukan bahasa, maka sikap kompetitif harus dimiliki oleh para pejabat publik dan politisi dalam berbahasa, sebab status bahasa lebih dekat reputasi, prestasi seseorang dalam berbahasa.⁵³

53 Dadang S. Anshori, *Telaah Bahasa dalam Sistem Kekuasaan Negara*, dalam, *upi.edu/Direktori/FPBS*, Akses tanggal 20 Juli 2012.

BAB LIMA

PENUTUP

KESIMPULAN

Telah terjadi banyak perubahan di Aceh Pasca MoU Helsinki, salah satu perubahan tersebut adalah munculnya ragam bahasa yang menghegemonik. Bahasa-bahasa yang dianggap hegemonik bagi sebagian orang merasa ketakutan bila mendengarkannya, karena dalam realitasnya kata-kata tersebut dapat memberikan sejumlah tekanan-tekanan kepada pihak tertentu.

Politisasi bahasa merupakan sesuatu yang lumrah ditemukan pada masa konflik maupun pasca penandatanganan MoU Helsinki. Bentuk-bentuk bahasa (kata) yang dipolitisasi dan cenderung menakutkan semua orang apabila mendengarkannya seperti

bahasa (kata) “diamankan, disekolahkan, separatis, gerakan pengacau keamanan (GPK), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), cuak, dan Orang Tak Dikenal (OTK)”. Beberapa kata tersebut merupakan bahasa yang sangat menghegemoni bagi siapapun di Aceh pada saat itu. Pasca konflik dan MoU Helsinki beberapa istilah di atas sudah jarang terdengar, namun belakangan ini ada beberapa bentuk istilah baru untuk menunjukkan kepada pelaku tindak teror, intimidasi dan tindak kekerasan. Istilah tersebut seperti ‘Orang yang Belum Teridentifikasi’ (OBT), Orang Tak Bertanggungjawab (OTB) dan ‘Pelaku yang Belum Teridentifikasi’ (PBT). Munculnya istilah-istilah tersebut adalah betapa bahasa telah dieksploitasi sedemikian rupa untuk kepentingan politik segelintir orang atau kelompok agar semua orang tidak perlu lagi berpikir kritis.

Hegemoni melalui bahasa telah terjadi sedemikian rupa di Aceh pasca MoU Helsinki. Sikap hegemoni lebih banyak dikonstruksikan oleh para pejabat dan mantan pejabat serta para politisi di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak tanggung-tanggung mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan orang lain, malah ada di antara mereka yang bersikap kasar terhadap lawan politiknya, sikap hegemoni tercermin melalui tindak kekerasan, teror, intimidasi serta pembunuhan yang terjadi pada banyak tempat di Aceh menjelang pemilukada maupun pasca pemilukada.

Bahasa-bahasa yang cenderung menghegemoni sepatutnya diminimalisir diucapkan, karena akan merusak damai yang sudah ada. Dan sangat berbahaya apabila kata-kata yang sifatnya hegemonik diucapkan oleh orang-orang terhormat (pejabat, ketua partai ataupun tokoh masyarakat). Sebab kata-kata tersebut akan terekonstruksi dengan cepat di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan media massa, karena pengaruh media massa sangat besar bagi masyarakat. Penggunaan istilah OTK, OTB, PBT kepada pelaku teror dan intimidasi hendaknya di ubah dalam bahasa yang lain agar masyarakat tidak merasa ketakutan dengan istilah-istilah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al Yasa'. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Acal, Afifuddin. "Punk Juga Manusia", dalam, *The Globe Journal*, 19 Desember 2011.

Anggraeni, Ricca dan Endra Wijaya, "Pengantar Mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat", dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 8 No. 4 (1019), h. 494-511.

Ajaran Aneh Susupi Murid SD, dalam, *Serambi Indonesia*, 30 September 2012.

Anshori, Dadang S. *Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat dalam Media Massa Pasca Orde Baru: Analisis Wacana Kritis Tentang Idiom Politik di Indonesia*. Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional, yang diselenggarakan oleh Prodi

Pendidikan Bahasa Indonesia, UPI Bandung, Sabtu 30 Agustus 2008.

Andalah, Kamaruddin . *odel Pengaturan Pemerintah Gampong dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002

Aliran Sesat di Aceh Berkembang Pesat, dalam, *Seputar Aceh*, 6 Februari 2012.

Aliran Sesat di Negeri Syari'at, dalam, *Modus Aceh*, Edisi 11-17 April 2011.

Anak Punk dan Geng Digaruk, dalam, *Serambi Indonesia*, 11 Februari 2011.

Anak Punk di Tangkap di Bantaran Krueng Aceh, dalam, *Pro Haba*, 10 Agustus 2012.

Anggota Dewan Polisikan Kadisbudpar Sabang, dalam, *Serambi Indonesia*, 27 Juli 2012.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh Maret 2022. <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/702/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-maret> 2022. html#:~:text=Selama%20periode%20September%202021%2DMaret,menjadi%2010%2C31%20persen).

Bahasa Kekuasaan, diakses tanggal 17 Maret 2012, dalam, <http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip>.

- Bahany As, Nab , dkk, *Menuju Kemandirian Gampong*. Banda Aceh: Pugar, 2009.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) BPM Provinsi NAD tahun 2003.
- Bank Aceh Syariah Cemerlang Dalam Rating Bank 2022, <https://infobanknews.com/bank-aceh-syariah-cemerlang-dala-rating-bank-2022/#:~:text=Berkat%20kerja%20keras%20dan%20sejumlah,%25%20menjadi%20Rp23%2C27%20triliun>.
- CMH Lakukan Misi Terlarang, dalam *Serambi Indonesia*”, 02 Oktober 2012.
- CMH Hentikan Operasional”, dalam, *Serambi Indonesia*, 12 Oktober 2012.
- Dadang S. Anshori, Telaah Bahasa dalam Sistem Kekuasaan Negara, Akses tanggal 20 Juli 2012, dalam, *upi.edu/Direktori/FPBS*.
- Darmuda Gugat Partai Aceh Rp. 1 Milyar, dalam, *Aceh.tribun news*, 28 Maret 2012.
- Dialog Pengikut Laduni Rusuh, dalam, *Serambi Indonesia*, 4 September 2012.
- Diduga Pukul Kades, Massa Serang Brimob, dalam, *Serambi Indonesia*, 5 September 2012.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2007.

Fitra: Aceh Terkorup Kedua, dalam, *Serambi Indonesia*, 2 Oktober 2012.

Gramsci, Antonio. *Notes from Prison Notebooks*. London: Lawrence & Wishart, 1991.

Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.

Haramain, Abd. Malik, dkk. *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*. Yogyakarta: Averroes Press, 2001.

Hegemoni Politik Aceh, akses tanggal 17 Maret 2012, dalam <http://laskarpasee.wordpress.com/2011/12/31/hegemoni-politik-aceh/diakses>.

Hikam, Muhammad A.S. "Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice". dalam Yudi Latif dan Idy Subandy Ibrahim. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1996.

<https://www.bankaceh.co.id/?cat=10#:~:text=Pada%202021%20C%20Bank%20Aceh%20mencatatkan,menjadi%20Rp%2016%2C35%20triliun>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/12/umur-harapan-hidup-aceh-capai-6993-tahun-pada-2020>.

<https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>

<http://humas.acehprov.go.id/angka-kemiskinan-aceh-berangsur-turun/#:~:text=Penilaian%20Ahmad%20>

Dadek%20itu%20menanggapi,atau%20turun%20 sebesar%200%2C89

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/tingkat-pengangguran-terbuka-di-aceh-menurun-pada-agustus-2021>

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/statistik/nilai-ekspor-aceh-meningkat-40-61> persen#:~:text=Kepala%20 BPS%20Aceh%20Ihsanurijal%20dalam,mengalami%20 peningkatan%2040%2C61%25.

Irwandi Ancam Putus Kontrak 67 Proyek APBA, dalam, *Serambi Indonesia*, 28 November 2011.

Irwandi Yusuf Ancam Bunuh Wartawan, dalam, *Waspada Online*, 18 Pebruari 2012.

Irwandi Yusuf Bantah Ancam Wartawan, dalam, *Tempo.com*, 18 Pebruari 2012.

Iskandar, Infrastruktur Berkualitas Tingkatkan Peradaban Bangsa, dalam, *Tabloit Tabangun Aceh*, Edisi September 2011, 13.

Ilyas, Edy Nur. *Keberadaan Desa dan Mukim pada Zaman Kerajaan Aceh, Zaman Penjajahan dan Zaman Kemerdekaan di Aceh Besar*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1996.

Indeks Pembangunan Manusia di Aceh tahun 2021 Cuma naik 0,19 poin dari tahun 2020, <https://aceh.tribunnews>.

- com/2022/02/12/indeks-pembangunan-manusia-di-
aceh-tahun-2021-cuma-naik-019-poin-dari-tahun-2020
- Jaringan Kantor Bank Aceh, https://www.bankaceh.co.id/?page_id=231#:~:text=Sampai%20dengan%20Maret%202022%2C%20Bank,CRM%20dan%2032%20unit%20ATM.
- Kaelan, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Paramadigma, 1998.
- Kaliwarang, Harry. *Aceh dari Iskandar Muda ke Helsinki*, Cet. Ke 3. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010.
- Kieser, Bernhard. Beragama di saat Krisis, dalam *Basis*, Nomor 11-12, tahun ke 49, November-Desember, 2000, 29.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Kuahaty, Yusuf. *Perubahan Struktur Gampong dan Implikasinya: Studi di Empat Gampong Kecamatan Suka Jaya, Kota Madya Sabang*. Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1983.
- Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021, https://dinkes.acehprov.go.id/uploads/lkj_dinkes_20211.pdf
- Langen, K.F.H van. *Lembaga-lembaga Tradisional di Aceh*, Terjemahan, Aboe Bakar. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2003.

- Markoff, John. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Penerjemah, Ary Setyaningrum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Massa Aceh Singkil Terobos Kebun Nafasindo, dalam, *Serambi Indonesia*, 20 Januari 2012.
- Mengapa Irwandi Mengancam Membunuh, dalam, Rusdi Go Blog, 20 Pebruari 2012.
- MPU Aceh Tetapkan 13 Kriteria Aliran Sesat, dalam, *Serambi Indonesia*, 13 Maret 2011.
- Muhammad, Ali Abdul Mu'ti. *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, Terj. Rorihon Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Muntasir Hamid Protes Atas Pemecatan Dirinya Dari Golkar, dalam, *Detik News*, 30 Juni 2012.
- Muspika Kaway XVI Temukan Pengikut Ajaran Sesat, dalam, *Serambi Indonesia*, 2 September 2012.
- Mukhsin, 'Penataan Kembali Lembaga Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000', *Tesis Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003.
- Munandar, Teuku. 7 Tahun Pasca Tsunami, Bangkitlah Atjeh, dalam *Kompasia.com*. Akses Tanggal 13 Juni 2012.
- Meuraxa, Ahmady. Wajah Aceh Adalah Gampong, dalam, *Suara Aceh Untuk Kemandirian Gampong*. Banda Aceh: Impact, 2009.

Melirik Geliat Pembangunan Aceh, *Seuramou Irwandi*, Akses tanggal 13 Juni 2012.

PDRB, (Milyar Rupiah), 2018-2020, <https://aceh.bps.go.id/indicator/52/111/1/pdrb.html>

PNA dan PDA Sah Jadi Parlok, dalam *Serambi Indonesia*, 21 Juli 2012.

Puluhan Kasek Pulangkan Stempel Ke DPRK Seumeulue, dalam, *Serambi Indonesia*, 27 Mei 2012.

Pusat Kurangi Raskin Aceh, dalam, *Serambi Indonesia*, 6 Agustus 2012.

PWI Dukung Kaukus Syariat, dalam, *Serambi Indonesia*, 25 September 2012.

Qanun Jinayat Pecahkan Keheningan Aceh”, dalam, *www.inilah.com*. akses tanggal 10 Agustus 2012.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Rafli Hasan, “Libido Elite Politik di Pemilukada Aceh 2012”, dalam, [http://www.tribunnews.com/diakses tanggal 17 Maret 2012](http://www.tribunnews.com/diakses_tanggal_17_Maret_2012).

- Rizal Mustansyir. *Filsafat Analitik, Sejarah Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ribuan Warga Desak Musnahkan Aliran Sesat, dalam, *Harian Aceh*, 07 April 2011.
- Salman Mardira, Pemberitaan Syariat Islam di Aceh Cenderung Melabrak etika, dalam, *Okezone*, 25 Juli 2012.
- Samsul Bahri, dkk, *Fenomena Aliran Sesat di Aceh dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat*. Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2011.
- Santoso, Listiyono. Hegemoni Bahasa dalam Politik Kekuasaan Orde Baru. *Makalah*, (Tidak diterbitkan).
- Sastrodiningrat, S. *Perilaku Administrasi*. Jakarta: Karunika, 1986.
- Siswati, Endah. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci", dalam *Jurnal Transliter*, Edisi 5 (2019), h. 11-33.
- Suma Riella Rusdiarti, "Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan", dalam *Basis*, Nomor 11-12 Tahun ke 52, November-Desember, 2003, 34.
- Sufi, Rusdi, dkk, *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998.
- Syamsuddin, T. *Pasang Surut Kebudayaan Aceh Dalam Bunga Rampai*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1992.
- Syarif, Safrilsyah, Firdaus M. Yunus. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.

- Sweeping Pengunjung, Santri Dihadang Pemuda, dalam, *Serambi Indonesia*, 5 September 2011.
- Soekanto, Soejono. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1978.
- Soekanto, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1978.
- Simorangkir, O.P. *Etika Jabatan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.
- Tabrani Yunis, *Menggugat Negeri Syariat, akses tanggal 25 Juli 2012*, dalam, www.ccde.or.id/index.php?.
- Tgk Ilyas Tersangka Pemukul Khatib, dalam, *Serambi Indonesia*, 01 Oktober 2011.
- Tim Anti Maksiat Ciduk 2 Punker, dalam, *Serambi Indonesia*, 8 Oktober 2012.
- Ulama: Evaluasi LSM, dalam *Serambi Indonesia*, 01 Oktober 2012.
- Wahyuni, Primasari. "Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Hujan Karya Tere Liye dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA", dalam Jurnal *Skripta*, Vol. 5, No. 1 (2019), h. 41-58.
- Warga Meurah Mulia Temukan Ajaran Aneh, dalam, *Serambi Indonesia*, 4 September 2012.
- Wawancara dengan Imuem Mukim Lamblang Cot Ke ueng, tanggal 29 Agustus 2012.
- Wartawan Gagas Kaukus Pembela Syariat, dalam, *Serambi Indonesia*, 23 September 2012.

www.berita satu.com, diakses tanggal 18 Juni 2012.

Yasraf Amir Piliang, *Pengantar dalam buku Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Yudi Latif dan Idy Subandi Ibrahim (ed). *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1996.

TENTANG PENULIS

Firdaus M. Yunus dilahirkan di Desa Meucat Pangwa Kec. Tringgadeng, Kabupaten Pidie Jaya, 4 Juli 1977. Sekarang adalah dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menamatkan pendidikan di MAN 2 Sigli Meureudu tahun 1995. Tahun 2000 menamatkan pendidikan sarjana pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat IAIN Ar-Raniry. Tahun 2003 menamatkan Pendidikan S2 pada Fakultas Filsafat UGM. Tahun 2005 kembali menamatkan pendidikan S2 pada Prodi Sosiologi, Fakultas FISIP UGM Yogyakarta. Untuk gelar S3 penulis raih di UIN Sumatera Utara dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjabat beberapa organisasi, antara lain sebagai Ketua HMJ Jurusan Akidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry tahun 1997. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMAF) Ushuluddin IAIN Ar-Raniry tahun 1999. Dan Ketua

Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY) tahun 2004.

Sebelum menjadi dosen tetap di IAIN Ar-Raniry (sekarang UIN Ar-Raniry), penulis pernah bekerja sebagai fasilitator Proyek Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Aceh Jaya 2005, dan di Kota Sabang 2006-2007. Kemudian sebagai tenaga ahli kelembagaan tata ruang BRR NAD-NIAS 2008 di Aceh Singkil. Selain pernah bekerja di LSM, penulis juga pernah bekerja sebagai tenaga peneliti pada pada LKAS Banda Aceh 2009-2013. Dan sekarang di LSAMA Banda Aceh.

Selain aktif mengajar dan meneliti, penulis aktif mengedit beberapa jurnal ilmiah, antara lain Jurnal progresif (LKAS Banda Aceh), At-Tanzir dan Bidayah (STAI Tgk. Dirundeng, Meulaboh, Aceh Barat) Jurnal Islam Futura (Pascasarjana UIN Ar-Raniry), Jurnal Fitra (STAI Tapaktuan), Jurnal Wasatiyyah, dan Jurnal Pemikiran Islam (JPI) (Prodi AFI Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Beberapa artikel ilmiah yang sudah terpublikasi antara lain (1) Implikasi Postmodernisme Terhadap Pluralitas Agama, *Jurnal Substantia*, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2000. (2) 'Lubang Hitam Akhir dari Ornament Jagad Raya, *Jurnal Fakultas Filsafat*, UGM, Yogyakarta, 2004. (3) Juques Ellul; Membongkar Paradigma Budaya Teknokratis Masyarakat Modern, *Jurnal Substantia*, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009. (4) Postmodernisme: Implikasinya atas Paradigma

Pendidikan Indonesia, *Jurnal Progresif*, LKAS Banda Aceh, 2009. (5) Filsafat Sosial di Tengah Pergumulan Ilmu-Ilmu Sosial, *Jurnal Substantia*, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. (6) Konstruksi Kurikulum Pendidikan Damai di Aceh; Studi Deskriptif Analitik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal, dalam, *Proceedings of International Seminar on Sustaining Peace in Aceh Throught the Integration of Local Values*, Banda Aceh: LKAS Banda Aceh, 2010. (7) Etika Multikulturalisme Upaya Membangun Identitas Kultur Keindonesiaan, *Jurnal Bidayah*, STAI Tengku Chk Dirundeng, Meulaboh (2011). (8) Menafsir Ulang Keberagaman Umat Beragama, *Jurnal Substantia*, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011. (9) Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre, *Jurnal Al-Ulum*, IAIN Sultan Amai, Gorontalo. (10) Spirit Pembebasan dalam Pendidikan Y.B Mangunwijaya, dalam, *Jurnal At-Tarbawi*, STAIN Cot Kala, Langsa, 2012. (11) Agama dan Pluralisme, *Jurnal Islam Futura*, Pascasarjana UIN ar-Raniry, Banda Aceh. (12) Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya, *Jurnal Substantia*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2014. (13) “Pemikiran dan Gerakan Organisasi Ulama (Studi Atas Gerakan MPU dan MUNA di Aceh)”, *Proceeding International*. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh-ICEISR Malaysia, 2016. (14) “The Role of HUDA in the Implementation of Islamic Syari’ah in Aceh Indonesia”. IOSR Journals International Organization of Scientific Research, India, Volume, 22 Issue: 5 (Version – XI), e-ISSN: 2279-0837 p-ISSN:2279-0845. (15) Tgk.

Syiah Kuala is the Initiator of Tarekat Syattariah in Archiplego, *Jurnal Wasatiyyah*, Prodi AFI Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Vol. 1 No. 1 Desember 2018. (16) *Syariat Islam di Aceh antara Harapan dan Tantangan Global, Conference Proceedings: Islam, Social, and Transitional Justice “Towards Sustainable Peace in Regional and Global Contexts”*, 2018. (17) Mengenal Konsep Filsafat Ketuhanan dan Tasauf Ahmad Daudy, *Ar Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 1, 1-14, (2019). (18) Konsep Akal Menurut Perspektif Alquran dan Para Filsuf, *Ar Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol, 7 No. 2, (2020), 56-69. (19) Pergeseran Pola Belajar Santri Dayah di Aceh, *Dayah: Journal of Islamic Education*, Vol. 4, No. 1, (2021), 56-72, (20) Tension Between Schools of Thought: Aswaja and Wahabi in Aceh, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 21, No 2 August (2021), p. 183-197, (21) [The Perspective Of Ulama Dayah On The Hadith About Procedures Of Friday Prayer In Aceh](#), *Journal Webology*, Volume 19, Number 2, (2022)p. 5577-5594. (22) Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 22, No 1 (2022), 237-262.

Beberapa buku dan artikel untuk buku yang telah terbit antara lain: (1) ‘Harvey Cox; Sekularisme dan Sekularisasi, dalam *Dance of God*, Yogyakarta: Apeiron-Philotes, 2003. (2) *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*, Paulo Freire dan YB Mangunwijaya, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. (3) ‘Islam Politik dan Gerakan Fundamentalisme di Indonesia’ dalam, *Kerukunan Pembinaan*

Hidup Umat beragama, Reflesi Cendekiawan dan Kesatuan Umat, Yogyakarta: Aula, 2004. (4) *Rehab Rekon Berbasis Realitas Sosial: pendekatan Filsafat Pendidikan dan Filsafat Budaya*, dalam, *Education Network*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009. (5) *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009. (6) *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh 2 Jilid*, Banda Aceh: LKAS Banda Aceh. 2010. (7) *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, Banda Aceh: LKAS Banda Aceh, 2010. (8) *Gerakan Spritualitas dan Konflik Antar Umat Beragama*, dalam *Buku Sosio Religi dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama*, Ushuluddin Publishing, Banda Aceh, 2015. (9) *Skeptisisme Beragama Dalam Pandangan Humanisme dan Eksistensialisme*, dalam *Diskursus Filsafat Agama di Era Kontemporer*, Banda Aceh: Searfiq bekerjasama dengan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2016. (10) *Gampong di Aceh Satu Dekade Setelah Tsunami*, Banda Aceh: ICAIOS-Monash University, 2017. (11) *Materialisme*, Banda Aceh: Bambu Kuning, 2019. (12) *Aswaja dan Wahabi di Aceh Memahami Sebab Ketegangan dan Solusinya*, Banda Aceh: LSAMA, 2020. (12) *Teungku Dayah Syariat Islam dan Kontestasi Organisasi di Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.

Beberapa penelitian yang pernah penulis lakukan antara lain: (1) *Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre*, 2010. (2) *Peran HUDA dalam Perubahan Sosial Politik di Aceh Pasca Orde Baru*, 2010. (3) *Fenomena Penggunaan WiFi pada Warkop dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan Generasi*

Muda Aceh, 2011. (4) Tantangan dan Harapan Perempuan Dalam Membangun UMKM Di Kota Banda Aceh. (5) Bahasa Dalam Kancah Perpolitikan di Aceh Pasca MoU Helsinki, 2012. (6) Strategi Pengembangan Program Studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, 2013. (7) Materialisme Menurut Marxisme dan Islam (2014). Aceh Communities Assistance Project II (ACARP II) as a Component of the Aftermath of Aid: Assessing the Effectiveness and Sustainability of Post-Disaster Reconstruction in Aceh, Indonesia, 2014. (8) Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Organisasi Ulama (Studi Terhadap Gerakan Keagamaan HUDA dan MUNA di Aceh) (2016). (9) Dampak Pemberian Jerih Terhadap Peran Imuem Meunasah di Kecamatan Trienggadeng Pidie Jaya, 2017. (10) Respon Aswaja dan Akademisi Terhadap Gerakan Wahabisme di Aceh, 2018. (11) Etos Kerja Perempuan dalam Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Aceh, 2020.

Untuk berkoresponden dapat menghubungi firdaus.myunus@ar-raniry.ac.id.

Raina Wildan lahir di Banda Aceh tanggal 23 Februari 1983. Jenjang pendidikan yang tempuh SD Neg 82 Banda Aceh (tahun 1989-1995) dan SLTP Neg 6 Banda Aceh (tahun 1995-1998) dan SMA Neg 4 Banda Aceh (tahun 1998-2001). Kemudian, melanjutkan Pendidikan S1 pada Program Studi Ushuludddin Aqidah Filsafat di Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry (tahun 2001-2005). Tahun 2007 Kembali melanjutkan pendidikan S2 di Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry pada Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam.

Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sebelum menjadi Dosen Tetap di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, penulis juga bekerja sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik di STAI-PTIQ Banda Aceh (tahun 2011-2015). Selain itu juga pernah menjadi Fasilitator pada Proyek Tsunami Aceh-Japan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) (tahun 2010-2012).

Selain aktif mengajar, penulis juga aktif menjadi Editor pada beberapa Jurnal, diantaranya Jurnal Substantia (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry), Jurnal Al-Qira'ah (STAI-PTIQ Aceh) serta juga menjadi Managing Editor pada Jurnal Pemikiran Islam (JPI) Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Beberapa Artikel Ilmiah yang sudah terpublikasi diantaranya Hijab Dalam Pandangan Murthada Muthahari *Jurnal Al-Qiraah* (2017), Seni Dalam Perspektif Islam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*

(2018), Islam dan Tantangan Modernitas Perspektif Nurcholish Madjid *Jurnal Pemikiran Islam* (2021) dan Pengaruh Wirid Yasin terhadap Spiritualitas Kaum Ibu di Kecamatan Sawang *Jurnal Pemikiran Islam* Prodi AFI Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry (2021).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis diantaranya Tradisi Peusijek Pada Masyarakat Aceh (Studi Penelitian pada Gampong Jeulingke Banda Aceh) tahun 2018 dan Etos Kerja Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Aceh tahun 2020.

Untuk Berkoresponden dapat menghubungi raina.wildan@ar-raniry.ac.id

Syamsul Rijal, dilahirkan di Perapat Hulu, Aceh Tenggara, 30 September 1963, menamatkan sekolah dasar (1975), PGAN 4 THN (1979), MAN (1981), menekuni dunia dayah MUDI Mesra (1979-1982) di Samalanga. Memperoleh gelar Sarjana Muda (BA, 1985), Sarjana Lengkap (Drs, 1987), dan menamatkan Master (M. Ag, 1994) di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Memperoleh gelar Doktor (2006) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Memperoleh jabatan Guru Besar bidang Filsafat Islam pada tahun 2016.

Pernah disertai tugas sebagai ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat (1999-2000), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2000-2004, 2004-2008), Dekan Fakultas Ushuluddin (2008-2012, 2012-2014), dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (2014-2018) pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Menulis artikel pada jurnal, dan beberapa buku telah diterbitkan antara lain *Bersama Al-Ghazali Memahami Filosofi Kejadian Alam*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2003, *Filsafat Umum*, Ushuluddin Press, Banda Aceh, 2008, *Dinamika Pemikiran Islam di Aceh*, Balai Arpus, Banda Aceh, 2011, *Refleksi Filosofi Kehidupan Sosial Masyarakat*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2014, *Pengantar Studi Khazanah Pemikiran Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, *Membangun Masa Depan Islam*, Naskah Aceh, Banda Aceh 2018, *Pesan Pembangunan Karakter*, Bandar Publishing, Banda Aceh, (2020).

Lukman Hakim, Lahir di Aceh Besar pada 24 Juni 1975. Bekerja sebagai dosen tetap dalam mata kuliah Teologi Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dan juga menjadi pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Jenjang akademik diawali dengan pencapaian gelar Sarjana Agama dari Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry pada tahun 1998. Pada tahun 2014 menyelesaikan gelar Magister Agama dalam Konsentrasi Pemikiran dalam Islam pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya menyelesaikan studi doktoral dalam bidang Ushuluddin dan Falsafah dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 2014.

Dalam rangkaian kerja akademiknya telah menuliskan beberapa buku diantaranya *Wacana Teologi Transformatif: Dari Teosentris ke Antroposentris*, *Teologi Aceh: Refleksi Sosial Agama dan Politik Kontemporer* dan lain. Selain menuliskan karya dalam bentuk buku dan artikel ilmiah, juga aktif mempublikasikan artikel di media cetak di Aceh tentang tema-tema adat, sosial budaya dan keagamaan. Disamping menjalankan tugas utamanya sebagai dosen di UIN Ar-Raniry juga aktif pada Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh.

Syarifuddin, lahir di Yaman Mesjid, Beureunuen, Pidie pada 23 Desember 1972. Sekarang tinggal di Jalan Prada Utama Lr. Tunggal VII, No. 15 Lamgudoup, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh. Pernah di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan. Melanjutkan kuliahnya di IAIN Ar-Raniry (kini UIN Ar-Raniry), S2 di Fakultas Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta serta menyelesaikan S3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sekarang merupakan dosen tetap pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh